

Mozaik Kebijakan
Sosial Politik

Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

Mozaik Kebijakan Sosial Politik

Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

Editor:
Winda Hardyanti
Nurudin



Mozaik Kebijakan Sosial Politik

Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

Hak cipta pada para penulis dan dilindungi oleh Undang-undang (All Rights Reserved)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit,

15,5 x 23,5 cm, xii + 170
ISBN : 978-602-6751-16-4
Cetakan Pertama, 2016

Penulis:

Saiman
Hafid Adim Pradana
Dyah Estu Kurniawati
Tutik Sulistyowati
Gonda Yumitro
Najamuddin Khairur Rijal
Muhammad Syaprin Zahidi
Demeiati Nur Kusumaningrum
Muhammad Hayat
Winda Hardyanti
Oman Sukmana
Nurudin
Rachmad K Dwi Susilo
Zen Amiruddin

Editor:

Winda Hardyanti
Nurudin

Diterbitkan oleh:

Pusat Kajian Sosial Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas no. 246 Malang
Telp: (0341) 464318 psw. 132

Bekerjasama dengan

Buku Litera

Minggiran MJ II/1121, RT 53/15 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta.
Telp. 08179407446 e-mail: bukulitera@gmail.com., purnamacd@gmail.com.

Pengantar Editor

Menentukan sebuah kebijakan, tak ubahnya mengkolaborasikan sejumlah kepentingan dan kewenangan. Tak terkecuali kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan wilayah perbatasan, kebijakan ekonomi maupun kebijakan dalam pengaturan sistem sosial di masyarakat. Sebagai contoh adalah kebijakan terkait kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis, karena merupakan wilayah suatu negara yang menjadi batas kedaulatan negara dan juga merupakan wilayah yang merefleksikan halaman depan suatu negara. Namun berbagai peristiwa dan permasalahan yang terjadi di perbatasan sangat kompleks mulai dari yang bersifat sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan yang dapat mengancam stabilitas perbatasan, nasionalisme dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan perbatasan adalah akibat ketertinggalan pembangunan dengan negara tetangga. Oleh karena itu peran negara sangat dibutuhkan dalam pengelolaan, pembangunan dan menjaga keamanan kawasan perbatasan dalam rangka mempertahankan nasionalisme dan kedaulatan NKRI.

Para pelaku kebijakan di arena publik, dalam hal ini pemerintah, menghadapi banyak pilihan dan memiliki dampak yang bervariasi, atau *multiple equilibria*, keseimbangan yang beragam. Hubungan antara pelaku dan pilihan-pilihan kebijakan senantiasa diliputi oleh ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit bagi para pelaku kebijakan untuk memahami apa kepentingan mereka, atau bila memahaminya, tidak mudah mengetahui kebijakan macam apa yang harus diambil agar kepentingan bisa tercapai. Disinilah muncul pentingnya peran ide. Ide membantu para pelaku mendefinisikan kepentingan mereka dan menghubungkannya dengan berbagai sarana untuk mencapainya.

Kasus lain adalah kebijakan pemilihan kepala daerah harus sensitif gender. Secara kuantitas calon kepala dan wakil kepala pemimpin daerah dari jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Fenomena ini tentunya cukup mengejutkan, karena secara

realitas masyarakat Indonesia selama ini masih mempermasalahkan keberadaan kaum perempuan dalam politik apalagi sebagai pemimpin. Secara realitas politik, perempuan kurang memiliki kesempatan dibanding laki-laki bahkan keberadaannya dipandang sebagai *liyan* (orang lain). Pandangan ini cukup beralasan karena secara kultural, perempuan selama ini diposisikan dalam wilayah domestik dan laki-laki di ranah publik, sehingga keterlibatannya dalam politik pun tidak diharapkan.

Berbicara tentang kebijakan pemerintah tentu tak bisa dilepaskan dengan upaya menguatkan kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Masyarakat internasional mengakui apa yang dinamakan sebagai kedaulatan suatu negara sehingga setiap negara didunia ini dilarang untuk melanggar kedaulatan negara lain. Disisi lain, inilah yang menjadi sumber masalah yang membatasi ruang gerak masyarakat internasional jika terjadi suatu masalah kemanusiaan disuatu negara. Kondisi tersebut diatas akhirnya melahirkan suatu ide tentang prinsip 'R2P' yang awalnya diinisiasi oleh Francis Deng seorang mantan diplomat asal Sudan yang pernah menjadi perwakilan khusus PBB untuk masalah pengungsi internal. Francis Deng berpendapat bahwa ide mengenai 'kedaulatan negara' seharusnya bukan menjadi dasar bagi semua negara untuk melakukan apapun yang dikehendakinya dan melarang adanya campur tangan internasional. Disisi lain, seharusnya kedaulatan negara didasarkan pada perlindungan terhadap rakyatnya. Kedaulatan negara harusnya didasarkan atas konsep 'kedaulatan sebagai tanggung jawab' (*sovereignty as responsibility*). Jadi, jika suatu negara dianggap tidak dapat menerima tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya maka tekanan internasional dapat masuk ke negara tersebut.

Dalam bidang kebijakan perekonomian pada level internasional dan nasional, kebijakan dalam perdagangan internasional menjadi janji 'liberalisme' untuk memajukan pembangunan sebuah negara secara umum dan kesejahteraan individu secara khusus. Ditambah lagi, para pakar ekonomi melihat adanya '*invisible hand*' (tangan-tangan tak terlihat) sebagai mekanisme pasar yang menjamin masing-masing pelaku bisnis mendapatkan keuntungan sesuai dengan usaha yang dimaksimalkan -- *the matter of productivity and efficiency*. Logikanya, jika produsen memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) diyakini produk yang dihasilkan mampu mencapai akses pasar secara kompetitif.

Namun kenyataannya, era globalisasi menuntut persaingan pasar yang lebih ‘ketat’. Ditambah lagi, perayaan ‘*open market*’ di negara-negara berkembang dan kemajuan industrialisasi negara-negara maju yang berbasis teknologi tinggi membuat perdagangan internasional seolah rimba yang tidak berujung. Siapa pihak yang kuat akan bertahan, sementara pihak yang tidak mampu berinovasi akan tergusur. Sistem perdagangan memuat serangkaian peraturan dan mekanisme kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dan multi-sektoral.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, masyarakat sebagai konsumen memiliki permintaan yang beragam dalam konteks jenis produk dan lebih spesifik serta detil dalam hal kualitas. Sebagai contoh dalam industri makanan dan minuman, konsumen ingin memastikan bahwa bahan yang digunakan merupakan pilihan para ahli, melalui proses yang higienis, dan sudah sesuai dengan standar kesehatan. Belum lagi, bagi komunitas muslim label ‘halal’ menjadi sebuah kebutuhan.

Kebijakan perekonomian ini sejatinya memberikan satu gambaran yang sangat jelas tentang kuasa kapital dalam interaksi sosial. Kapital menjadi *thing* yang memaksa keseluruhan relasi tersedot dalam makna yang lebih bersifat kuantitatif. Maksudnya, ukuran relasi adalah jelas tentang tanda material. Tidak ada kapital, tidak ada barang yang bisa singgah di tangan. Tapi jangan khawatir, meski tanpa kapital, sebenarnya kita juga masih diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh penguasa ruang untuk menikmati keindahan ruang tersebut. Sebut saja Malang Town Square (Matos), sebuah mall populer di Kota Malang. Kita bisa jalan-jalan dengan penuh gaya, pura-pura memilih barang, bertanya sambil seakan-akan mau membeli, lalu pergi tanpa merasa bersalah ke etalase lain. Sang penguasa ruang tidak marah, justru bangga karena “yang tidak punya uang tadi” telah belajar tentang mata kuliah “pengenalan akan barang-barang konsumsi”. Inilah hal yang penting, karena itulah “*stock of knowledge*” baru yang menjadi *chip* yang akan selalu melekat di otaknya. Dalam tradisi Post- Modernisme, telah terjadi perpindahan tentang realitas khayali ke dalam *mind*. Realitas itu akan menumpuk sebagai *chip-chip* kecil di otak, dan sewaktu-waktu siap ditransfer sebagai bentuk tindakan nyata, yaitu “siap belanja saat sudah punya uang”.

Kontrol dalam konteks ruang merujuk pada batasan yang bersifat sosial maupun ekonomi. Batasan secara sosial bisa ditafsir sebagai lahirnya aturan-aturan dalam bentuk teks maupun non teks. Teks merujuk pada

fungsi penguasa secara administratif. Sebagai contoh, ketika pemerintah membangun *mall*, implikasi logisnya adalah *mall* akan menjadi pusat hubungan sosial baru dalam ritme ekonomi. Benturan “*interest*” diantara aktor adalah hal yang jamak terjadi. Itulah saat teks administratif menjadi batasan tentang bagaimana relasi harus dilakukan. Sementara non teks adalah *social fact* yang diproduksi oleh aktor dikarenakan menurunnya *power* pemilik ruang. Munculnya preman maupun pekerja seks komersial adalah bukti telanjang manifestasi *social fact* tersebut.

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sejumlah kebijakan yang dituangkan dalam program pemerintah yang didifusikan kepada masyarakatnya. Adakalanya program-program tersebut berupa sebuah inovasi, alias sesuatu yang benar-benar baru atau sesuatu yang sudah lama ada namun dianggap baru oleh masyarakat setempat. Sebuah program baru atau inovasi yang benar-benar baru ini tak jarang harus mengalami sejumlah tantangan ketika mengalami proses pendifusian atau yang lebih populer disebut sebagai proses difusi inovasi. Terlebih jika program-program baru ini diberikan pada masyarakat pedesaan yang memiliki karakter khas, misalnya berada di lokasi terpencil, *low literated* atau kurang berpendidikan, sarana komunikasinya masih melalui jalur-jalur tradisional, dsb.

Ketika program-program baru tersebut mengalami proses difusi inovasi, tentu banyak pihak atau hal yang harus dilibatkan. Salah satu pihak yang berperan besar dalam proses difusi inovasi ini adalah pemimpin opini atau biasanya disebut sebagai *opinion leader*. Selain berupa program-program pemerintah, kedigdayaan *opinion leader* ini bisa kita lihat pada sejumlah fenomena lain. Seperti misalnya fenomena almarhum Mbah Maridjan. Mbah Maridjan adalah tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat di sekitar lereng Merapi. Status sosialnya sebagai juru kunci Merapi memang membuatnya terlihat ‘sangat sakti’. Apa yang diucapkan oleh Mbah Maridjan ini bahkan melebihi *power* yang dimiliki pemerintah ketika turun instruksi pemerintah agar masyarakat lereng Merapi segera mengungsi.

Masyarakat sebagai entitas sosial juga memiliki gerakan sosial sebagai manifestasi *social power*. Gerakan-gerakan sosial ini mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka.

Dengan demikian, gerakan sosial terkait dengan dimensi perlawanan atau penentangan. Jika gerakan sosial lama menekankan pada isu-isu determinisme ekonomi, gerakan sosial baru menekankan pada isu-isu non ekonomi, seperti: identitas, kultur, gender dan lingkungan. Teori gerakan sosial baru melihat logika tindakan berdasar pada politik, ideologi, kultur dan sumber-sumber identitas (etnis, gender dan seksualitas). Gerakan ini menekankan proses yang mempromosikan otonomi dan penentuan diri (*self determination*) dari pada strategi untuk memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan

Dalam membuat kebijakan, banyak aspek yang harus diperhatikan. Tak hanya aspek kepentingan semata namun kajian lintas sektor perlu dilakukan untuk memperkaya esensi kebijakan tersebut. Perlu adanya pengaturan atau kebijakan dalam hal kehidupan sosial masyarakat, agar kebebasan yang dimiliki tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas ini rawan menimbulkan penyakit sosial. Dalam kajian psikologi sosial, orang yang terlalu mementingkan diri sendiri dan kurang peka pada lingkungannya dinamakan dengan sosiopat (penyakit sosial). Istilah ini diturunkan dari kata psikopat berarti sakit jiwa (*psyche*=jiwa, *pathos*=penyakit). Pengidap penyakit itu tak peduli di atas bisa disebut sosiopat (*sosio*=berarti sosial, *phatos*=penyakit) karena ia anti sosial dan cenderung merugikan orang disekitarnya.

Orang yang anti sosial cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri. Konsekuensi dari perkembangan teknologi menjadi penyebab utama fenomena anti sosial ini. Orang yang termasuk kelompok anti sosial ini bisa jadi membela diri, bukankah ini konsekuensi teknologi modern? Teknologi memang diciptakan untuk membantu manusia dalam mempermudah pekerjaan, bukan membuat manusia lupa daratan lantaran teknologi itu. Seorang peneliti bernama Robert D Hare (Universitas Columbia) secara ekstrem bahkan pernah mengatakan bahwa mereka yang termasuk sosiopat sering melakukan tindakan komufase. Penderita penyakit itu akan berkomufase, mudah memutarbalikkan fakta, cenderung menyebar kebohongan dalam media sosial untuk keuntungan dirinya. Hal ini tentu membahayakan, tidak hanya dalam konteks hubungan sosial manusia, lebih jauh lagi dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara dan kondusivitas negara.

Buku ini merupakan sebuah bunga rampai dari berbagai kajian ilmu sebagai bentuk analisis mendalam terkait kebijakan dan hubungan sosial

dilihat dari aneka sisi. Berupaya untuk menjembatani kegelisahan para pemikir yang mencoba untuk melihat kajian-kajian sosial dari perspektif sosiologi, hubungan internasional, komunikasi, dan ilmu pemerintahan.

Kajian dalam buku ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Meskipun tidak secara detail menggambarkan bagaimana cara menghadapi, apa kiat-kiat, perangkat apa yang perlu disiapkan tetapi setidaknya memberikan bekal informasi. Diharapkan, kita bisa terbuka wawasan bahwa MES adalah sebuah keniscayaan yang perlu disiapkan sarana dan prasarannya.

Buku ini sebuah hasil pemikiran dari dosen-dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Memang buku ini bukan sebuah pemikiran yang brilian, tetapi pemikiran yang tidak terdokumentasikan akhirnya akan menguap. Tulisan ini juga bentuk dari keberanian dosen-dosen Fisip UMM dalam mempertanggungjawabkan buah pemikirannya. Meskipun sederhana, akan lebih baik daripada bahasa lisan yang tidak tertulis dan tak bisa dinikmati dalam jangka panjang. Kelamahan yang terasa bisa jadi antar tulisan tidak nyambung, tetapi tetap ada benang merah dalam kajian sosial politik. Juga, data masing-masing tulisan juga akan terulang, namun demikian setiap tulisan data punya nuansanya sendiri sehingga tetap punya relevansinya. Selamat membaca.

Malang, Januari 2015

Editor

Daftar Isi

Pengantar Editor.....	v
Daftar Isi.....	xi

KEBIJAKAN POLITIK DALAM KONTEKS LOKAL DAN INTERNASIONAL

Kebijakan Politik Presiden SBY Tahun 2009-2014 Dalam Pembangunan Perbatasan Indonesia

<i>Oleh Saiman</i>	3
--------------------------	---

Chessboard Politics dalam Kompleksitas Rezim Negara-Negara Pecahan Uni Soviet

<i>Oleh Hafid Adim Pradana</i>	15
--------------------------------------	----

Peran Ide dalam Perubahan Kebijakan

<i>Oleh Dyah Estu Kurniawati</i>	27
--	----

Dilema Gender Kebijakan Politik Untuk Perempuan

<i>Oleh Tutik Sulistyowati</i>	35
--------------------------------------	----

KONFLIK POLITIK DAN EKSISTENSI INTERVENSI KEMANUSIAAN

Pengaruh Konflik Suriah Terhadap Geopolitik Kawasan

<i>Oleh Gonda Yumitro</i>	47
---------------------------------	----

Ancaman ISIS dan Respons Pemerintah Kota Malang

<i>Oleh Najamuddin Khairur Rijal</i>	55
--	----

Intervensi Kemanusiaan, Kewajiban Untuk Melindungi dan Kepentingan Dibaliknya

<i>Oleh M. Syaprin Zahidi</i>	66
-------------------------------------	----

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KUASA EKONOMI

Ekonomi Politik Perdagangan Internasional: Sertifikasi Keamanan dan Kualitas Sebagai Kebijakan Standarisasi

<i>Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum</i>	81
--	----

Ruang: Struktur dalam Kuasa Spatial Ekonomi (Mencandra Kota Malang sebagai sebuah Contoh)

<i>Oleh Muhammad Hayat</i>	91
----------------------------------	----

PEMIMPIN OPINI, GERAKAN SOSIAL, DAN IDENTITAS MASYARAKAT MODERN

Tantangan Pemimpin Opini dalam Sistem Komunikasi Pedesaan Antara Kesaktian Mbah Maridjan Versus Kedigdayaan Teknologi Komunikasi
Oleh Winda Hardyanti 103

Peta Teoritik Studi Gerakan Sosial (*Social Movements*) Masyarakat Modern.....
Oleh Oman Sukmana 114

Foto Selfie dan Penyakit Sosiopat Masyarakat Modern
Oleh Nurudin..... 129

Menyoal Bentuk dan Peran Identitas Kolektif Dalam Gerakan Sosial
Oleh Rachmad K Dwi Susilo 136

Konstruksi Citra Politik: Kajian dalam Perspektif Komunikasi Politik
Oleh Zen Amirudin 151

BIODATA PENULIS 165



**KEBIJAKAN POLITIK
DALAM KONTEKS LOKAL
DAN INTERNASIONAL**

Kebijakan Politik Presiden SBY Tahun 2009-2014 dalam Pembangunan Perbatasan Indonesia

Oleh Saiman

Pendahuluan

Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis, karena merupakan wilayah suatu negara yang menjadi batas kedaulatan negara dan juga merupakan wilayah yang merefleksikan halaman depan suatu negara. Namun berbagai peristiwa dan permasalahan yang terjadi di perbatasan sangat kompleks mulai dari yang bersifat sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan yang dapat mengancam stabilitas perbatasan, nasionalisme dan kedaulatan NKRI. Salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan perbatasan adalah akibat ketertinggalan pembangunan dengan negara tetangga. Oleh karena itu peran negara sangat dibutuhkan dalam pengelolaan, pembangunan dan menjaga keamanan kawasan perbatasan dalam rangka mempertahankan nasionalisme dan kedaulatan NKRI.

Pada *Grand Design* Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), NKRI memiliki wilayah berbatasan yang sangat luas, sehingga NKRI berbatasan dengan 10 negara. Perbatasan di darat, wilayah NKRI berbatasan dengan wilayah 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan di wilayah laut, Wilayah NKRI berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Australia. Pengelolaan batas-batas wilayah negara dan pengelolaan wilayah perbatasan sangat diperlukan. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara dengan batas-batas yang jelas dan kewenangan untuk pengelolaan wilayah negara serta pengakuan terhadap hak-hak berdaulat NKRI.

Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 25A telah ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri

Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Selanjutnya pada peraturan perundangan lain, UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, menegaskan tentang pengakuan dunia internasional terhadap Konsepsi Negara Kepulauan (*archipelagic state*) yang telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Dengan demikian NKRI memiliki perbatasan dengan 10 negara pada perbatasan darat dan laut, yang sering menimbulkan konflik antar negara adalah dengan Malaysia dan Australia.

Pengalaman sejarah dengan terjadinya kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya menjadi milik Malaysia menunjukkan bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bukanlah hal yang bisa dianggap biasa dan sederhana. Pulau Sipadan dan Ligitan yang secara *de jure* (hukum) adalah jelas milik Indonesia sejak merdeka berdasarkan peninggalan Belanda, namun berdasarkan *de facto* (*effective principal*) akhirnya beralih menjadi milik Malaysia.

Hal ini memberikan arti bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab yang penting bagi negara bersama pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara nyata harus dilakukan oleh negara sebagai bukti perhatian dan kehadiran negara di kawasan perbatasan, jika tidak maka pengalaman sejarah tersebut memungkinkan untuk terulang kembali. Hal ini penting karena wilayah perbatasan saat ini saja masih banyak yang sangat tertinggal pembangunannya dan bahkan masih sangat terisolasi dengan wilayah lain di sekitarnya sehingga untuk menuju wilayah tersebut sangat sulit.

Tulisan ini menjelaskan tentang kebijakan politik Presiden SBY 2009-2014 dalam pembangunan perbatasan, masalah pada kelembagaan yang mempunyai kewenangan dalam pembangunan perbatasan, dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Kebijakan Pemerintahan Presiden SBY Tahun 2009-2014

Peristiwa politik perbatasan lain yang perlu dicermati adalah klaim Malaysia tahun 2005 terhadap Blok Ambalat di Laut Sulawesi sebagai bagian dari wilayah Malaysia dan sempat terjadi manuver militer antara

TNI-AL dengan Tentara Diraja Malaysia dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI. Sengketa kepemilikan Blok Ambalat membuktikan bahwa kejelasan batas laut menjadi amat signifikan. Disahkannya Pulau Simpadan dan Ligitan mengakibatkan klaim baru oleh Malaysia terhadap Blok Ambalat yang disinyalir kaya potensi minyak bumi. Namun Indonesia berposisi sebagai negara kepulauan yang menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 memiliki klaim lebih sah terhadap Blok Ambalat (Ludiro, 2010).

Terakhir pada tahun 2014, Malaysia kembali mengklaim tiga desa yakni Desa Sinapadat, Simantipal dan Sinokod di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan merupakan wilayah Malaysia. Sekitar 20 dari 85 kepala keluarga di Desa Samunti Lumbis memiliki kartu identitas sebagai warga negara Malaysia yang disebut dengan *Mykad* dan pindah ke Malaysia, karena akibat desakan ekonomi keluarga, kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dan minimnya pelayanan kesehatan (Republika, 2014).

Permasalahan perbatasan di laut yang amat signifikan adalah maraknya *illegal fishing* oleh kapal nelayan asing dari Thailand, China dan Philippina di Laut Sulawesi, Laut Banda dan Laut Arafuru. Kerugian negara karena setiap tahunnya mencapai sekitar Rp 13 triliun (Ludiro, 2010). Selain itu, *Illegal logging*, *illegal worker*, *illegal trading*, *illegal trafficking* dan *illegal mining* juga terjadi pada perbatasan di Kalimantan Entoking Kabupaten Sambas dan Kabupaten Nunukan (Awang Faroek, 2010). Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Pulau Sangihe dan Kepulauan Morotai.

Kondisi pembangunan daerah perbatasan yang memprihatinkan terjadi hampir di seluruh perbatasan Indonesia. Meskipun perhatian pemerintah pusat terhadap isu-isu pembangunan perbatasan meningkat. Namun secara faktual pembangunan perbatasan masih menyisakan masalah, sehingga terjadi lalu lintas orang, barang dan sumber daya alam yang merugikan NKRI. Menteri Pertahanan Purnomo mengatakan bahwa selama ini masalah perbatasan selalu muncul dari waktu ke waktu. Perbatasan hanya dianggap sebagai halaman belakang dan mendapatkan perhatian yang minim dari pemerintah. Pengembangan pembangunan cenderung bersifat sektoral dikarenakan kebijakan yang hanya bersifat normatif bukan operasional. Untuk selanjutnya, diharapkan perbatasan harus menjadi serambi depan NKRI dan dalam pengembangan

pembangunan difokuskan pada kesejahteraan masyarakat di perbatasan (Menhan, 2011).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal kepemimpinannya bertekad mengatasi berbagai masalah wilayah perbatasan. Janji Presiden SBY itu, di antaranya disampaikan dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2008 yang menekankan pendekatan aspek ekonomi (kesejahteraan rakyat) dan pendekatan aspek keamanan. Presiden SBY memaparkan bahwa dalam menegakkan kedaulatan negara, kebijakan pertahanan negara kita arahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemampuan TNI. Kemampuan pertahanan negara akan terus ditingkatkan, antara lain dengan pemeliharaan kekuatan pokok minimum, kesiapan alutsista, dan terselenggaranya latihan secara teratur. Latihan gabungan TNI juga dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara.

Selain itu khusus pembangunan wilayah perbatasan, pemerintah juga melakukan pendekatan beberapa aspek, terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas negara, disamping melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan keamanan. Pada aspek kebijakan, arah pembangunan wilayah perbatasan pada pemerintahan Presiden SBY tampaknya sudah tepat, yakni tidak hanya pada pendekatan keamanan namun juga pendekatan ekonomi.

Berbagai peristiwa politik dan permasalahan pembangunan perbatasan di Indonesia menjadi masukan bagi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2009-2014 guna menetapkan kebijakan untuk segera membangun perbatasan. Dengan persetujuan DPR RI, maka Presiden SBY menetapkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara sebagai dasar kebijakan yang konstitusional dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Kebijakan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Pada RPJM Nasional 2010-2014 dinyatakan kebijakan 11 prioritas pembangunan nasional yang diantaranya menjamin pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik (Perpres No.5, 2010). Prioritas pembangunan nasional ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk

melakukan pembangunan di perbatasan agar permasalahan perbatasan segera dapat diselesaikan dan tidak menjadi ancaman bagi NKRI.

Dalam rangka komitmen pemerintah untuk melakukan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan di perbatasan, maka pemerintah menetapkan visi dan misi. Adapun komitmen tersebut sesuai dengan visi terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju, dengan pendekatan secara komprehensif pada tiga dimensi yaitu kesejahteraan, keamanan dan lingkungan (BNPP No.1, 2011). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengamanahkan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan di perbatasan sesuai pasal 14, maka Presiden SBY membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagai lembaga pemerintah dalam menjalankan pengelolaan dan pembangunan di perbatasan.

BNPP sebagai lembaga pemerintah, dikepalai oleh Mendagri mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (Perpres No.12, 2010). Dalam melaksanakan tugas pembangunan perbatasan, BNPP menetapkan *Grand Design* Tahun 2011-2025 (BNPP, No.1:2011). Rencana Induk Tahun 2011-2014 dan Rencana Aksi Tahunan (BNPP, No.2:2011).

Kebijakan Politik Presiden SBY tersebut menunjukkan adanya komitmen (*political will*) yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembangunan perbatasan, terutama masalah pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dermaga, sarana pendidikan, kesehatan dan ketertinggalan (ekonomi) agar tidak terjadi ketimpangan dan ketergantungan pada negara tetangga yang bisa mengancam stabilitas keamanan, nasionalisme dan bahkan kedaulatan NKRI.

Namun kebijakan politik pemerintahan Presiden SBY 2009-2014 dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan mengalami beberapa masalah, sehingga permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan masih saja terjadi. Keterbelakangan, keterisolasian wilayah, kekurangan bahan pokok, ketiadaan listrik, sulitnya pendidikan dan pelayanan kesehatan masih mewarnai wilayah perbatasan di Indonesia.

Masalah pada kebijakan di Indonesia umumnya sangat kompleks karena secara formal kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada sisi lain kebijakan tersebut masih orientasi keamanan dan saling tumpang tindih sehingga kewenangan menjadi tidak jelas. Pada akhirnya yang terjadi adalah muncul ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi tidak jelas dan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan menjadi tidak maksimal.

Selanjutnya dari sisi penataan spasial nasional, kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta kedaulatan NKRI. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan perbatasan tersebut, maka sampai saat ini belum tampak jelas keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di kecamatan yang ditetapkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan atau ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat perbatasan yang memiliki jalan, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang memadai.

Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan yang masih parsial (sektoral), ketiadaan koordinasi yang jelas, perbedaan skala prioritas dan sumber daya manusia, dan penganggaran yang tidak sinkron dari setiap instansi menyebabkan pengelolaan perbatasan menjadi cenderung reaktif dan saling tumpang-tindih (Ganewati, 2009).

Permasalahan lain kebijakan pembangunan perbatasan Indonesia adalah pada distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara teoritis, negara (pemerintah pusat) memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam pembangunan perbatasan. Hal ini karena pemerintah berperan atas nama negara dan sekaligus sebagai aktor pelaksana dalam pembangunan perbatasan. Namun demikian pada sisi lain pemerintah daerah perbatasan juga memiliki kewenangan dalam konteks pembangunan di perbatasan sesuai hak-hak otonomi yang dimiliki pemerintah daerah, akibatnya adalah kebijakan pembangunan perbatasan yang dibuat oleh negara (pemerintah pusat) menjadi dualisme kewenangan. Namun negara (pemerintah pusat) yang pada akhirnya menjadi aktor pelaksanaan pembangunan perbatasan, karena kebijakan dan kekuasaan serta kewenangan secara

hirarkhi berada pada pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kawasan masih bersifat sentralis birokratis. Artinya kebijakan pembangunan perbatasan masih harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. *Grand Design* dan rencana induk yang dibuat oleh BNPP atas nama pemerintah pusat menunjukkan bahwa secara strukturalis kebijakan pembangunan perbatasan berada pada pemerintah pusat.

Pada sisi lain, kebijakan pembangunan perbatasan masih berorientasi pada aspek politik dan keamanan. Pemerintah masih berpandangan bahwa ancaman terbesar pada perbatasan adalah klaim wilayah dan aspek keamanan perbatasan dari tindakan ilegal. Terlebih lagi pada wilayah perbatasan sangat minim aspek keamanan dan keimigrasian, sehingga banyak pintu lintas batas yang tidak resmi. Hal ini dapat kita cermati dengan melihat pada visi BNPP yang menyebutkan terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman sebagai kata pertama disusul kata tertib dan maju. Pada kenyataannya juga menunjukkan bahwa pembangunan perbatasan yang paling utama adalah melakukan penguatan pada pos pengamanan perbatasan. Sebagai contoh di Kalimantan dengan garis perbatasan 2004 km, hanya terdapat 34 pos pengamanan perbatasan sehingga jarak antar pos pengamanan mencapai 59 km, maka aspek keamanan menjadi bagian kebijakan utama pemerintah pusat dalam pembangunan perbatasan untuk mengantisipasi kejahatan *illegal transnasional* yang semakin meningkat. Makna lain menunjukkan terjadi ego sektoral pada pembangunan perbatasan bahwa ada faktor mendesak yang harus segera diatasi.

Kelembagaan Badan Pembangunan Perbatasan

BNPP sebagai lembaga pemerintah, dikepalai oleh Mendagri mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BNPP, No.1: 2011). BNPP terdiri dari tiga Menko, sembilan kementerian, dua menteri negara, dua badan dan 13 Pemerintah Daerah Provinsi. BNPP tidak bersifat *ad hoc* seperti kelembagaan sebelumnya dan dominasi lembaga pemerintah pusat.

Namun demikian dengan kehadiran BNPP sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan masih juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Padahal bila kita mencermati kelembagaan yang menjadi anggota BNPP adalah semua lembaga pemerintah pusat yang secara struktural memiliki kekuasaan yang besar dalam melaksanakan kewenangan dan tugas negara.

Kelembagaan BNPP yang terdiri dari kementerian dan lembaga negara ditambah Gubernur Provinsi perbatasan, sehingga secara struktural kelembagaan BNPP sangat bernuansa pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat membuktikan bahwa pembangunan perbatasan merupakan tanggung jawab negara, sehingga kelembagaan BNPP terdiri dari lembaga-lembaga negara agar masalah perbatasan segera dapat diselesaikan.

Pada sisi lain justru pada kelembagaan BNPP menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat menjadi dominan (sentralis). Terlebih lagi tanggung jawab pembangunan perbatasan ada pada negara dan secara teknis dilaksanakan oleh kementerian terkait yang bertujuan untuk mensukseskan 11 prioritas pembangunan nasional. Struktur kelembagaan BNPP ini tentu sangat bersifat strukturalis, sentralis dan birokratis. Sehingga pemerintah daerah dengan otonomi daerah, tidak memiliki kekuasaan dalam kebijakan dan kelembagaan. Walaupun pemerintah daerah lebih mengetahui tingkat kepentingan masyarakat dan karakteristik pembangunan yang dibutuhkan pada kawasan perbatasan. Hal ini menunjukkan pemerintah pusat masih menjadi sentral dalam proses kebijakan dan kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan perbatasan.

Struktur kelembagaan pemerintahan yang terdesentralisasi diperlukan untuk melembagakan partisipasi warganegara dalam perencanaan pembangunan dan sarana koordinasi dengan pemimpin lokal dan organisasi non pemerintah di daerah. Hal ini seperti pada masa sebelum reformasi yang dilakukan secara sentralis dan bersifat sektoral. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan, sehingga pembangunan perbatasan menjadi terkendala (Iva *dalam* Ludiro, 2010). Walaupun sudah dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di provinsi dan kabupaten. BNPP ditujukan untuk mempercepat pembangunan

perbatasan, bukan untuk memperpanjang birokrasi (Lerrick, 2011). Aspek institusi sangat penting karena berkaitan dengan implementasi bukan sekedar penjabaran keputusan pada prosedur rutin lewat birokrasi, tetapi juga menyangkut konflik (siapa aktor pelaksana), keputusan (siapa yang memutuskan) dan siapa memperoleh apa (obyek sasaran) dari suatu kebijakan. Kelembagaan atau otoritas yang kecil tetapi focus (McAndrews, 1993).

Anggaran Pembangunan Perbatasan

Pembangunan perbatasan sangat memerlukan anggaran yang besar. Namun alokasi anggaran sangat dipengaruhi oleh kelembagaan. Artinya kekuasaan dan jumlah kelembagaan sangat mempengaruhi besar kecilnya anggaran yang akan dialokasikan oleh pemerintah. BNPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian, sehingga BNPP bukan merupakan lembaga teknis pemerintah sehingga kekuasaan pengguna anggaran terbatas. Oleh karena itu BNPP hanya bersifat mengkoordinasikan rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan melalui program pembangunan oleh masing-masing kementerian. Akibatnya anggaran pembangunan perbatasan terpecah pada masing-masing kementerian sebagai pelaksana teknis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, bahwa negara mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan perbatasan. Sumber pendanaan pembangunan perbatasan menjadi tanggung jawab negara. Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 20 ayat (2) disebutkan pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan kawasan perbatasan dibebankan kepada anggaran belanja kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kebijakan Pemerintah ini sangat jelas, namun permasalahannya adalah jumlah anggaran untuk pembangunan perbatasan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat masih sangat terbatas. Selain itu anggaran pembangunan perbatasan terpecah pada tiap kementerian, akibatnya pelaksanaan pembangunan perbatasan menjadi tidak maksimal, karena anggaran menjadi tidak fokus. Bila anggaran pembangunan perbatasan dibebankan kepada pemerintah daerah, tentu sangat memberatkan, karena sumber pendanaan pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat melalui DAU maupun DAK.

Alokasi anggaran dari pemerintah untuk pembangunan perbatasan mencapai triliunan, Namun anggaran pemerintah tersebut masih sangat kurang mengingat daerah perbatasan di Indonesia sangat wilayah yang luas meliputi 13 provinsi 41 kabupaten dan 187 kecamatan. Pada tahun 2011 anggaran pembangunan perbatasan sebesar Rp. 2,2 Triliun, tahun 2012 mencapai Rp. 3,9 Triliun dan pada tahun 2013 mencapai Rp.7,2 Triliun. Padahal pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan perbatasan secara umum menuntut dibangunnya infrastruktur jalan, listrik, dermaga, sarana pendidikan dan kesehatan yang baik sebagaimana wilayah lain di Indonesia, ada jalan, ada listrik dan sarana lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah tentang prinsip *money follow function* belum diberlakukan dengan baik, akibatnya pembangunan perbatasan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target waktu tahun 2011-2014.

Tabel. 1

Jumlah Anggaran APBN Tiap Tahun untuk Pembangunan Perbatasan

No	Tahun	Jumlah Dana	Jumlah (K/L)
	APBN Tahun 2011	2,2 Triliun	11
	APBN Tahun 2012	3,9 Triliun	16
	APBN Tahun 2013	7,2 Triliun	24
	APBN Tahun 2014	16,2 Triliun	26*
	APBN Tahun 2015	13,9 Triliun	

Sumber: Peraturan BNPP No. 4 Tahun 2014. *Anggaran untuk 13 Provinsi,

Pada tahun 2014 anggaran pembangunan perbatasan ada peningkatan yang sangat besar mencapai Rp. 16,2 Triliun. Namun kenaikan dana tersebut terjadi pada “tahun politik” sehingga penyerapan dana tidak efektif karena pemerintah pusat konsentrasi pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif pada bulan 9 April dan pemilihan umum presiden pada bulan 9 Juli yang akhirnya partai yang berkuasa tidak mampu mempertahankan posisinya di parlemen (DPR), sehingga pembangunan perbatasan tidak maksimal. Bahkan anggaran tersebut mengindikasikan adanya pencitraan dari pemerintahan yang sedang berkuasa, karena anggaran meningkat tetapi masalah perbatasan belum terselesaikan, dan tahun 2015 anggaran perbatasan kembali turun hanya sebesar Rp. 13,9 Triliun.

Jenderal TNI Moeldoko (2014) menyimpulkan bahwa ada

kesenjangan, disharmonisasi, ketidakkonsistenan serta ketidaktepatan dalam kebijakan pengelolaan perbatasan. Akibatnya, sistem keorganisasian dan program tidak optimal dalam pembangunan perbatasan. Apabila tidak dilakukan perubahan, pengelolaan kawasan perbatasan akan masuk pada Skenario Merah Putih Setengah Tiang (level 3) atau Merah Putih Turun Tiang (level 4). Untuk itu, perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan dan penguatan kelembagaan sangat dibutuhkan. Perbatasan sulit untuk dibayangkan, tapi hanya dapat digambarkan dengan dua kata yaitu “jauh dan sepi”.

Daftar Pustaka

- Ganewati Wuryandari, dkk, 2009, *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste : Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Iva Rachmawati, “Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI”, *dalam* Ludiro Madu, dkk, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Lerrick, Mencari Masukan Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pakar, Jakarta, 25 Januari 2011 Tahun Sidang 2010-2011.
- MacAndrews, Colin dan Ishlasul Amal, 1993, *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*, ed.1. Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Madu, Ludiro dkk, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Miliband, Ralph, 1969, *The State in Capitalist Society*, Basic Book Inc. New York.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional

Pengelolaan Perbatasan.

Berita Negara RI Nomor 44 Tahun 2011, Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025

Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2010-2014.

Peraturan BNPP Tentang Rencana Aksi BNPP Tahun 2013 dan 2014.

Desa Diklaim, RI Tempuh Jalur Hukum, Republika, 15 November 2014.

Diplomasi Perbatasan dan Pembangunan Wilayah Terluar Indonesia, Jurnal Diplomasi, Volume, 2 No.4, Desember 2010, PUSDIKLAT Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta

Kaltara, *Asa Sejajarkan Diri Dengan Malaysia*, dalam <http://www.antarakaltim.com/print/11055/kaltara-asa-sejajarkan-diri-dengan-malaysia> diakses 13 April 2013.

***Chessboard Politics* dalam Kompleksitas Rezim Negara-Negara Pecahan Uni Soviet**

Oleh Hafid Adim Pradana

Pendahuluan

Perang dingin yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade berakhir pada awal 1990-an. Akhir dari perang ideologi yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet tersebut ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin, dan segera diikuti oleh bubarnya Uni Soviet (Mannsbaach & K. Rafferty, 2012:232). Bagi AS, berakhirnya Perang Dingin menandai kemenangan ide-ide liberal yang selama ini mereka usung. Adapun bagi Uni Soviet, berakhirnya perang yang telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II tersebut menandai akhir dari imperium besar di Eropa Timur yang mengupayakan penyebaran ideologi komunis ke seluruh dunia. Akhir Perang Dingin sekaligus menjadi momentum lahirnya negara-negara baru yang sebelumnya tergabung dalam federasi Uni Soviet.

Sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1990, tercatat 15 negara baru telah muncul sebagai akibat dari bubarnya negara yang sempat menjadi super power selama lebih dari tiga dekade tersebut (Kort, 2008 : 228-229). Negara-negara baru tersebut diantaranya ialah: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Pada perkembangannya kelima belas negara yang disebutkan diatas berjalan secara sendiri-sendiri, dengan wilayah dan sistem pemerintahan yang ada. Meskipun demikian, independensi negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut tidak membuat mereka lupa akan adanya kesatuan diantara mereka pernah mereka jalani pada masa lalu. Artinya, di tengah upaya menjalankan pemerintahannya secara mandiri, negara-negara baru hasil keruntuhan Uni Soviet masih sempat mengadakan kerjasama antara satu dengan yang lain.

Kerjasama antara negara-negara pecahan Uni Soviet, tentu saja merupakan fenomena yang cukup menarik, mengingat keberadaan kerjasama tersebut seolah menunjukkan adanya keinginan untuk kembali menyatukan diri. Berbeda dengan kerjasama regional negara-negara di wilayah lain yang mencakup semua negara dalam satu kawasan, kerjasama regional antar negara pecahan Uni Soviet terpecah ke dalam beberapa rezim. Dengan kata lain, tidak ada satu institusi tunggal yang didalamnya mencakup keseluruhan negara pecahan Uni Soviet.

Meskipun demikian, kerjasama diantara negara-negara eks Soviet masih tetap ada, hanya saja kerjasama tersebut terwujud dalam berbagai rezim yang saling tumpang tindih. Berdasarkan fakta tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul ialah mengapa negara-negara pecahan Uni Soviet bersedia untuk membentuk dan menggabungkan diri pada berbagai rezim yang memungkinkan mereka hidup dalam rezim-rezim yang saling tumpang tindih?

Kompleksitas Rezim Internasional: Telaah Teoritis

Secara umum banyak para teoritis Hubungan Internasional yang telah melakukan penelitian terhadap kompleksitas rezim internasional. Pemaparan mengenai kompleksitas rezim internasional yang paling terkemuka ialah pemaparan tentang saling tumpang tindih rezim yang diibaratkan seperti spaghetti yang berada dalam suatu mangkuk. Gambaran “Spaghetti Bowl” ini menjadi suatu gambaran umum yang menunjukkan fenomena kompleksitas rezim internasional yang didalamnya melibatkan negara-negara. Fenomena mangkuk spaghetti ini juga dapat dilihat dari saling tumpang tindihnya rezim-rezim yang diikuti oleh negara-negara pecahan Uni Soviet, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Menurut Karen Alter dan Joseph Meunier ada beberapa alasan yang mendasari negara-negara memilih untuk berada pada kondisi rezim yang saling tumpang tindih dan penuh kompleksitas. Secara umum Alter dan Meunier menyebutkan bahwa kesediaan negara berada dalam kompleksitas rezim internasional ialah untuk mendapatkan keuntungan guna memuluskan kepentingan nasionalnya. Selanjutnya Alter dan Meunier memberika lima alasan mengapa negara bersedia untuk hidup dalam kompleksitas rezim internasional (Alter and Meunier, 2003:8-9).

Menurut Alter dan Meuer, salah satu alasan negara memilih untuk berada pada rezim-rezim yang saling tumpang tindih dikarenakan oleh

adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan memakai strategi *chessboard politics* atau “politik papan catur”. Alter dan Meuer memaparkan tiga strategi “politik papan catur” yang dipakai oleh negara-negara dalam memanfaatkan kompleksitas rezim internasional. Strategi pertama ialah *forum shopping strategy*. Dalam *forum shopping strategy*, negara-negara berupaya eksis dalam berbagai rezim guna mendapatkan dukungan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sebagai contoh, AS mempromosikan agenda perang melawan terorisme di dalam berbagai rezim yang diikutinya seperti PBB, NATO, hingga APEC.

Adapun strategi kedua ialah *inconsistency strategy*. Dalam strategi ini negara-negara membentuk rezim yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang memiliki presisi yang rendah, sehingga memungkinkan negara-negara untuk melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kepentingan nasional mereka. Negara-negara membuat rezim yang aturan-aturan didalamnya tidak mengikat dan mempunyai sanksi tegas, sehingga hal tersebut memungkinkan mereka untuk melanggar atau tidak bersedia meratifikasi rezim yang dibuatnya itu jika bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Sebagai contoh, ketidakjelasan bahasan mengenai sanksi dalam protokol Kyoto membuat AS dapat dengan mudah untuk memutuskan tidak meratifikasi protokol tersebut karena ketiadaan sanksi yang bisa diterima oleh negara-negara yang tidak bersedia meratifikasi protokol tersebut.

Strategi ketiga ialah *regime shifting strategy*. Dalam *regime shifting strategy*, negara-negara melakukan perpindahan atau membentuk rezim baru guna mencapai kepentingan nasionalnya. Berbeda dengan *forum shopping strategy*, *regime shifting strategy* tidak berupaya mencari dukungan di banyak rezim, melainkan dalam strategi ini negara berpindah menuju rezim yang lain atau membentuk rezim baru guna mencapai kepentingan nasionalnya. Sebagai contoh, ketika UNHCR mengharuskan negara-negara Eropa menampung pengungsi yang datang dari Afrika Utara, mereka berupaya membentuk rezim baru seperti IMO (*International Migration Organization*) dan IDP (*Internal Displace Placement*) guna menghindari ketentuan yang ada dalam UNHCR.

Bagi negara-negara Eropa, datangnya pengungsi dari Afrika Utara yang jumlahnya semakin banyak dari tahun ke tahun merupakan sesuatu hal yang menjadi persoalan karena adanya pengeluaran negara yang mesti dialokasikan terhadap para pengungsi tersebut. Hal itu belum ditambah

dengan efek sosial, ekonomi, dan efek-efek lainnya sebagai akibat dari meningkatnya jumlah pengungsi dari Afrika Utara yang datang tiap tahun. Oleh karena itu negara-negara Eropa berupaya menghindari ketentuan UNHCR dengan memakai *regime shifting strategy*.

Rezim Internasional yang Diikuti oleh Negara-Negara Pecahan Uni Soviet

Pemaparan berbagai rezim negara-negara pecahan Uni Soviet sangat penting, karena pada akhirnya akan menunjukkan adanya kompleksitas rezim-rezim yang didalamnya terdapat negara-negara pecahan Uni Soviet sebagai anggotanya. Berikut ini merupakan rezim-rezim yang didalamnya terdiri dari negara-negara pecahan Uni Soviet.

- ***Commonwealth of Independent States (CIS)***

Commonwealth of Independent States (CIS) merupakan organisasi regional yang didalamnya beranggotakan negara-negara pecahan Uni Soviet. Organisasi ini terbentuk pada 8 Desember 1991. Pendirian organisasi ini dilakukan oleh Belarusia, Rusia, dan Ukraina (Fachruroddi, 2005:227). Pada perkembangannya organisasi ini mengalami penambahan jumlah keanggotaan setelah bergabungnya Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan pada 21 Desember 1991. Pada 3 Desember 1993, Georgia bergabung dengan CIS, meskipun pada akhirnya mengundurkan diri pada 18 Agustus 2008. Hingga saat ini, keanggotaan CIS secara total berjumlah 11 negara, yang keseluruhannya merupakan negara-negara pecahan Uni Soviet (CISSTAT, 2012)

Sebagai sebuah organisasi regional, CIS merupakan sebuah asosiasi negara yang sama sekali tidak sebanding dengan federasi, konfederasi atau serikat supranasional seperti Uni Eropa. CIS sendiri lebih tepat disebut sebagai organisasi selevel dengan persemakmuran (*Commonwealth*). Meskipun CIS memiliki beberapa kekuatan supranasional, Organisasi ini hanya berfungsi sebagai sebuah simbol nostalgia negara-negara pecahan Uni Soviet. Meskipun demikian, anggota-anggota yang tergabung dalam organisasi ini senantiasa melakukan koordinasi di bidang perdagangan, keuangan, pembuatan hukum, dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama pencegahan kejahatan lintas batas.

- ***Collective Security Treaty Organization (CSTO)***

CSTO merupakan sebuah aliansi militer antar pemerintah negara-negara yang ditandatangani pada 15 Mei 1992 oleh Armenia,

Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia dan Tajikistan. Pada tahun 1994 Azerbaijan, Georgia, dan Uzbekistan bergabung dengan CSTO, meskipun akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1999 (Azerbaijan dan Georgia), dan 2012 (Uzbekistan). Pada tanggal 7 Oktober 2002 masing-masing kepala negara dari Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia dan Tajikistan menandatangani Piagam Taskhent.

Penandatanganan Piagam Taskhent ini sekaligus mempertegas keberadaan CSTO sebagai aliansi militer antara negara-negara pecahan Uni Soviet. Hingga saat ini keanggotaan CSTO secara total berjumlah 6 negara. Penandatanganan Piagam Taskhent juga menegaskan kembali keinginan semua negara yang berpartisipasi untuk menjauhkan diri dari penggunaan atau ancaman kekerasan. Penandatanganan Piagam Taskhent juga membuat negara-negara anggota CSTO tidak dapat bergabung dengan aliansi militer negara-negara lain, seperti NATO (ODKBB, 2015)

- ***GUAM Organization for Democracy and Economic Development***

GUAM (Georgia-Ukraine-Azerbaijan-Moldova) merupakan organisasi regional yang didirikan oleh Georgia, Ukraina, Azerbaijan, dan Moldova. Organisasi ini terbentuk pada tahun 2001 melalui penandatanganan Piagam GUAM yang ditandatangani pada KTT di Yalta pada tanggal 6 Juni dengan tanggal 7 Juni 2001 oleh Georgia, Ukraina, Azerbaijan, Moldova dan Uzbekistan, yang kemudian mengundurkan diri. Piagam GUAM sendiri didalamnya berisi berbagai ketentuan seperti tujuan-tujuan untuk saling bekerjasama, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, menjamin kestabilan pembangunan, meningkatkan keamanan internasional dan regional, serta meningkatkan upaya untuk masuk ke dalam Uni Eropa (GUAM, tanpa tahun).

Sebagai organisasi yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan mempromosikan demokrasi, GUAM dipandang sebagai organisasi yang berupaya melawan hegemoni Rusia yang sering disebut sebagai pewaris utama Uni Soviet. Kuatnya hegemoni Rusia atas negara-negara pecahan Uni Soviet terlihat dari peran besar negara yang beribukota di Moskow tersebut dalam memimpin CIS dan CSTO.

- ***Community of Democratic Choice (CDC)***

Community of Democratic Choice (CDC) adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan di Kiev pada tanggal 2 Desember 2005 oleh sembilan negara Eropa Utara dan Timur. Hingga saat ini CDC masih beranggotakan sembilan negara yang meliputi Ukraina, Georgia,

Moldova, Lithuania, Estonia, Latvia, Slovenia, Rumania, dan Makedonia. Organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi yang didalamnya terdiri dari negara-negara pecahan Uni Soviet yang berada di kawasan Baltik (Lithuania, Estonia, dan Latvia), dan tiga negara anggota GUAM (Georgia, Ukraina, Moldova), serta tiga negara selain negara-negara pecahan Uni Soviet (Rumania, Slovenia, Makedonia). Sebagaimana GUAM, keberadaan CDC ini dipandang memiliki niat untuk melawan pengaruh Rusia di kawasan Eropa Timur.

- ***North Atlantic Treaty Organization (NATO)***

North Atlantic Treaty Organization (NATO) adalah sebuah aliansi militer antar pemerintah yang didasarkan atas Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang ditandatangani pada 1949. Organisasi ini merupakan suatu sistem pertahanan kolektif, dimana negara-negara anggotanya menyetujui adanya pertahanan bersama dalam menanggapi serangan oleh pihak eksternal.

Seiring berjalannya waktu, keanggotaan NATO terus mengalami perkembangan. Sejak berakhirnya Perang Dingin NATO telah menambahkan 12 anggota baru, termasuk didalamnya negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Hingga saat ini, anggota NATO secara total berjumlah 28 negara. Negara pecahan Uni Soviet yang masuk menjadi anggota NATO ialah Latvia, Lithuania, dan Estonia. Ketiga negara tersebut masuk pada tahun 2004. Bergabungnya tiga negara tersebut dalam NATO seakan mempertegas posisi mereka di hadapan negara-negara pecahan Uni Soviet lain, terutama Rusia dan negara-negara yang tergabung dalam CIS. (Jackson & Sorensen, 2005 : 120-122).

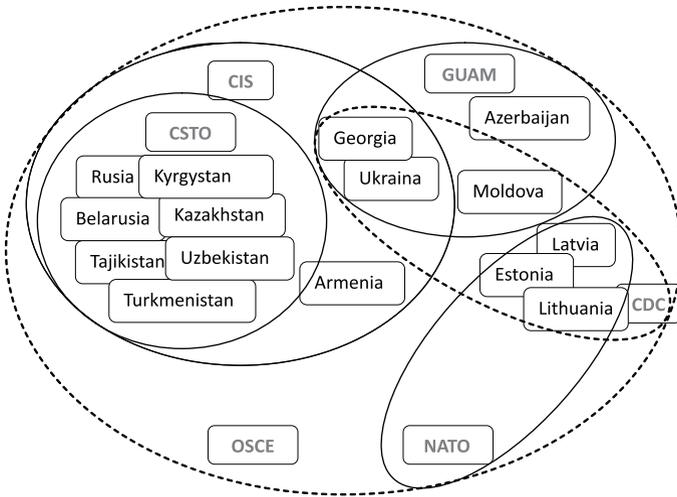
- ***Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)***

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) merupakan organisasi antar pemerintah terbesar di dunia yang berorientasi pada masalah keamanan. Keamanan yang menjadi orientasi pada organisasi ini bukan hanya keamanan tradisional yang berkaitan dengan perang, tetapi juga isi keamanan baru seperti lingkungan hidup, terorisme, pengawasan terhadap perbatasan, gender, HAM, kebebasan media, hingga hak bagi kaum minoritas. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1973, ketika diadakannya konferensi tentang keamanan dan kerjasama di Eropa.

Salah satu aspek unik dari OSCE adalah status negara-negara anggota yang tidak terikat oleh piagam konstitutif. Dalam perjalanannya OSCE

tidak pernah menelurkan suatu perjanjian formal yang mesti diratifikasi oleh badan legislatif nasional masing-masing anggotanya. Meskipun demikian, perjanjian final yang disepakati dalam OSCE merupakan suatu komitmen politik dari negara-negara anggotanya untuk membangun keamanan dan kerjasama di Eropa.

Keseluruhan rezim diatas merupakan rezim-rezim yang diikuti oleh negara-negara pecahan Uni Soviet. Selain rezim-rezim yang disebutkan diatas, masih banyak rezim-rezim lain yang diikuti oleh negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut. Dari berbagai rezim yang telah dipaparkan diatas, terdapat hal yang menarik, dimana tidak ada satu rezim pun yang keseluruhan anggotanya hanya berisikan negara-negara pecahan Uni Soviet. Rezim yang didalamnya mencakup semua negara Uni Soviet justru rezim memiliki skala keanggotaan lebih luas, yakni OSCE yang mencakup negara-negara Eropa, Amerika (AS dan Kanada), hingga Asia (Mongolia). Benang merah yang dapat ditarik dari keberadaan rezim-rezim diatas ialah bahwa negara-negara pecahan Uni Soviet berada dalam banyak rezim yang saling tumpang tindih satu sama lain.



Gambar 1: Rezim-rezim yang diikuti oleh negara-negara pecahan Uni Soviet

Gambar diatas menunjukkan bahwa negara-negara pecahan Uni Soviet ternyata berada pada rezim-rezim yang saling tumpang tindih. Hal ini tentu saja menjadi suatu fenomena yang menarik mengingat negara-negara bekas pecahan Uni Soviet tersebut merupakan negara-negara yang relatif masih baru. Pembahasan pada bagian selanjutnya akan menjelaskan

mengenai kompleksitas rezim internasional sebagai landasan konseptual dalam tulisan ini, yang diikuti dengan analisis motif negara-negara pecahan Uni Soviet dalam membentuk atau menggabungkan diri pada berbagai rezim yang saling tumpang tindih.

Motif Negara-Negara Pecahan Uni Soviet Bergabung dalam Banyak Rezim

Kesediaan negara-negara hidup dalam rezim yang saling tumpang tindih disebabkan oleh adanya peluang besar memperoleh keuntungan guna memuluskan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, kesediaan negara-negara pecahan Uni Soviet dalam membentuk dan menggabungkan diri pada berbagai rezim yang memungkinkan mereka hidup dalam rezim-rezim yang saling tumpang tindih disebabkan oleh adanya motif pencapaian keuntungan guna memuluskan kepentingan nasional mereka.

Dengan mengikuti banyak rezim, negara-negara pecahan Uni Soviet dapat memainkan *chessboard politic* dengan memakai strategi *regime shifting strategy* dan *forum shopping strategy* guna mencapai kepentingan nasional mereka. Untuk memperkuat tesis dasar tulisan ini, maka dibawah ini akan dipaparkan satu contoh kasus, yaitu “kesediaan” Georgia dan Rusia untuk berada dalam rezim yang saling tumpang tindih, yang menunjukkan adanya pemakaian strategi-strategi yang dipakai oleh mereka dalam memanfaatkan rezim-rezim yang mereka ikuti guna mencapai kepentingan nasionalnya.

“Kesediaan” Georgia untuk terlibat dalam kompleksitas rezim internasional tampak dari keterlibatan negara tersebut dalam beberapa rezim, yaitu GUAM dan CDC. Dengan bergabung dalam GUAM dan CDC, Georgia memiliki motif untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat, sebagai upaya negara tersebut masuk ke dalam NATO. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, baik GUAM maupun CDC merupakan rezim yang memiliki kesamaan dalam hal komitmen untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Penyebaran nilai demokrasi yang menjadi tujuan kedua rezim tersebut merupakan suatu bentuk langsung dukungan rezim-rezim tersebut terhadap negara-negara Barat. Sebagai negara yang berada pada kedua rezim tersebut, Georgia tentu saja memanfaatkannya sebagai sarana untuk memperoleh dukungan negara-negara Barat agar dapat bergabung ke dalam NATO. Meskipun

keikutsertaan Georgia dalam CDC dan GUAM belum membuat mereka terpilih sebagai anggota NATO, akan tetapi dukungan dari negara-negara Barat, khususnya AS telah mereka dapatkan sebagai konsekuensi dari komitmen negara yang beribukota di Tbilisi tersebut dalam mendukung penyebaran nilai-nilai demokrasi.

Salah satu dukungan Barat yang didapatkan oleh Georgia ialah dukungan AS dalam perang Ossetia Selatan pada 2008. Perang Ossetia Selatan sendiri merupakan perang melibatkan gerakan separatis Ossetia selatan dan Abzakhia dengan pemerintah Georgia. Pada perkembangannya kelompok separatis Ossetia Selatan dan Abzakhia mendapatkan dukungan dari Rusia. Hal tersebut tentu saja membuat Georgia berada dalam posisi terdesak. Di tengah derasnya tekanan dari pihak musuh, AS secara tiba-tiba memberikan reaksi berupa bantuan terhadap Georgia. Perang pada tahun 2008 tersebut akhirnya dimenangi oleh kelompok separatis Ossetia Selatan, yang berujung pada pengakuan Rusia terhadap negara baru tersebut. (RT, tanpa tahun)

Meskipun demikian, hingga saat ini hanya Rusia yang mengakui kemerdekaan dari Ossetia Selatan. Negara-negara lain seperti negara-negara Eropa Barat dan AS hingga saat ini masih tidak mengakui keberadaan negara baru tersebut. Mereka tetap memilih untuk mendukung Georgia dalam upaya negara tersebut memerangi gerakan separatisme. Dukungan negara-negara Barat terhadap Georgia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari keberadaan GUAM dan CDC. Melalui rezim-rezim tersebut, Georgia melakukan *forum shopping strategy* dengan berupaya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Melalui komitmen tersebut Georgia memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat dan mempermudah langkah mereka untuk masuk sebagai anggota NATO.

Adapun “kesediaan” Rusia untuk terlibat dalam kompleksitas rezim internasional tampak dari keikutsertaan negara tersebut dalam CIS, CSTO maupun OSCE. Dalam CIS dan CSTO, Rusia menggunakan keberadaan rezim-rezim tersebut untuk memperkuat hegemoninya di negara-negara bekas Uni Soviet. Sedangkan dalam OSCE, Rusia memanfaatkan rezim tersebut dalam upayanya untuk menyelesaikan persoalan keamanan baru seperti terorisme, pembajakan dan perompakan, penyelundupan narkoba serta perluasan senjata pemusnah massal. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, OSCE sendiri merupakan organisasi antar pemerintah

terbesar di dunia yang berorientasi pada masalah keamanan. Keamanan yang menjadi orientasi pada organisasi ini bukan hanya keamanan tradisional yang berkaitan dengan perang, tetapi juga isi keamanan baru seperti lingkungan hidup, terorisme, pengawasan terhadap perbatasan, gender, HAM, kebebasan media, hingga hak bagi kaum minoritas. Pemanfaatan OSCE oleh Rusia ini dapat dilihat dari adanya dialog negara tersebut dengan AS dalam mengatasi persoalan terorisme (Washington Post, 2013)

Keberadaan OSCE membuat upaya dialog antara kedua negara tersebut mudah untuk terealisasi, mengingat OSCE merupakan salah satu rezim selain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sama-sama diikuti oleh kedua negara tersebut. Selain itu, adanya komitmen politik negara-negara dalam OSCE juga memudahkan Rusia dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan baru yang melanda negaranya. Keuntungan yang didapatkan Rusia dari OSCE semakin diperkuat dengan adanya perjanjian antara NATO dengan Rusia. Perjanjian tersebut merupakan wujud dari kerjasama antara NATO dengan Rusia untuk sistem pertahanan rudal di Eropa Timur dalam mengatasi ancaman terorisme, narkoba, dan penyelundupan senjata ilegal (Head of State Government North Atlantic Alliance, 2010)

Hal ini tentu tidak lazim mengingat NATO dan Rusia selama ini senantiasa berada pada hubungan yang kurang harmonis. Apalagi perjanjian tersebut mempunyai tujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti terorisme, narkoba, dan penyelundupan senjata ilegal. Keberadaan OSCE secara tidak langsung bisa dikatakan menjadi semacam sarana terealisasinya perjanjian antara Rusia dan juga NATO. Hal tersebut menguntungkan Rusia, mengingat persoalan keamanan baru seperti terorisme maupun narkoba yang ada di Rusia kini tidak lagi dihadapi secara sendiri. Keberadaan OSCE memudahkan Rusia dalam mengatasi persoalan keamanan baru yang melanda negaranya.

Rusia memakai *regime shifting strategy* dengan memanfaatkan OSCE guna memuluskan upayanya untuk mengatasi persoalan keamanan baru yang melanda negaranya. Pilihan Rusia dalam memakai OSCE ini sangat tepat, mengingat rezim-rezim lain seperti CIS dan CSTO hanya berisikan negara-negara baru pecahan Uni Soviet yang memiliki kapabilitas tentunya sangat lemah. Hal ini berbeda dengan OSCE yang didalamnya berisi negara-negara Barat yang memiliki kapabilitas jauh lebih besar

dibandingkan negara-negara baru pecahan Uni Soviet.

Dari kedua kasus diatas dapat dilihat bahwa pembentukan dan penggabungan diri negara-negara pecahan Uni Soviet pada rezim-rezim yang saling tumpang tindih dilandasi oleh adanya kemudahan akses yang memungkinkan negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan melalui *regime shifting strategy* dan *forum shopping strategy*. Baik Georgia maupun Rusia, sebagai negara pecahan Uni Soviet sama-sama memanfaatkan rezim-rezim yang mereka ikuti sebagai sarana untuk memudahkan pencapaian kepentingan nasional mereka.

Hanya saja dalam upayanya tersebut, Rusia dan Georgia memakai strategi yang berbeda. Georgia memakai *forum shopping strategy* dengan berupaya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi agar mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat dan mempermudah langkah mereka untuk masuk sebagai anggota NATO. Sedangkan Rusia memakai *regime shifting strategy* dengan memanfaatkan OSCE guna memuluskan upayanya untuk mengatasi persoalan keamanan baru yang melanda negaranya.

Kesimpulan

Keputusan negara-negara pecahan Uni Soviet dalam membentuk dan menggabungkan diri pada berbagai rezim yang kompleks disebabkan oleh adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan guna memuluskan kepentingan nasionalnya. Dengan mengikuti banyak rezim, negara-negara pecahan Uni Soviet dapat memainkan politik papan catur dengan memakai strategi *regime shifting strategy* dan *forum shopping strategy* guna mencapai kepentingan nasional mereka. Dengan memakai metode *single case study*, penelitian ini mengambil Georgia dan Rusia sebagai contoh pemanfaatan kompleksitas rezim yang dipakai oleh negara-negara pecahan Uni Soviet untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam contoh kasus diatas, baik Georgia maupun Rusia sama-sama memanfaatkan rezim-rezim yang mereka ikuti sebagai sarana untuk memudahkan pencapaian kepentingan nasional mereka. Hanya saja dalam upayanya tersebut, Rusia dan Georgia memakai strategi yang berbeda. Georgia memakai *forum shopping strategy* untuk mendapatkan dukungan negara-negara Barat dalam upayanya bergabung dengan NATO. Sedangkan Rusia memakai *regime shifting strategy* guna memuluskan kepentingannya untuk menjaga keamanan nasionalnya.

Daftar Pustaka

- Alter, K.J. and Meunier, J., *The Politics of International Regime Complexity*, Journal. Buffet Center, Working Paper No. 07-003, June 2003.
- CISSTAT. 2014. *About Commonwealth of Independet States*. dalam www.cisstat.com/eng/cis.htm .Diakses 7 Desember 2015
- Fachruroddji, A., *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, Yayasan Obor, Zakarta, 2005, hlm. 227.
- Gerring, J., *Case Study Research: Principles and Practices*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm. 19-20.
- GUAM. tanpa tahun. dalam guam-organization.org/en. Diakses 7 Desember 2015
- Head of State dan Government North Atlantic Alliance. Tanpa tahun. *Lisbon Submit Declaration*. dalam http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm?mode=pressrelease. Diakses 9 Desember 2015
- Kort, M., *A Brief History of Russia*, Facts on File Inc., New York, 2008, hlm. 228-229.
- Lally, Kathy.2013.dalam http://articles.washingtonpost.com/2013-07-02/world/40323375_1_intercountry-adoptions-russia-resolution. Diakses pada 8 Desember 2015
- Mannsbach, R., & Rafferty, K., *Pengantar Politik Global*, Terj. Amat Asnawi, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm. 232.
- ODKB. Tanpa tahun. dalam www.odkb.gov.ru/start/index_aengl.htm. Diakses 7 Desember 2015
- R. Jackson & G.Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Terj. Dadan Suryadiputra, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 120-122.
- RT. Tanpa tahun. dalam <http://rt.com/tags/ossetian-war/>. Diakses 9 Desember 2015

Peran Ide dalam Perubahan Kebijakan

Oleh Dyah Estu Kurniawati

Pengantar

Pada awalnya, perubahan kebijakan sering dipahami sebagai wujud dari rasionalitas elit (*state-centric*) maupun sebagai tuntutan publik domestik (*society-centric*) yang sarat dengan kepentingan tertentu. Namun dengan perubahan struktur kekuasaan di era globalisasi yang bersifat transnasional, proses perubahan kebijakan negara sangatlah sulit jika hanya dipahami sebagai aktivitas politik domestik saja, tanpa memperhitungkan faktor transnasionalisasi ide dari para aktor di luar teritori karena terdapat banyak kemiripan waktu dan karakter kebijakan di banyak negara. Fenomena inilah yang menjustifikasi pentingnya pembahasan tentang keterkaitan pengaruh internasional dan domestik dalam proses perubahan kebijakan.

Ide dan Perubahan Kebijakan

Sejak akhir tahun 1980-an, telah banyak muncul literatur yang membahas tentang peran penting ide dalam perubahan kebijakan. Sebelumnya, pembahasan tentang ide, norma, dan konstruksi sosial dalam ilmu politik bersifat marginal. Ide berperan penting sebab ia menunjukkan kepada para pelaku (di arena publik) ... tujuan mereka yang semestinya, mengapa tujuan ini lebih penting daripada tujuannya lainnya, bagaimana ia dicapai, serta siapa yang menjadi kawan dan lawan dalam proses pencapaiannya (Adler, 1986). Para pelaku kebijakan di arena publik menghadapi banyak pilihan dan memiliki dampak yang bervariasi, atau *multiple equilibria*, keseimbangan yang beragam (Goldstein & Keohane, 1993). Hubungan antara pelaku dan pilihan-pilihan kebijakan senantiasa diliputi oleh ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit bagi para pelaku kebijakan untuk memahami apa kepentingan mereka, atau bila memahaminya, tidak mudah mengetahui kebijakan macam apa

yang harus diambil agar kepentingan bisa tercapai. Disinilah muncul pentingnya peran ide. Ide membantu para pelaku mendefinisikan kepentingan mereka dan menghubungkannya dengan berbagai sarana untuk mencapainya.

Dalam sejarah perubahan kebijakan yang fundamental di Eropa dan Amerika pentingnya peran ide ini dapat dilihat, misalnya pada dampak Keynesianisme dalam mempengaruhi arah kebijakan serta menciptakan dasar politik baru sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Keynesianisme, karena posisinya sebagai ide yang paling meyakinkan dalam menjawab ketidakpastian ekonomi dan politik di era *Great Depression*, melahirkan semacam konsensus di antara dua kelompok yang saat itu sedang bersaing ketat, yaitu antara kelompok liberalisme dan pendukung ekonomi terpusat (Hirschman, 1986). Oleh karena itu meluasnya Keynesianisme pada masa itu menunjukkan bahwa ide bukanlah semata-mata refleksi dari berbagai kekuasaan juga bukan pula sekedar alat pembenaran dari berbagai kepentingan ekonomi tertentu. Ide dapat menentukan *road map* kebijakan dan mempengaruhi perilaku pengambil kebijakan (Ikenberry, 1992).

Penelitian Sikkink (1991) tentang penyebaran *developmentalism* sebagai strategi kebijakan pembangunan di negara berkembang, melalui kasus Brazil dan Argentina juga menjelaskan bahwa faktor paling penting dalam perubahan kebijakan adalah persepsi dan keyakinan para penyusun kebijakan atas kebenaran ide pembangunan. Jika berbagai prasyarat struktural sudah terpenuhi, kunci perbedaan arah kebijakan terletak pada ide dan cara ide itu disampaikan dan dirumuskan oleh para pengambil kebijakan.

Rizal Mallarangeng juga mengedepankan peran ide (disebutnya sebagai gagasan) dalam proses liberalisasi ekonomi di era Orde Baru tahun 1986-1992. Liberalisasi dipandang sebagai ide untuk menjauhi paradigma sentralisasi yang dominan tahun 1950-an sampai 1970-an. Untuk menerapkan ide tersebut, para aktor yang disebut epistemis liberal berada dan bertindak dalam konteks kelembagaan tertentu, sehingga lembaga merupakan kerangka yang dapat dipandang sebagai infrastruktur ide, variabel perantara yang memainkan peran penting dalam mewujudkan ide menjadi kebijakan (Mallarangeng, 2002).

Ide dan Aktor

Peran ide dalam proses perubahan kebijakan dapat melalui proses *learning* maupun resolusi konflik (Weatherford & Mayhew, 1995). Menurut Hecllo, pembuatan kebijakan seharusnya dilihat sebagai sebuah proses *learning* yang dilakukan oleh *state officials* dan aktor-aktor sosial lain yang terlibat dalam proses kebijakan. Penjelasan yang berorientasi pada ide merupakan sebuah reaksi terhadap teori-teori yang berorientasi konflik, dimana pemerintah adalah pasif dan proses pembuatan kebijakan dikendalikan oleh kelompok-kelompok penekan. Penjelasan teori-teori yang berorientasi konflik murni, misalnya berbasis pada kepentingan mengabaikan peran ide.

Jika proses *learning* terjadi, peran ide dapat dielaborasi melalui *who learned*, *what was learned*, dan *what type of institutional innovation or policy change* yang akan dihasilkan (Bennet Howlett, 1992). Aktor kebijakan *who learn* bisa meliputi experts, *state officials* (politisi atau birokrat), dan aktor-aktor sosial (seperti kelompok kepentingan atau koalisi). Mereka bisa belajar tentang opsi-opsi yang bervariasi dalam proses pembuatan dan perubahan kebijakan. Diantara banyak model pembuatan kebijakan, model *state-centered*, *coalition centred*, *debate as dialogue*, dan *debate as strategy* melihat peran penting ide dan kepentingan, serta memahami perubahan kebijakan sebagai proses *learning* (Hall, 1989; Weatherford and Mayhew, 1995).

Model *state-centred* memahami perubahan kebijakan sebagai hasil dari pembelajaran dan rasionalitas elit pemerintah sebagai representasi dari negara. Konsep yang termasuk dalam model ini adalah konsep-konsep tentang *government learning* (Etheredge, 1981; Etheredge & Short, 1983), yang menjelaskan tentang *organizational learning* yang mengadaptasi studi tentang perusahaan swasta ke organisasi publik (Lihat juga Lynn 1978; Lindblom & Cohen, 1979)

Model *coalition-centered*, memperluas cakupan “*who-learns*” hingga di luar level pemerintahan untuk mempengaruhi proses kebijakan, dan merubah “*what was learned*” menjadi opsi-opsi pilihan yang bisa digunakan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk *cost and benefit*, tujuan, dll. Komponen-komponen model *coalition-centered* dielaborasi oleh dua kelompok ilmuwan dengan fokus yang berbeda, pertama yang fokus pada *who-learns* melihat para pengambil kebijakan dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan baik di sub sistem kebijakan domestik

maupun sub-sistem kebijakan transnasional. Dalam rangkuman Evans & Davies (1999) banyak istilah yang bisa digunakan untuk menyebut para aktor tersebut, yaitu *policy community*, *epistemic community*, *policy transfer network*, dan *change network*, dimana masing-masing memiliki karakteristik tersendiri (lihat tabel). Selain itu ada beberapa istilah lain yang menyebutkan hal yang sama, seperti *policy network* (Knoke, Pappi, Broadbent & Tsujinaka, 1996), *policy community* (Walker, 1981; Brooks, 1994), sebuah kelompok dalam sebuah sub-sistem, seperti *advocacy coalition* (Sabatier, 1987), *transnational advocacy coalition* (Keck-Sikkink, 1998).

Table 1.6 The Characteristics of Policy Communities, Epistemic communities, Policy Transfer Networks and Change Networks

Dimension	A policy community (Frost; Homeshaw; Atkinson and Coleman)	A policy community (Marsh and Rhodes)	An epistemic community (Alder and Haas)	A policy transfer network (Evans and Davies)	A change network
Membership					
<i>Number of participants</i>	Large number of people and groups who have an interest in a particular policy field and try to influence it	Very limited number, some groups occasionally excluded	Limited, a shared set of causal and principal beliefs (analytic and normative)	Very limited, the system has bias against certain inputs, emphasis on bureaucratic and technocratic culture	Limited, the system has bias against inputs against change; a shared set of causal beliefs to facilitate change for that point in time
<i>Type of interest</i>	Economic and/or professional interests dominate	Economic and/or professional interests dominate	Natural and social scientists or individuals from any discipline or profession with authoritative claims to policy relevant knowledge which reside in both national and international organisations	Agents of policy transfer, affected politicians and bureaucrats	Agents with specific intentions of policy change; Encompasses a range of interests but with similar intentions for change
Integration					
<i>Frequency of interaction</i>	Different categories of actors (executive core, coordinating subgovernment, subgovernment, attentive public, international attentive public) have different frequencies of interaction.	Frequent, high quality, interaction of all groups on all matters related to policy issue	A continuous process of bargaining and negotiation takes place within and between epistemic communities	Within a set time scale, high quality, interaction of all groups on all matters related to the policy transfer	Within a set time scale, frequent, high quality, interaction of all groups on all matters related to policy change
Dimension	A policy community (Frost; Homeshaw; Atkinson and Coleman)	A policy community (Marsh and Rhodes)	An epistemic community (Alder and Haas)	A policy transfer network (Evans and Davies)	A change network
Integration (cont.)					
<i>Continuity</i>	Membership, values, and outcomes persist over time	Membership, values, and outcomes persist over time	Membership and values persist over time as long as separation survives	Ad hoc – action oriented networks with the specific intention of engineering policy change	Ad hoc – action oriented networks with the specific intention of engineering policy change
<i>Consensus</i>	All participants share basic values	All participants share basic values and accept the legitimacy of the outcome	All participants share a consensual knowledge base and a common policy enterprise	All participants share basic values	All participants share basic values
Resources					
<i>Distribution of resources (within a network)</i>	All participants have resources; basic relationship is an exchange relationship	All participants have resources; basic relationship is an exchange relationship	All participants have knowledge resources; basic relationship is exchange relationship	All participants have resources; basic relationship is exchange relationship	All participants have resources; basic relationship is exchange relationship
<i>Distribution of resources (within participating organisations)</i>	Hierarchical; leaders can deliver members	Hierarchical; leaders can deliver members	Policy makers are dependent on the intelligence gathering skills and knowledge resources of the epistemic community	Policy makers are dependent on the intelligence gathering skills and knowledge resources of the agent of transfer and the donor organisation	Policy makers are dependent on the intelligence gathering skills and knowledge resources of those initiating policy change
Power					
	Power is concentrated in the executive core and coordinating subgovernment. Other categories also have limited power and one group can dominate on occasion.	There is a balance of power among members – although one group may dominate, it must be a possible <i>sum game</i> if community is to persist	The view of policy makers ultimately determines the influence of an epistemic community and their status of acceptance	The success of a policy transfer network rests on the ability of the agent of the transfer to satisfy the objective policy problem of the client, then must be a possible <i>sum game</i> if the network is to persist	The equal powers among members of network. The success of the policy change network rests on the ability to achieve change. The power ultimately rests with the policy makers who accept, develop and implement the change.

Source: Adapted from Evans, M. and Davies, J. "Understanding policy transfer: a multi-level, multidisciplinary perspective", *Public Administration* 77, no.2, 1999: 375.

Kedua, dalam model *coalition-centered* ada kelompok ilmuwan yang fokus pada **tip learning**. Formula pertama, disebut *lesson-drawing* (Rosse, 1988, 1991), meliputi *policy-oriented learning* yang berdasar pada pengalaman kelompok mereka sendiri (Sabatier, 1987, 1988, 1993) atau

pengalaman kelompok lain (Rose, 1988, 1991). Formula kedua, disebut *social learning* (Hall, 1989, 1993), yang tujuannya lebih dari hanya sekedar proses induksi dari pengaruh luar yang merubah distribusi sumberdaya politik. Merujuk pada Kuhn (1962), Hall melihat perubahan kebijakan pada akhirnya bisa menghasilkan perubahan paradigma.

Model *dialogue-based* memperluas lagi *who learns*, meliputi state officials (politisi maupun birokrat), kelompok-kelompok kepentingan, dan beberapa segmen publik, serta *what was learned* tentang apa saja opsi-opsi kebijakan yang mungkin dan bagaimana kebijakan itu bisa dicapai. Para kelompok ini melakukan proses *learning* melalui ajang debat di fora terbuka dan media dimana debat tersebut dapat dilihat sebagai proses dialog diantara ide-ide yang berbeda untuk menghasilkan perubahan kebijakan. Sedangkan model *strategy-based* justru cenderung mempersempit peran ide karena *state official* sendiri yang melakukan proses *learning* dan mereka melakukannya demi kepentingan politiknya sehingga pentingnya peran ide hanya dianggap sebagai kamuflase.

Diantara beberapa model diatas, model *coalition-centered* sangat bisa menjelaskan tentang proses terjadinya transnasionalisasi ide sehingga menghasilkan perubahan kebijakan di suatu negara.

Pendekatan dalam Perubahan Kebijakan

Menurut Craig Parson (2007), terdapat empat tipe pendekatan untuk menjelaskan perubahan kebijakan, yaitu pendekatan material/struktural, institusional, psikologis, dan ideasional. Pendekatan material/struktural dan pendekatan institusional menggunakan logika posisi (*logic-of-position*) yang menjelaskan secara detail bagaimana situasi atau kondisi yang dihadapi oleh aktor dalam proses perubahan kebijakan. Term material merujuk faktor-faktor penyebab yang bersifat struktural (*exogenously-given*), sedangkan term institusional merujuk pada faktor-faktor buatan manusia (*human-made*). Sedangkan pendekatan psikologis dan ideasional menggunakan logika interpretasi (*logic-of-interpretation*) yang menjelaskan dengan menunjukkan bahwa seorang aktor bertindak hanya melalui proses interpretasi apakah sesuatu itu mungkin/tidak atau diharapkan/tidak. Kunci pembeda antara pendekatan psikologis dan ideasional adalah pendekatan psikologis menyatu dengan proses kejiwaan, sedangkan pendekatan ideasional bersifat historis dan melibatkan konstruksi sosial atau bisa disebut proses *learning*.

Keempat pendekatan Parson sangat relevan dengan studi perubahan kebijakan. Pertama, kelompok materialis menjelaskan perubahan kebijakan merupakan dampak dari bantuan-bantuan ekonomi yang cenderung dapat membatasi pilihan-pilihan bahkan menjadi *pressure* dalam proses kebijakan. Kedua, kelompok institusionalis menjelaskan bahwa perubahan kebijakan sangat dipengaruhi oleh fungsi-fungsi institusi politik dan formasi *veto players* (Tsebelis, 2002). Ketiga, kelompok psikologis menjelaskan bahwa bias kognitif dapat berdampak pada proses difusi atas alternatif pilihan kebijakan dari waktu ke waktu, sehingga perubahan kebijakan dapat disebabkan karena aspek kognitif psikologis dan keterbatasan rasionalitas. Dan keempat, kelompok ideasional menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu aktor dapat beralih ke ide-ide baru melalui proses *learning* untuk mengurangi ketidakpastian. Ide-ide tersebut mengandung tujuan, norma, dan *blueprints* untuk mengatasi problematika yang dihadapi oleh aktor kebijakan. Ide dapat mendefinisikan kepentingan mereka, yang didefinisikan tidak hanya melalui proses material/struktural tetapi juga melalui proses interpretasi. Bagi Parson, keempat pendekatan ini dapat berdampak pada pilihan-pilihan kebijakan aktor sehingga menghasilkan perubahan kebijakan. Kombinasi dari pendekatan-pendekatan yang berbeda sangat dimungkinkan terjadi, misalnya dalam prakteknya perubahan kebijakan dapat disebabkan oleh gabungan antara faktor material/struktural dan proses ideasional.

Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink (eds) menggabungkan pendekatan logika rasionalis dengan konstruktivis dalam bentuk model spiral (*spiral model*) untuk menjelaskan proses difusi ide/norma *human right* dalam kebijakan domestik. Tujuannya adalah untuk menangkap dinamika dalam proses sosialisasi dan mengidentifikasi mekanisme yang digunakan dalam proses tersebut. Dengan demikian pendekatan ideasional dimungkinkan untuk digabungkan dengan pendekatan material/struktural. Mekanisme yang digunakan dapat berupa inspirasi, subsidi, partnership, dan substitusi (Jakoby, 2008).

Penutup

Faktor penting dan problematik dalam penelitian tentang pentingnya ide dalam perubahan kebijakan adalah bagaimana memetakan ide dan kepentingan dari para aktor yang terlibat dalam proses perubahan kebijakan pada kanvas yang sama (Sabatier & Jenkins, 1993). Karena

ide bergerak lintas batas negara maka untuk menjelaskan *road map* ide harus melibatkan konstelasi aktor-aktor transnasional (Beland, 2010). Aktor-aktor transnasional yang terlibat dalam proses kebijakan bisa berwujud organisasi internasional (Woods, 2006), *transnational advocacy networks* (Keck & Sikkink, 1998), *epistemic community* (Haas, 1992), dan *individual policy entrepreneurs* (Mintrom, 1997). Mereka saling membagi serangkaian ide dan sumberdaya yang menghasilkan strategi kebijakan tertentu. Sistem kepercayaan ini meliputi tujuan kebijakan, persepsi mengenai kausalitas, dsb.

Daftar Pustaka

- Bennet C, Howlett M. 1992. *The Lesson of Learning: Reconciling Theories of Policy Learning and Change*. *Policy Sciences*. 25.
- Etheredge LM. 1981. *Government Learning: An Overview*. In Long SL (ed). *The Handbook of Political Behavior*. Vol 2. NY: Pergamon.
- Finnemore, Martha. 1996. *National Interest in International Society*. Ithaca, NY: Cornell Uni Press.
- Finnemore, Martha & Kathryn Sikkink. 1998. *International Norms Dynamics and Political Change*. *International Organization*. Vol 52. No. 4
- Goldstein, Judith & Keohane. 1993. *Ideas and Foreign Policy: Belief, Institutions, and Political Change*. ITHACA & London: Cornell Uni Press.
- Haas, Peter M. 1992. *Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination*. *International Organization*. 46
- Hall, PA. 1993. *Policy Paradigm, Social Learning, and The State: The Case of Economic Policymaking in Britain*. *Comparative Politics*. April
- Heclo H. 1978. *Issue Networks and The Executive Establishment*. In King A. *The New American Political System*. DC: American Enterprise Institute.

Ikenberry, John. *Creating Yesterday's New World Order: Keynesian "New Thinking" and the Anglo -American Postwar Settlement*, dalam Goldstein, Judith & Keohane. 1993.

Ideas and Foreign Policy: Belief, Institutions, and Political Change. ITHACA & London: Cornell Uni Press.

Knoke D, Pappi FU, Bradbent J, Tsujinaka. 1996. *Comparing Policy Networks: labor Politics in The US, Germany, and Japan*. Cambridge: Cambridge Uni Press.

Mallarangeng, Rizal. 2002. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Mas'ood, Mohtar. 2002. *Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analilis*

Ekonomi Politik tentang Globalisasi Neoliberal. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FISIP UGM. Yogyakarta: *unpublished*.

Risse, Thomas, Stephen C. Ropp. Kathryn Sikkink. *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*.

Rose R. 1991. *What is Lesson-Drawing*. *Journal of Public Policy*. 11.

Sabatier, Paul A, Jenkins-Smith (eds). 1993. *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO: Westview Press.

Santoso, Purwo. 2009. *Cross-Cultural Learning for Securing Decentralization and Democratization: Assessing Indonesia's Respons to Globalization*. Working Paper No. 1. *Power Conflict Democracy Publication*.

Sikkink, Kathryn. 1986. *Codes of Conduct for Transnational Corporations: the Case of WHO/UNICEF Code*. *International Organization*. Vol. 40, No 4.

Zehfuss. Maja. 2002. *Constructivism in International Relations: the Politics of Reality*. UK: Cambridge University Press.

Dilema Gender Kebijakan Politik Untuk Perempuan

Oleh Tutik Sulistyowati

Penghujung tahun 2015 merupakan momentum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang pertama di Indonesia. Pilkada serentak ini diikuti oleh 269 daerah, baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Di tingkat provinsi terdapat sembilan provinsi memilih calon gubernur dan wakil gubernur, di tingkat pemerintahan kota terdapat 36 kota memilih wali kota dan wakil wali kota, serta di tingkat pemerintah kabupaten terdapat 224 kabupaten memilih bupati dan wakil bupati. Pilkada serentak ini dilakukan secara langsung dan diikuti oleh 826 calon pasangan, dengan karakteristik pendidikan, usia dan gender yang bervariasi.

Berdasarkan gender, calon kepala dan wakil kepala daerah yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.529 orang, sedang calon kepala dan wakil kepala daerah yang berjenis kelamin perempuan mencapai 123 orang. Untuk calon kepala daerah laki-laki sebanyak 769 orang, dan calon kepala daerah perempuan sebanyak 57 orang. Sedang calon wakil kepala daerah berjenis kelamin laki-laki 760 orang dan calon wakil kepala daerah berjenis kelamin perempuan sebanyak 66 orang. Sementara itu jumlah pemilih diperkirakan mencapai 97.482.215 orang, yang terdiri dari 48.793.902 orang laki-laki, dan 48.688.313 orang perempuan (Harian Sindo, 2015).

Masyarakat Indonesia juga baru melakukan pemilihan presiden RI yang ketujuh pada tanggal 9 Juli 2014 yang lalu. Pemilihan tersebut diikuti oleh dua kandidat calon Presiden, yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Pada pilihan presiden tersebut, adalah pilpres secara langsung yang ke empat kalinya, setelah pilpres pertama tahun 1999, pilpres kedua tahun 2004, pilpres ke tiga 2009 dengan kemenangan pada Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Dalam pemilihan kepala daerah, secara kuantitas calon kepala dan wakil kepala pemimpin daerah dari jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Fenomena ini tentunya cukup

mengejutkan, karena secara realitas masyarakat Indonesia selama ini masih mempermasalahkan keberadaan kaum perempuan dalam politik apalagi sebagai pemimpin. Secara realitas politik, perempuan kurang memiliki kesempatan dibanding laki-laki bahkan keberadaannya dipandang sebagai *liyan* (orang lain). Pandangan ini cukup beralasan karena secara kultural, perempuan selama ini diposisikan dalam wilayah domestik dan laki-laki di ranah publik, sehingga keterlibatannya dalam politik pun tidak diharapkan.

Namun dengan adanya kebijakan *affirmative action* 30 % untuk perempuan, cenderung menggeser pandangan bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam politik, bahkan mulai memunculkan realitas perempuan sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah, maupun calon anggota badan legislatif baik di pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun demikian sebetulnya sudah banyak para pemimpin perempuan di Indonesia yang sudah menunjukkan kesuksesannya. Ketika kebijakan *affirmative action* diberlakukan tentunya diperlukan dukungan semua pihak, sehingga tidak menimbulkan dilema bagi perempuan bergerak dalam politik. Dilema tersebut muncul ketika satu sisi ada kebijakan yang mengharuskan keterlibatan perempuan secara penuh dalam politik, namun di sisi lain masyarakat (kelompok laki-laki) belum menerima sepenuhnya akibat paham kultural yang selama ini ada.

Secara kultural, ada perbedaan peran dan posisi gender dalam masyarakat yang menyebabkan pembagian kerja secara seksual. Termasuk di dalamnya wilayah kerja politik, wilayah ini dipahami sebagai milik laki-laki. Tentunya dilema ini akan menghambat optimalisasi perempuan dalam politik, jika tidak ada pemahaman bersama dan kerjasama dengan kelompok laki-laki sebagai partner politik.

Implementasi Demokrasi

Pilpres dan Pilkada secara langsung adalah proses pemilihan presiden-wakil presiden dan kepala daerah-wakil kepala daerah, dengan pemilih dilibatkan secara langsung memilih sosok calon presiden atau kepala daerah yang dikehendaki. Pilpres dan Pilkada secara langsung ini adalah implementasi salah satu bentuk tujuan reformasi dan sekaligus sebagai wujud demokrasi di Indonesia. Rakyat diberi kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi langsung untuk memilih presiden, kepala daerah, maupun wakil-wakil mereka dalam parlemen. Namun sejatinya proses demokrasi perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*,

dansebagainya (Budiarjo, 2008:461)

Dalam sistem pemilu dan pilkada demokratis, rakyat diberi kebebasan untuk memilih ataupun dipilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Sedang dalam sistem pemilihan secara langsung rakyat diberi kebebasan memilih calon yang sesuai dengan aspirasi mereka. Sistem ini akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan subyektif pemilih menjadi dominan. Misalnya mengenal, mengetahui, menyenangkan, mencintai, dan sebagainya terhadap sosok atau figur sang calon, menjadi pertimbangan utama.

Pertimbangan subyektif pemilih ini secara tidak disadari akan memicu ketersingungan antar pemilih yang berlanjut menjadi konflik horizontal antar mendukung masing-masing calon. Realitas ini terjadi pada pemilihan presiden yang lalu, banyak ditemukan praktek-praktek kecurangan, baik mengenai persoalan administrasi, intimidasi dan mobilisasi,serta politik uang. Akhirnya yang banyak dijumpai setelah masa pemilu berakhir adalah fenomena caleg gagal yang frustrasi dan masuk rumah sakit jiwa.

Sistem pemilu yang bersifat demokratis, melibatkan peran serta semua warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk dipilih maupun memilih. Bagi kelompok laki-laki perubahan sistem politik ini bukan menjadi masalah, karena sejarah telah menunjukkan laki-laki sudah terlibat secara penuh dalam ranah politik. Namun tidak bagi kelompok perempuan, perempuan selama ini mengalami subordinasi dan marginalisasi dalam politik. Perempuan tidak dilibatkan dalam ranah politik, dianggap *liyan*, bahkan ada anggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Selama pemerintahan orde baru dengan sistem politik yang tertutup (otoriter), perempuan 'hanya' menjadi penonton dan obyek politik. Bahkan ada pernyataan yang mengatakan politik adalah tabu bagi perempuan, sehingga perempuan merasa asing dengan dunia politik. Hingga hadirnya sistem politik yang demokratis saat ini, seolah-olah membuat perempuan *gelalapan*, mau tidak mau harus ikut berperan dan berpartisipasi dalam dunia politik. Apalagi dengan diberlakukannya kebijakan *affirmative action*, yakni kuota 30 % untuk perempuan.

Kebijakan *affirmative action* telah ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2004 dalam sistem pemilu, namun mulai direalisasikan mulai pemilu tahun 2009 yakni diterapkannya kuota mengenai pencalonan perempuan sebesar minimal 30%. Konsep *affirmative action* atau tindakan afirmatif, seperti yang tertuang dalam Konvensi CEDAW mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW dalam UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 4), adalah langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mencapai

persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki (Sagala, 2004). Kebijakan *affirmative action* tertuang dalam pasal 53 UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/ Kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Pada pemilu tahun 2009, partisipasi perempuan sudah mulai nampak namun belum bisa dikatakan tercapai kesetaraan gender. Dalam pelaksanaan pemilu tersebut telah dibuat peraturan yang lebih rinci mengenai representasi perempuan di ranah legislatif. Hasil dan fungsi serta peran dari legislatif perempuan yang terpilih, apakah sudah mewakili inspirasi kelompok perempuan atau belum, tentu memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Sedangkan pada pemilu tahun 2014, aturan tentang kuota perempuan sebesar minimal 30% diperkuat dengan UU No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, dan Peraturan-peraturan KPU mengenai tata cara kampanye yakni dalam Undang-Undang Pemilu No. 8/2012. Dalam UU ini dikatakan bahwa, diwajibkan paling tidak ada tiga kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih partai politik. Partai politik akan dilarang mengikuti Pemilu apabila tidak memenuhi kuota ini. Kebijakan ini perlu dicermati secara sungguh-sungguh akan keterlibatan perempuan, terutama bagaimana partai politik menyiapkan kandidat calon dari perempuan. Ketika partai politik hanya mempertimbangkan aspek kuantitas calon tanpa melihat aspek kualitas calon, tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam politik diharapkan mampu berperan penuh bersama laki-laki dalam setiap aspek. Keterlibatan ini tentunya memerlukan modal sosial dari calon perempuan, baik dari sisi kualitas, kredibilitas, dan profesionalitas agar bisa tampil total. Totalitas perempuan dalam politik juga memerlukan dukungan dari partai politik, namun jika partai politik hanya memperhatikan aspek kuantitas, bisa jadi aspek kualitas calon tidak terseleksi secara maksimal. Akibat berikutnya adalah kinerja politik para perempuan tidak mampu diperbandingkan dengan laki-laki, dan *labelling* yang disematkan pada perempuan akan lebih buruk lagi. Secara sosiologis, selama ini masyarakat telah memberikan stereotip negatif kepada perempuan. Kualitas perempuan dalam politik memerlukan kerjasama dengan laki-laki dalam setiap tahap, memerlukan dukungan moral, fasilitas dan kedadaran gender bahwa perempuan adalah elemen sosial yang harus terlibat dalam membangun bangsa. Ketika kesadaran ini tidak dimiliki oleh

pengurus partai politik, maka perempuan akan selamanya mengalami dilema politik, satu sisi ada kebijakan yang mengharuskan perempuan masuk dalam politik, namun di sisi lain tidak ada kemauan dari kelompok laki-laki (nota bene partai politik) untuk memberikan kesempatan kepada perempuan.

Partisipasi Perempuan dalam Politik di Era Reformasi

Pemilu 2014 merupakan pemilu ke-empat di era Reformasi, yakni tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014. Dari seluruh penyelenggaraan pemilu representasi perempuan di parlemen mengalami fluktuasi dan pasang surut. Berikut data partisipasi perempuan pada periode sebelum pemilu 2014:

Tabel 1
Partisipasi Perempuan Pada Era Reformasi

No.	Periode	Jumlah	Prosentase
1.	1999 – 2004	44 orang	8,80 %
2.	2004 – 2009	62 orang	11 %
3.	2009-2014	101 orang	18,04 %
4.	2014-2019	97 orang	17,32 %

Sumber: Kementerian PP 2014

Pemilu legislatif tahun 2014, diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan representasi perempuan, namun ternyata tidak tercapai. Hasil pemilu tahun 2014 representasi perempuan menurun 4 orang dari pemilu sebelumnya, hingga menjadi 97 orang atau 17,32 %. Tentunya fenomena ini patut dicurigai, ada masalah apa dengan partisipasi perempuan dalam pemilu, yang selama ini sudah menunjukkan peningkatan kuantitas cukup berarti mulai dari pemilu pertama pasca reformasi.

Jika melihat hasil pemilu mulai tahun 1999 sampai dengan pemilu tahun 2009, sebetulnya representasi perempuan cenderung mengalami peningkatan. Tidak hanya di level DPR RI, juga di legislatif tingkat DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Kenaikan itu adalah: 18% di DPR, 16% kursi perempuan di seluruh DPRD provinsi, dan 12 % perempuan di seluruh DPRD kabupaten/kota. Namun partisipasi perempuan di partai politik (parpol) dan lembaga legislatif masih rendah, hanya sekitar enam persen pada Pemilu 2009. Meskipun mengalami peningkatan dari empat persen pada Pemilu 2004 tetapi angka ini masih dibawah kuota 30 persen sebagaimana amanat dalam undang-undang (Kemen PP, 2014).

Sedangkan menurut catatan Kemen PP, angka keterwakilan perempuan pada Pemilu 2009 mencapai 18,04%, DPD mencapai 27 %, DPRD provinsi mencapai 16 %, dan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 12 %. Meskipun begitu, ada 22 % dari 497 kabupaten/kota yang tidak terdapat keterwakilan perempuan di DPRD-nya. Artinya dari hasil pemilu tahun 2009, keterwakilan perempuan dibidang politik belum mencapai angka 30 %, sedang dari hasil pemilu legislatif tahun 2014 keterwakilan perempuan mengalami penurunan yakni hanya 17,32 %. Jadi angka partisipasi perempuan dalam bidang politik masih rendah, belum mencapai keterwakilan 30 %, padahal keterwakilan perempuan 30 % diharapkan sebagai langkah yang mengawal keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak (Kemen PP, 2014).

Selain representasi perempuan dalam legislatif, keterlibatan perempuan dalam eksekutif dan yudikatif adalah sebagai berikut. Di lembaga eksekutif, dari total kepala desa di Indonesia, hanya ada 3,91 persen yang perempuan (BPS, 2010). Ada satu perempuan dari 33 gubernur terpilih (2010). Dari total 440 jabatan bupati/walikota hanya 2,27 persen yang diemban oleh perempuan. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga terlihat di eselon dua karena 91,3 persen pemangku jabatan eselon satu dipegang oleh laki-laki, padahal di eselon dua terdapat 45 persen perempuan dan 55 persen laki-laki (Badan Kepegawaian Nasional, 2009). Untuk lembaga yudikatif, keterwakilan perempuan di Mahkamah Agung menunjukkan tidak ada perempuan yang duduk sebagai hakim agung (2010), yang ada hanya 15,8 persen perempuan di tingkat eselon dua Mahkamah Agung. Rasio gender sebagai hakim juga masih timpang, di mana 76 persen hakim di peradilan sipil adalah laki-laki dan 24 persen perempuan. (Kemen PP 2014).

Partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, baru dilaksanakan pertama kali di tahun 2015. Pelaksanaan Pilkada serentak ini diikuti oleh 826 calon pasangan yang terdiri calon kepala daerah laki-laki sebanyak 769 orang, dan calon kepala daerah perempuan sebanyak 57 orang. Dari 57 calon ini terpilih 32 orang perempuan sebagai kepala daerah. Jika melihat perbandingan secara gender dari calon kepala daerah di Indonesia, masih jauh dari harapan terhadap keterlibatan perempuan dalam politik.

Dilema Gender dalam Politik

Apa sebenarnya yang membuat angka partisipasi perempuan dalam politik rendah? Menurut mantan Menteri PP, Khofifah Indar Parawansa bahwa, *start* untuk mengajak perempuan dalam arena politik terlambat, sehingga keterwakilan perempuan di dalam trias politika (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) juga sangat rendah. Keterlambatan perempuan dalam arena politik akibat dari sistem dan struktur politik di Indonesia tidak melibatkan peran perempuan, sehingga akibatnya perempuan hanya dijadikan obyek politik, dan bukan subjek politik yang secara bersama laki-laki melakukan pembangunan Indonesia.

Selain itu, meskipun Indonesia sudah membuat kebijakan *affirmative action*, namun representasi perempuan dalam politik masih belum bisa terjamin secara penuh. Dalam hal ini, persoalan mengenai representasi perempuan dalam politik, masih mendapat banyak tantangan antara lain:

- a. *Secara struktural*, sistem pemilu dan pilkada dengan sistem pilihan langsung (terbuka dan suara terbanyak) telah melahirkan kompetisi yang sangat bebas dan menyuburkan politik uang. Caleg yang tidak memiliki 'modal' banyak, akan tersingkir dari pertarungan. Situasi ini mendorong pemilih untuk menentukan pilihan tidak lagi secara rasional, melainkan memilih berdasarkan pertimbangan pragmatis. Dalam konteks ini caleg perempuan yang nota bene tidak/belum memiliki modal (baik modal materi maupun modal sosial) kerap menjadi korban dari kompetisi yang pragmatis tersebut.
- b. *Secara kultural*, budaya patriarki masih mengakar dalam konstruk pemikiran masyarakat. Dunia politik dianggap sebagai dunia kaum laki-laki. Masih kuat persepsi masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) yang memandang bahwa perempuan tidak pantas masuk kancah politik. Akibatnya, masih sedikit kader perempuan yang sungguh-sungguh masuk politik sebagai wahana untuk karier, selebihnya adalah karena peran keluarga/ orang terdekat (nepotis) untuk memenuhi kuota sehingga perempuan masuk politik. Disamping itu juga masih rendahnya kesadaran dan partisipasi pemilih perempuan untuk memilih caleg perempuan, karena pemilih perempuan sendiri banyak yang menyangsikan kemampuan caleg perempuan dalam berpolitik. Termasuk peran partai politik yang belum sepenuhnya mengajak perempuan untuk terlibat secara penuh dalam politik.

Selain dua hal yang mendasar tersebut, beberapa faktor juga mempengaruhi dilema politik terhadap perempuan. Kurangnya jaringan

sosial yang dibangun oleh perempuan, dan kesiapan partai politik dalam mengkader politisi perempuan menjadi penyebab dilema politik pada perempuan. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minimnya keterwakilan perempuan di bidang politik bukan semata-mata kesalahan sistem partai politik, namun lebih dikarenakan kurangnya ketertarikan perempuan masuk ke dunia politik, akibat dari urusan rumah tangga, lebih suka terlibat dalam pekerjaan lain atau permasalahan kualitas sumber daya manusia.

Alasan apapun jika kesadaran dan kemauan dari partner politik kurang memberikan respon positif, maka keterlibatan perempuan dalam politik juga kurang optimal secara keadilan gender. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya konkrit secara bersama agar perempuan semakin optimal dalam partisipasinya dalam politik, baik memilih calon maupun dipilih sebagai calon.

Upaya Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Politik

Perjuangan perempuan dalam mengejar cita-cita dalam ranah politik masih panjang, banyak perjuangan yang harus dilakukan. Baik secara kuantitatif, dalam mencapai pemenuhan angka representasi minimal (yakni 30 % kuota), maupun secara kualitas dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran para anggota parlemen perempuan. Sehingga nantinya yang terpilih mampu memperjuangkan nasib kaum perempuan, menciptakan keadilan gender, dan pemenuhan hak-hak kaum perempuan di semua ranah kehidupan. Dalam negara demokrasi, parlemen menjadi alat negara yang berfungsi merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Untuk itu, para legislator perempuan mempunyai tugas besar untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui berbagai kebijakan dan undang-undang. Lebih dari sekadar perjuangan hak-hak dan nasib perempuan, parlemen menjadi arena strategis bagi perempuan untuk berkontribusi bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam arena pemilihan pemimpin nasional dan pemilihan kepala daerah, perempuan sebagai salah satu komponen terpenting bangsa, dituntut untuk ikut bertanggungjawab dalam proses pemilihan pemimpin nasional dan daerah. Menurut data BPS, perempuan merupakan separuh dari populasi penduduk Indonesia, yaitu 49,83%. Pada DPT Pemilu 2014 lalu jumlah pemilih perempuan adalah 93.151.087 orang, sedangkan pemilih laki-laki berjumlah 93.418.119. Dari angka ini harus diakui bahwa perempuan sesungguhnya sangat menentukan masa depan bangsa melalui pemilihan legislator dan penentuan kepemimpinan nasional, begitu juga dengan momentum pemilihan

kepala daerah tahun 2015 ini. Agar optimalisasi perempuan dalam politik bisa terwujud, maka perlu upaya-upaya penguatan, antara lain:

- a. Optimalisasi pemahaman kesetaraan gender dalam masyarakat, lewat pendidikan dan media massa sehingga tidak ada pengkotakan wilayah kerja secara gender.
- b. Mengimplementasikan kebijakan *affirmative action* melalui dukungan moral, kesempatan, apresiasi, dan pendidikan politik serta kaderisasi yang diberikan oleh partai politik.
- c. Meningkatkan partisipasi politik dalam Pilpres dan Pilkada, dengan cara meningkatkan pengetahuan politik, sosialisasi, penyadaran, pelatihan dan simulasi untuk perempuan, terutama perempuan yang berada di luar zona pendidikan dan informasi pemilu
- d. Mengajak perempuan untuk memilih dan dipilih sebagai pasangan calon pemimpin yang peduli perempuan, yakni yang mampu mendengar, mengerti dan memahami, melindungi, serta memiliki empati kepada perempuan. Kepedulian tersebut bisa terlihat dalam visi dan misi, serta program-program aksi untuk memberdayakan dan melindungi kaum perempuan, serta memosisikan perempuan sebagai subjek yang setara dengan kaum laki-laki, berdaulat secara politik, merdeka, dan bermartabat.

Menurut hasil diskusi Forum Solidaritas Perempuan yang di muat dalam Harian Kompas, Selasa 24 Juni 2014 mengatakan bahwa capres dan cawapres yang memiliki kepedulian terhadap masalah perempuan , antara lain permasalahan tentang nasib buruh migran, kemiskinan dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan isu-isu tentang perempuan yang lain.

Melalui debat calon pemimpin nasional atau pemimpin daerah yang sudah berlangsung selama ini, sedikit banyak mampu memberikan informasi kepada kaum perempuan tentang calon yang akan dipilih. Menyadarkan perempuan untuk bisa cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, serta mau menyediakan diri untuk ikut berperan dalam politik adalah langkah konkret yang sangat penting.

- e. Memantau kebijakan pemerintahan dalam hal keberpihakannya terhadap kaum perempuan, terutama dalam menjalankan komitmen terhadap program perempuan yakni pengarusutamaan gender dalam segala bidang, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak pada kaum perempuan.

Upaya-upaya untuk terus mendorong dan memberi contoh partisipasi politik bagi perempuan dalam masyarakat, juga mengontrol jalannya pemerintah yang baru adalah mutlak dilakukan dalam upaya pengembangan, pemenuhan hak, dan perlindungan terhadap perempuan. Pilpres dan pilkada merupakan momentum penting bagi kaum perempuan untuk memperbaiki nasib diri, kelompok, dan bangsa melalui perjuangan politik. Keterlibatan politik perempuan memiliki makna penting untuk meningkatkan keberpihakan negara terhadap kaum perempuan dan anak, serta meneruskan agenda pengarusutamaan gender di Indonesia.

Daftar Pustaka

Bank Dunia. 2000. Rangkuman Pembangunan Berperspektif Gender. Dalam *Laporan Penelitian Kebijakan Bank*

Dunia. dalam (<http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Resources/indonesianum.pdf>). Diakses pada 20 Juni 2014.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ranti. 2013. Press Release: *Peningkatan Kapasitas Perempuan Calon Legislatif Pada Pemilu* (<http://www.menegpp.go.id/v2/index.php/component/content/article/10-gender/542-press-release-peningkatan-kapasitas-perempuan-calon-legislatifpadapemilu-2014>). Diakses pada 20 Juni 2014.

Sagala, R. Valentina. 2004. *Tahun Ratifikasi CEDAW menjadi UU RI No. Tahun: Saya dan CEDAW*. (<http://www.institutperempuan.or.id/?p=31>). Diakses pada 21 Juni 2014.

Salviana, Vina, dan Tutik Sulistyowati. 2010. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Universitas Terbuka

Soetjipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

SINDO. Edisi 1 Desember 2015



**KONFLIK POLITIK DAN
ESKSISTENSI INTERVENSI
KEMANUSIAAN**

Pengaruh Konflik Suriah Terhadap Geopolitik Kawasan

Oleh Gonda Yumitro

Beberapa bulan yang lalu sekitar September Oktober 2015 ramai diberitakan tentang negara-negara teluk yang katanya tidak perhatian terhadap nasib para pengungsi Suriah. Justru Eropalah yang menampung mereka. Padahal Eropa tidak punya hubungan secara keagamaan, melainkan rela melakukan semua dikarenakan peradaban yang tinggi dan nilai kemanusiaan. Adapun negara-negara teluk yang kaya, seperti Saudi, justru diberitakan sebagai negara yang tidak mempunyai nilai kemanusiaan.

Melalui tulisan ini, akan digambarkan bahwa sebenarnya negara tetanggalah yang telah memberikan perhatian besar dan banyak terpengaruh oleh konflik Suriah. Adapun di Eropa, maka persoalan tersebut belum seberapa. Bahkan sebenarnya dalam internal masyarakat Eropa sendiri menjadi perdebatan. Bahkan ada di antara mereka yang merasa diuntungkan dengan kehadiran para pengungsi mengingat keberadaan mereka bisa menjadi tenaga kerja alternatif di tengah semakin berkurangnya penduduk usia produktif di benua ini.

Sebagaimana sudah diketahui, konflik Suriah merupakan pengaruh langsung dari Arab *spring* yang ingin membawa semangat demokrasi di kawasan Timur Tengah. Hanya saja dalam realitanya posisi Bashar Al Assad cukup kuat, dan sulit ditumbangkan. Bahkan dengan adanya semangat rakyat untuk menurunkan kekuasaannya, ia pun bertindak semakin keras, bahkan sampai menggunakan senjata kimia. Akibatnya, korban berjatuhan, jumlah pengungsi semakin banyak, belum termasuk kerusakan infrastruktur.

Kondisi tersebut merupakan isu kemanusiaan yang sangat besar di era ini. Hal ini menyebabkan perubahan konflik domestik Suriah menjadi konflik regional bahkan internasional. Hanya saja dalam realitanya, kondisi tersebut justru membuat konflik Suriah menjadi bertambah kompleks. Hal

ini dikarenakan ternyata dunia internasional yang terlibat dalam konflik juga tidak benar-benar ingin menyelesaikan konflik dengan semangat perdamaian melainkan karena kepentingan pragmatis masing-masing pihak.

Selain itu, yang paling serius adalah berkembangnya konflik politik domestik di Suriah berubah menjadi konflik sektarian. Akhirnya geopolitik Timur Tengah pun mendapatkan pengaruh signifikan karena komposisi penduduk beberapa negara Timur Tengah selama ini terdiri dari kelompok Sunni dan Syiah. Konflik yang terjadi di Suriah akhirnya juga berpindah dengan pola yang sama di negara-negara tetangga. Selain itu, dukung mendukung antara kelompok Sunni dan Syiah terhadap konflik Suriah pun terjadi. Mereka yang berasal dari Syiah mendukung pemerintahan Bashar Al Assad, sementara dari kelompok Sunni mendukung kelompok oposisi. Hal ini menjadi babak baru bagi Arab spring yang terjadi di Timur Tengah.

Perubahan atau perkembangan beberapa negara tetangga yang terkena dampak konflik Suriah baik negara Sunni maupun Syiah bisa digambarkan sebagaimana berikut.

Pengaruh Terhadap Turki

Sejak awal Turki bersikap sebagai negara Sunni yang menjadi pengkritik terhadap konflik yang berkembang di Suriah. Bagi Turki sebagai negara Sunni, sikap Bashar Al Assad dianggap berlebihan dan keluar dari nilai kemanusiaan. Pemerintah dinilai sudah bertindak kejam terhadap masyarakat Suriah, utamanya kaum Sunni. Oleh karena itu, Turki pun melakukan berbagai kebijakan dalam upaya membantu korban perang tersebut, terutama dengan menyediakan fasilitas bagi para pengungsi.

Selain itu, dampak yang cukup terasa di Turki adalah dengan mulai berkembangnya gejolak di kawasan Kurdi. Bagi Kurdi yang utama harus diperhatikan seharusnya adalah penduduk Turki dan bukan masyarakat yang berasal dari luar negeri. Hal ini bisa dipahami karena memang sejak lama salah satu kepentingan bangsa Kurdi adalah berusaha untuk menjadi negara merdeka dengan menggabungkan diri dengan bangsa Kurdi yang terpisah di beberapa negara lainnya. Dalam perkembangannya, hal ini justru menjadi alat bagi Turki untuk semakin meningkatkan eksistensinya sebagai kekuatan baru yang semakin diperhitungkan.

Namun perkembangan terkini berkaitan dengan pembukaan perbatasan Turki dengan Eropa juga menjadi masalah baru dalam

penyelesaian masalah ini. Hal ini bagi Turki memang dinilai mampu mengurangi persoalan yang muncul karena kedatangan para pengungsi dalam jumlah banyak. Selain itu, dengan islamisasi Turki yang semakin kental, maka metode ini menjadi sarana bagi penyebaran Islam ke Eropa.

Hal inilah yang menyebabkan Prancis dan Rusia, serta beberapa negara barat lainnya seakan langsung menjadikan Turki sebagai tersangka pasca serangan terorisme di Prancis. Bagi mereka, Turki merupakan penyebab kejadian ini karena memungkinkan kelompok ISIS untuk memasuki Eropa melalui kawasan Turki. Karenanya sangat mungkin Turki menjadi salah satu target serangan yang ingin dilakukan oleh Barat. Apalagi tidak lama setelah itu, pesawat Rusia pun dinyatakan ditempat di wilayah Turki.

Pengaruh Terhadap Yordania

Hampir sama dengan Turki, sebagai salah satu negara Sunni, maka pengaruh konflik suriah sangat terasa di Yordania. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pengungsi Suriah yang datang ke Yordania. Sejauh ini diperkirakan lebih dari 500.000 penduduk Suriah pindah ke Yordania. Pemerintah Yordania pun menyiapkan berbagai fasilitas termasuk tenda bagi para pengungsi tersebut. Bagi para pengungsi yang mayoritas merupakan Sunni, penantian yang mencapai waktu beberapa bulan di hutan untuk keluar dari Suriah seolah mendapatkan titik aman ketika mereka memasuki wilayah Yordania.

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan perkembangan konflik tersebut ke negara Yordania, pemerintah juga sudah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk memperkuat militer dan menempatkan kekuatan mereka di bagian utara Yordania. Militer ini tidak hanya dimaksudkan untuk sekedar menjaga keamanan, melainkan juga dalam upaya untuk menyambut kedatangan para pengungsi Turki agar mereka merasa aman seperti halnya di negeri sendiri. Kondisi ini merupakan dampak langsung yang sudah terjadi di Yordania berkaitan dengan konflik Suriah.

Pengaruh Terhadap Saudi dan Qatar

Pengaruh yang juga cukup signifikan dari konflik Suriah begitu terasa di Saudi Arabia dan Qatar. Bagi kedua negara ini, persoalan kemanusiaan yang menimpa masyarakat Suriah merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang menuntut mereka untuk turun tangan. Apalagi sebagian besar

dari korban tersebut berasal dari kelompok Sunni yang mempunyai pemahaman yang sama dengan Saudi Arabia dan Qatar.

Pandangan tersebut semakin diperkuat oleh kesadaran Saudi akan terjadinya konspirasi yang dilakukan oleh Iran dan Amerika. Pada akhir bulan November 2013, Amerika membuat kesepakatan rahasia dengan Iran terkait penyelesaian konflik Suriah. Dalam pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk mempertahankan rejim Bashar Al Ashad dan Amerika siap mendukung program pengayaan uranium (untuk nuklir) yang dilakukan Iran (Haaretz, 2013).

Berita ini tentu menyakitkan bagi para pejabat Saudi. Mereka mulai menyadari bahwa persahabatan yang selama ini dibangun oleh Amerika tidak murni melainkan menyimpan berbagai kepentingan tersembunyi. Karakter asli Amerika mulai terlihat dan para pejabat Saudi bersiap-siap untuk mengambil jalan sendiri yang berbeda dengan pilihan Amerika dalam menyikapi perang Suriah dan isu nuklir Iran (The Telegraph, 2013). Saudi menyadari bahwa penentangan Iran terhadap Amerika dan kedekatan Saudi dengan negara Paman Sam selama ini sebagai dalih untuk mencari simpati di kalangan kaum muslimin.

Oleh karena itu, melihat Iran dan Libanon sebagai dua negara Syiah sudah memberikan bantuan maksimal terhadap rejim Bashar Al Assad, maka Saudi Arabia dan Qatar sebagai dua negara kaya di kawasan Timur Tengah pun berusaha melakukan hal yang sama, dimana kedua negara ini menjadi pemasok utama dana dan persenjataan yang dibutuhkan oleh kelompok oposisi dalam menghadapi pemerintah Bashar Al Assad. Dengan dana yang besar tersebut, maka jumlah dan kekuatan dari kelompok oposisi pun menjadi semakin kuat, meskipun kemudian melemah dengan kemunculan ISIS yang juga merupakan produk konspirasi Amerika.

Pengaruh Terhadap Iran

Bagi Iran posisi Bashar Al Assad tentu mempunyai posisi yang sangat penting. Apalagi Suriah merupakan negara yang menghubungkan Iran dengan Libanon. Karena itu, dengan besarnya pengaruh yang dimiliki Iran terhadap wilayah Suriah, maka hal tersebut akan membuat kekuatan Iran di kawasan semakin diperhitungkan. Apalagi Irak sebagai negara yang selama ini dikuasai oleh Saddam Hussein dari Sunni sudah berubah menjadi negara Syiah. Hal inilah yang membuat Iran siap melakukan apapun untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Bashar Al Assad.

Salah satu yang dilakukan Iran adalah dengan membuat kerjasama terselubung dengan Amerika. Dengan cara ini pula, Iran ingin menggunakan isu Suriah sebagai alat untuk semakin memperluas pengaruhnya dan membingungkan peta politik dunia Islam. Apalagi selama ini Iran sudah cukup berhasil dalam membangun opini publik seakan ia merupakan musuh besar Amerika, padahal yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya.

Bukti paling nyata dalam isu Suriah terlihat dari dukungan Amerika terhadap pengembangan senjata nuklir Iran. Meskipun di berbagai media diceritakan bahwa pengembangan nuklir Iran merupakan penyebab kemelut kedua negara, tetapi faktanya Amerika justru mendukung pengembangan nuklir Iran (Islammemo, 2013). Hal ini bisa dipahami karena sejak awal, pengembangan senjata nuklir Iran sebenarnya dibantu oleh Amerika (Iranwatch, 2012). Tanpa transfer teknologi yang dilakukan oleh Amerika, maka Iran tidak akan pernah mengenal nuklir.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Barack Obama telah melakukan beberapa kali komunikasi intensif yang mengarah kepada dukungan “terang-terangan” bagi Iran untuk mengembangkan nuklir. Pada bulan November 2013, Iran dan Amerika bertemu untuk menyepakati sikap berkaitan dengan isu Suriah dan isu nuklir. Dalam pertemuan tersebut, Amerika menyatakan dukungannya terhadap posisi Iran (Haaretz, 2013). Kedua negara juga bersepakat mempertahankan pemerintahan Bashar Al Ashad. Hal ini membuat isu Suriah menjadi semakin kompleks.

Kedua negara membangun kerjasama yang sulit dipahami khalayak yang tidak berfikir politis. Mereka membuat peta politik, dimana seakan-akan Amerika bersekutu dengan negara-negara Sunni di kawasan Timur Tengah, sementara Iran beraliansi dengan Suriah, Libanon, Yaman dan Bahrain (Elshaab, 2013). Padahal bagi mereka yang mencoba untuk melihat dengan mendalam juga berdasarkan pendekatan identitas dan sejarah, maka posisi yang sebenarnya akan bisa dilihat secara terang benderang.

Pengaruh Terhadap Libanon

Selain langsung berbatasan dengan Suriah, struktur politik dan masyarakat yang ada di Libanon mirip dengan masyarakat yang ada di Suriah dimana masyarakat di Libanon selain kristen maronit juga terdiri dari kelompok Sunni dan Syiah. Dengan apa yang terjadi di Suriah, maka konflik domestik di Libanon juga muncul. Selain itu, karena posisi Hizbullah yang

cukup kuat dan militan, maka mereka pun melibatkan diri dalam konflik Suriah.

Selain itu, masalah yang muncul di Libanon juga berkaitan dengan para pengungsi yang juga datang ke negara ini. Dengan puluhan ribu para pengungsi yang datang ke negara ini, maka hal tersebut juga memunculkan banyak masalah utamanya berkaitan dengan persoalan keamanan dan ekonomi di Libanon. Apalagi jumlah pengungsi tersebut sekarang sudah mencapai angka 10 persen dari total penduduk Libanon yang menyebabkan konflik antara pengungsi dengan penduduk lokal pun mulai terjadi.

Konflik sektarian dan berbagai tindak kriminal pun juga terjadi di negara ini. Selama ini tentara hizbullah sangat keras bersikap terhadap orang Sunni dan memberikan sepenuh dukungan kepada Bashar Al Assad. Mereka pun akhirnya menjadikan pengungsi Sunni sebagai salah satu target kekerasan, penculikan, pembunuhan, dst. Selain itu, secara intensif tentara Hizbullah juga mengirimkan pasukan dan persenjataannya untuk melawan kelompok oposisi Bashar Al Ashad.

Dengan cara ini, maka paling tidak Bashar Al Ashad mendapatkan dukungan dari tiga posisi sekaligus kekuatan regional, yaitu Libanon, Iran, dan Irak. Disamping itu, posisi politik Internasional dengan dukungan Eropa, Rusia, dan ambiguitas posisi Amerika membuat Bashar Al Ashad menjadi semakin percaya diri untuk melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil. Apapun yang ia lakukan tidak akan mendapatkan kritik berarti, termasuk ketika ia meledakkan bom kimia di tengah masyarakat sipil.

Adapun kelompok Sunni di Libanon memberikan dukungan kepada para pengungsi tersebut. Namun kekuatan mereka tidak begitu kuat mengingat dominasi yang ditampilkan oleh kelompok Hizbullah. Akhirnya friksi dan faksi dalam politik domestik yang sektarian tidak bisa dihindarkan dan menjadi kelanjutan dari konflik domestik yang memang sudah lama terjadi di negeri ini.

Pengaruh Terhadap Irak

Pada awalnya Irak merupakan negara yang dikuasai oleh Sunni, tetapi kemudian setelah Saddam Hussein ditumbang oleh Amerika, akhirnya terjadi perubahan dimana negara ini dipimpin oleh kelompok Syiah. Maklum selama Saddam Hussein memimpin, negeri ini sebenarnya secara mayoritas penduduknya beragama Syiah. Oleh karena itu semangat

menegakkan demokratisasi begitu meluas ketika rezim Saddam akan dijatuhkan. Apalagi bagi Amerika dan Iran yang memang punya banyak kepentingan.

Bahkan beberapa data menunjukkan bahwa penggulingan rezim Saddam berdasarkan proposal yang dibuat oleh Iran yang selama ini memang bermusuhan dengan pemerintah Irak. Dengan tumbanganya Saddam Hussein, maka atas nama demokratisasi, tentu Syiah sebagai mayoritas akan memimpin dan ancaman yang selama ini dirasakan oleh Iran semakin berkurang. Demikian juga dengan Amerika, ancaman Saddam Hussein terhadap eksistensi Israel di kawasan dapat dihilangkan. Di samping itu, memang ada beberapa kepentingan yang lain seperti minyak, orientalisme, dan seterusnya.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan konflik Suriah, Irak menjadi negara yang mendukung pemerintahan Bashar Al Assad. Dengan mudah kelompok Syiah mengerahkan kekuatan mereka untuk mempertahankan kekuasaan Bashar Al Assad. Apalagi secara geopolitik, posisi Irak langsung berbatasan dengan Suriah. Hal ini juga menjadi jalur bagi Iran untuk mengirimkan bantuan tentara dan persenjataannya dalam memperkuat rezim Bassar Al Assad.

Memang ada sebagian kelompok yang pada awalnya menentang Bashar Al Assad sebelum berkembang menjadi ISIS, mengingat sejarah dan kelompok Sunni di negeri Iran sebenarnya juga cukup kuat. Namun setelah menjadi ISIS meskipun tidak secara langsung mendukung Al Assad dengan tindakan mereka yang memerangi kelompok oposisi, maka ISIS telah memperkuat keberadaan Bashar Al Assad. Ketika ISIS menentang dan memerangi kelompok oposisi Suriah, maka pada saat itu berarti mereka telah memberikan peluang kepada Bashar Al Ashad yang sebelumnya diberitakan sudah melarikan diri ke Rusia untuk kembali mengkonsolidasikan kekuatan.

Isu ISIS yang berasal dari Irak ini telah menjadi alat politik yang sangat strategis. Dengan dalih menyerang ISIS pasca serangan yang terjadi di Prancis, maka hal ini memungkinkan bagi kelompok aliansi Bashar Al Assad yang berasal dari Prancis, Rusia dan negeri Eropa lainnya untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan kelompok oposisi. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa kekuatan Bashar Al Ashad sampai sekarang masih bertahan kuat melawan arus demokratisasi yang begitu kuat sejak fase *Arab Spring* dimulai.

Selain itu, dinamika yang berkembang berkaitan dengan komposisi penduduk Sunni dan Syiah di Irak sebagaimana di Suriah, telah menghambat berbagai upaya penyelesaian konflik Irak yang selama ini telah dilakukan. Konflik sektarian yang ada di Suriah tidak hanya terjadi pada level domestik, melainkan sudah berkembang menjadi isu regional dan menyebabkan konflik dengan pola yang sama di negara-negara lain, seperti halnya Irak.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa konflik Suriah memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi politik kawasan di Timur Tengah. Dengan perkembangan yang ada di Suriah, telah menyebabkan terjadi perluasan wilayah konflik ke beberapa negara kawasan. Apalagi isu sektarian Sunni dan Syiah menjadi warna yang sulit dilepaskan. Lebih dari itu, pengaruh *intrusive system* yang berasal dari beberapa negara kuat seperti Rusia, Amerika, dan Eropa telah membuat kompleksasi isu suriah dan kawasan menjadi semakin rumit.

Daftar Pustaka

- Elshaab.dalam <http://Elshaab.Org/Thread.Php?Id=84152>. Diakses 14 Desember 2015
- Haaretz. 2013.*Saudi Arabia Ready to Act on Iran, Syria, 'With or Without West'*. dalam <http://Www.Haaretz.Com/News/Middle-East/1.564182>). Diakses 14 Desember 2015.
- Islammemo. 2013. “?ووي من وراء الكواليس حاكم عربي دفع أمريكا وإيران للاتفاق بشأن الن”. dalam <http://Www.Islammemo.Cc/Akhbar/Arab/2013/11/26/188130.Html#2>. Diakses 14 Desember 015
- Iranwatch. 2015.*A History of Iran's Nuclear Program*. dalam <http://www.Iranwatch.Org/Our-Publications/History-Irans-Nuclear-Program>. Diakses 14 Desember 2015
- The Telegraph.2013. *Saudi Arabia warns it will act against West's policy in Middle East*. Dalam <http://www.Telegraph.Co.Uk/News/Worldnews/Middleeast/SaudiArabia/10524721/Saudi-Arabia-Warns-It-Will-Act-Against-Wests-Policy-In-Middle-East.Html>). Diakses 14 Desember 2015

Ancaman ISIS dan Respons Pemerintah Kota Malang

Oleh Najamuddin Khairur Rijal

Sebagaimana dipahami, ISIS menjadi perhatian dunia internasional karena eksistensinya menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia melalui tindakan radikal, ekstrem, dan anarkis yang dilakukannya. ISIS bercita-cita untuk mendirikan Negara Islam (*Islamic State*) dan menegakkan kekhilafahan Islam di Irak dan Syria (Suriah). Upaya untuk mencapai tujuan politisnya tersebut, salah satunya, dilakukan dengan menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat Muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam. Propaganda ISIS disebarkan melalui beragam instrumen teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad dan bergabung menjadi bagian ISIS.

Pemanfaatan berbagai fitur teknologi komunikasi berbasis internet sebagai instrumen propaganda menjadikan ISIS bukan sekadar gerakan lokal di Irak dan Suriah, namun telah menjadi gerakan transnasional. Hal itu dibuktikan dengan bergabungnya ribuan pejuang asing (*foreign fighters*) yang berasal dari berbagai negara di dunia dan juga ideologinya mampu tersebar serta memperoleh simpati di berbagai negara.

Terlepas dari berbagai pendapat dan perdebatan tentang sejarah dan perkembangan ISIS, faktanya kelompok pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi tersebut menjadi ancaman bagi stabilitas internasional. International Criminal Court menyebut ISIS telah melakukan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) melalui pemenggalan leher korbannya, pembantaian, perbudakan, dan lainnya (Crawford, 2015). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan memasukkan ISIS sebagai organisasi terorisme internasional atau terorisme global yang harus dilawan oleh setiap negara.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, selain bergerak di Irak dan Suriah, ideologi ISIS juga tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, pada 23 Juli 2014 beredar video di *Youtube* berjudul “Join the Ranks” yang berisi seruan jihad untuk mendukung ISIS, yang kemudian diikuti dengan banyaknya simpatisan yang mendukung ISIS di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Sebagai respons, sejak 4 Agustus 2014 pemerintah Indonesia yang saat itu di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi melarang ISIS di Indonesia, baik secara formal maupun informal. Pemerintah memandang bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila dan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia (Martel, 2015)

Sikap pemerintah pusat tersebut kemudian direspons oleh pemerintah di level provinsi. Provinsi Jawa Timur, misalnya, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2014 tentang larangan keberadaan ISIS di wilayah Jawa Timur. Karenanya, menjadi menarik untuk mengkaji bagaimana respons pemerintah lokal (*local government*) di level kabupaten/kota dalam menyikapi ancaman ISIS. Pemerintah lokal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Pemkot Malang.

Lebih lanjut, oleh karena ancaman ISIS cenderung lebih bersifat ideologis (non-fisik) yang disebarkan melalui propaganda via internet dan media sosial, maka upaya *counter*-ISIS perlu dengan berbagai cara. Menurut Martin, perlunya mengintegrasikan beragam cara dan upaya sebagai usaha *counterterrorism* karena, “no single counterterrorist measure can be applied in the same manner to every terrorist environment.” Salah satu cara adalah melalui pendekatan persuasif (*persuasive approach*), atau oleh Forest (2007) disebut pendekatan *soft power*, yang selanjutnya terwujud dalam respons Pemkot Malang terhadap ancaman terorisme global ISIS di level lokal.

Isu dan Eksistensi ISIS di Kota Malang

Penulis memilah isu dan ancaman ISIS di Kota Malang ke dalam dua term waktu, yaitu pasca sosialisasi dukungan kepada ISIS (Juli 2014) dan pasca penangkapan tiga anggota ISIS (Maret 2015). *Pertama*, isu ISIS di kalangan masyarakat Kota Malang bermula dari adanya kegiatan sosialisasi dan dukungan pada Negara Islam (*Daulah Islamiyah*). Kegiatan itu digelar Ansharul Khilafah (AK) Jawa Timur pada 20 Juli 2014 di sebuah masjid di Dusun Sempu, Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, AK disebut-sebut berafiliasi dengan ISIS, apalagi pada akhir acara para peserta dibagikan brosur, stiker ISIS, dan Majalah *Al Mustaqbal* yang

berisi propaganda dukungan pada ideologi ISIS.(intelijen,2015)

Terlaksananya sosialisasi dan deklarasi tersebut selanjutnya menjadikan isu ISIS mengemuka di Kota Malang. Sekalipun kegiatan tersebut digelar di wilayah administratif Kabupaten Malang, namun ada ketakutan tersendiri bahwa pasca deklarasi tersebut ISIS semakin menyebar (Noermawan, 2015). Terlebih lagi, rencana awal kegiatan tersebut digelar di wilayah administratif Kota Malang, yakni pada sebuah masjid di Jalan Veteran, Kota Malang, namun gagal karena pengurus masjid menolak memberikan izin.

Lebih dari pada itu, indikasi kehadiran ISIS di Kota Malang sejatinya telah ada sejak awal 2014. Indikasi pertama muncul ketika pada sebuah lembaga pendidikan pesantren mahasiswa yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kota Malang diketahui berkibar bendera hitam berlogo ISIS, sebelum akhirnya diturunkan (intelijen,2015). Tidak hanya itu, di awal 2014 juga terdeteksi simpatisan ISIS di sebuah rumah penduduk di Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang. Rumah tersebut memasang bendera ISIS dan di jendela rumah ditempel stiker ISI.

Kedua, eksistensi jaringan ISIS di Kota Malang semakin dibuktikan dengan ditangkapnya tiga anggota jaringan ISIS pada 25 Maret 2015. Ketiga orang tersebut adalah Abdul Hakim Munabari (AHM), Helmi Alamudi (HA), dan Ahmad Junaidi (AJ) yang ketiganya merupakan warga Kota Malang. AHM beralamat di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen; HA bertempat tinggal Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun; serta AJ beralamat Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (intelijen,2015)

Berdasarkan catatan intelijen, HA merupakan fasilitator bagi mereka yang ingin berangkat jihad ke Suriah. Sementara AHM dan AJ baru kembali dari Irak dan Suriah setelah berangkat atas fasilitas dan peran HA. Selain itu, Kapolda Jawa Timur Anas Yusuf mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 18 warga Malang yang berhasil direkrut bergabung dengan ISIS atas peran ketiga tersangka, namun belum “dikirim” ke Irak dan Suriah (Hamzah, 2015)

Mengenai bagaimana jaringan ISIS dapat masuk ke Kota Malang, tidak ada informasi pasti. Apalagi karena pergerakan jaringan ISIS tidak tampak di permukaan serta masuk melalui paham-paham agama sehingga sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Patut diduga masuknya paham ISIS di Kota Malang dibawa oleh para kombatan atau mereka yang pernah melakukan perjalanan ke Irak atau Suriah. Hal itu dibuktikan

dengan tiga orang jaringan ISIS yang ditangkap di Kota Malang semuanya tercatat pernah berangkat jihad ke Suriah (intelijen, 2015).

Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang Nursalim juga membenarkan paham ISIS dibawa oleh mantan jihadis dari Irak dan Suriah. Hal senada diungkapkan Muhadjir Effendy, bahwa umumnya kelompok terorisme di Indonesia dikembangkan oleh para “alumni” perang di Timur Tengah (Effendy, 2015).

Selain itu, paham ISIS juga diduga menyebar melalui persentuhannya dengan kelompok-kelompok yang memiliki paham serupa, yakni kelompok-kelompok yang memandang perlunya penegakan syariat Islam dan khilafah. Oleh intelijen, kelompok yang dimaksud dilabeli sebagai “kelompok rentan.” Dalam bahasa penulis, yang dimaksud kelompok rentan adalah perkumpulan kelompok atau organisasi yang memiliki pemahaman mengenai perlunya kebangkitan Islam atau berafiliasi dengan suatu gerakan yang melakukan upaya *ishlah* (perbaikan atau reformasi) tertentu, atau pihak-pihak yang banyak terlibat dalam aktivitas dan kajian-kajian yang menginginkan revivalisme Islam.

Menurut catatan Bakesbangpol, indikasi paham-paham radikal (revivalisme Islam) di Kota Malang bukanlah sesuatu yang baru dan pergerakannya telah lama dipantau kalangan intelijen. Paham-paham itu telah menyatu dengan masyarakat dan bergerak “di bawah tanah” sehingga sulit dideteksi (Noermawan, 2015). Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang Noor Chozin Askandar bahwa eksistensi ISIS, khususnya di Kota Malang, tidak berdiri sendiri (Askandar, 2015). Banyak paham-paham yang sejalan dengan paham ISIS mengenai pendirian Negara Islam. Karena itu, kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman yang sama kemudian menyatakan simpati dan dukungannya kepada ISIS.

Selain itu, penyebaran paham dan keberadaan jaringan ISIS di Kota Malang juga tidak terlepas dari Salim Mubarak Attamimi atau Abu Jandal. Salim disebut-sebut sebagai “panglima ISIS” dari Kota Malang. Salim bukanlah “orang baru”, aktivitasnya di Kota Malang telah lama dipantau oleh intelijen karena afliasinya dengan kelompok-kelompok teroris (Noermawan, 2015). Catatan imigrasi yang dimiliki Polres Kota Malang menunjukkan bahwa Salim beberapa kali melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah. Ketiga anggota jaringan ISIS yang ditangkap di Kota Malang juga memiliki hubungan dengan jaringan Salim.

Bagaimana Respons Pemkot Malang?

Serangkaian indikasi keberadaan ISIS di Kota Malang yang dikemukakan di atas menjadikan ISIS mendapat perhatian serius dan segera direspons oleh Pemkot Malang. ISIS dipandang sebagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah dan bertentangan dengan ajaran Islam *mainstream* yang dianut oleh mayoritas warga Kota Malang.

Lebih lanjut, kedua term waktu terkait isu dan ancaman ISIS di Kota Malang yang diuraikan di atas selanjutnya direspons oleh Pemkot Malang bersama berbagai *stakeholders* dengan kecenderungan pada pendekatan persuasif (*soft*). Bentuk upaya persuasif antara lain melalui sosialisasi, dialog, himbauan, silaturahmi, dan lainnya yang dilakukan baik pada *term* waktu pertama maupun kedua.

Pertama, dalam merespons terselenggaranya sosialisasi dan deklarasi dukungan terhadap ISIS oleh AK, Pemkot Malang melalui Bakesbangpol melakukan upaya “*counter attack*”. Upaya itu dilakukan dengan menggelar Deklarasi Penolakan Terhadap Keberadaan ISIS di Kota Malang pada 18 Agustus 2014 di Hotel Trio Indah 2 Kota Malang. Deklarasi tersebut melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, militer, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk sinergitas multiaktor dalam merespons penyebaran ISIS yang dipandang sebagai ancaman bersama.

Tindak lanjut dari deklarasi penolakan keberadaan ISIS di Kota Malang tersebut adalah aparat kelurahan di seluruh kecamatan diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan waspada dini terkait keberadaan ISIS serta paham-paham lain yang bertentangan dengan NKRI. Hal yang sama berlaku pada para ulama yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait larangan terhadap paham ISIS karena bertentangan dengan ajaran Islam *mainstream*.

Akan tetapi, sosialisasi dan deklarasi penolakan terhadap keberadaan ISIS yang digelar Pemkot Malang, oleh penulis dipandang hanya sebagai respons insidental. Artinya, respons itu muncul hanya ketika isu ISIS sedang hangat, yakni sekitar Juli-September 2014. Selain itu pula, tindak lanjut sosialisasi dan deklarasi penolakan terhadap keberadaan ISIS tidak menyentuh keseluruhan elemen masyarakat. Akibatnya, serangkaian respons tersebut cenderung tidak berjalan secara berkesinambungan. Tampak bahwa pada *term* waktu pertama respons Pemkot Malang bersifat *reluctant* (setengah hati).

Pernyataan tersebut sejalan dengan fakta bahwa dalam rentang waktu Oktober 2014-Maret 2015, jajaran Pemkot Malang menganggap isu ISIS telah mereda (Noermawan,2015). Persepsi tersebut menjadikan perhatian Pemkot Malang tidak lagi difokuskan pada upaya *counter* ISIS. Namun demikian, ditangkapnya tiga orang anggota ISIS di wilayah Kota Malang pada 25 Maret 2015 menunjukkan bahwa Kota Malang tidak bebas dari keberadaan paham dan jaringan ISIS, sekaligus menjadikan isu ISIS kembali mengemuka sehingga menuntut Pemkot lebih proaktif dan responsif.

Kedua, pasca penangkapan tiga anggota ISIS mendorong Pemkot Malang bertindak cepat sebagai bentuk respons aktif terhadap ancaman eksistensi jaringan ISIS. Sehari setelah peristiwa penangkapan, Walikota Malang Moch. Anton langsung melakukan kunjungan ke lokasi ditangkapnya AJ di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang guna berkomunikasi dan menghimpun informasi masyarakat mengenai aktivitas AJ (Widianto, 2015).

Selanjutnya, pada 31 Maret 2015 dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Malang ke-101 digelar pertemuan yang mengumpulkan seluruh umat beragama di Kota Malang dan secara khusus membahas tentang ancaman ISIS. Walikota Malang dan jajarannya bersama Dandim dan Kapolres Kota Malang juga memiliki program Sambung Rasa setiap dua pekan ke berbagai wilayah di lingkup Kota Malang. Pada beberapa kesempatan itu, Walikota memberikan sosialisasi terkait upaya apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam mengantisipasi keberadaan paham dan jaringan ISIS di lingkungan mereka (Widianto, 2015).

Sayangnya, sekalipun kegiatan Sambung Rasa tersebut berlangsung rutin, namun penyampaian terkait ancaman ISIS dan upaya yang perlu dilakukan masyarakat dalam mengantisipasi keberadaannya hanya bersifat insidental dan temporer. Disebut insidental karena isu ISIS hanya dibahas secara khusus terutama pasca penangkapan tiga anggota ISIS di Kota Malang menjadi *trending topic*. Selebihnya, dalam kegiatan Sambung Rasa, Walikota dan jajarannya membahas isu-isu lain yang sedang hangat dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat setempat.

Selain itu, pasca penangkapan tiga anggota ISIS, cara-cara persuasif melalui sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat berusaha digalakkan oleh Pemkot Malang. Hal itu diimplementasikan dengan dilaksanakannya Sosialisasi Antisipasi Gerakan dan Pengembangan Organisasi Radikal/

ISIS di level kelurahan. Sosialisasi tersebut mengundang seluruh pengurus RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait ISIS dan bagaimana mengantisipasi lingkungan masing-masing dari kemungkinan potensi jaringan ISIS.

Akan tetapi, menurut penulis, kegiatan tersebut masih bersifat parsial dan tidak menyeluruh. Pasalnya, hanya dua kecamatan, yakni Kecamatan Klojen dan Sukun, yang melakukan sosialisasi formal seperti disebutkan di atas. Adapun kegiatan sosialisasi di kecamatan lain lebih berlangsung informal dalam bentuk *Cangkrukan*. Selain itu, sekalipun sosialisasi itu terjadwalnya, implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu dibuktikan dengan pengalaman penulis di lapangan yang berusaha menghadiri kegiatan sebagaimana terjadwal. Namun, beberapa kegiatan batal digelar dan berdasarkan konfirmasi ke Bakesbangpol kegiatan pengganti belum digelar.

Terkait *Cangkrukan*, kegiatan tersebut merupakan agenda Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan sekaligus memberikan sosialisasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam kegiatan itu, dibahas upaya antisipasi berkembangnya paham ISIS dan juga hal-hal yang berpotensi mengancam Kamtibmas. Bagi Pemkot Malang, sebagaimana ditegaskan Widiyanto, himbauan, sosialisasi, dan cara-cara persuasif yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menggelinding dan membudaya di masyarakat (Widiyanto, 2015). Namun, perbedaan implementasi dari cara-cara persuasif di setiap kecamatan atau kelurahan setidaknya menunjukkan bahwa upaya respons yang berusaha dilakukan oleh Pemkot Malang belum berlangsung secara utuh dan menyeluruh.

Selain itu, pada 9 Mei 2015, *stakeholders* Kota Malang (Bakesbangpol, Kodim, Kepolisian, dan FKUB) juga menggelar pertemuan dengan takmir masjid, tokoh agama, dan agen biro perjalanan (Noermawan, 2015). Kegiatan itu membahas mengenai perkembangan paham-paham yang berpotensi mengganggu Kamtibmas serta upaya mengantisipasinya, terutama terkait ancaman ISIS. Para takmir masjid dan tokoh agama diminta untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Adapun biro perjalanan diminta untuk waspada dan selektif kepada setiap orang yang ingin pergi keluar negeri. Hal itu dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mempersempit ruang gerak anggota dan jaringan ISIS.

Local Governance dalam Merespons ISIS

Serangkaian upaya dalam bentuk respons melalui pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemkot Kota Malang di atas menunjukkan bahwa isu ISIS tentu tidak bisa dihadapi sendiri oleh aparat Pemkot. Butuh sinergitas dan kerja sama antara berbagai aktor dalam merespons ancaman ISIS, apalagi ISIS dipandang sebagai ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga membutuhkan *local governance*.

Local governance merupakan bentuk upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah (aktor publik) dan non-pemerintah (aktor non-publik) untuk merespons kebutuhan masyarakat pada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan usaha pemerintah sendiri (Shah dan Shah, 2006). Maksudnya, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah sehingga membutuhkan keterlibatan aktor lain untuk *goes hand by hand*. Dalam konteks ini, *local governance* merupakan koordinasi vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh pemerintah lokal sebagai usaha penguatan upaya *counter-ISIS* dengan melibatkan *local multi-agency*.

Konsepsi *local governance* tersebut termanifestasi dalam model *hybrid security governance* yang merujuk pada integrasi antara aktor publik (pemerintah) dan aktor non-pemerintah untuk menciptakan keamanan dalam konteks dan dimensi yang lebih luas (Daase dan Friesendorf, 2010). Model *hybrid* dalam *security governance* melibatkan adanya *share* kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah (aktor publik) dengan organisasi, badan, dan institusi (aktor non-publik) dalam merespons isu dan ancaman keamanan bersama (NIST, 2011).

Dalam konteks ini, keterlibatan aktor publik (pemerintah dan aparaturnegara) dan aktor non-publik (*civil society*, perguruan tinggi, pebisnis) menjadi penting dalam upaya merespons isu dan ancaman ISIS yang berkembang. Implementasinya dibuktikan dari respons Pemkot Malang (Bakesbangpol) yang melibatkan instansi samping (TNI, Kepolisian, dan Kantor Kementerian Agama) dari aktor publik serta beragam *stakeholders* aktor non-publik seperti FKUB, MUI, NU, Muhammadiyah, dan kalangan perguruan tinggi.

Penutup

Serangkaian respons yang dilakukan Pemkot Malang dan berbagai *stakeholders* menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan persuasif

dalam merespons ancaman ISIS. Hal tersebut karena ancaman ISIS lebih merupakan ancaman ideologis dibanding sebagai ancaman fisik, sehingga upaya *counter* yang dilakukan juga melalui dimensi ideologis dengan cara-cara persuasi. Respons tersebut selanjutnya menunjukkan adanya sinergitas antara Pemkot Malang, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat dalam merespons dan menyikapi ancaman ISIS.

Respons dan sikap yang ditunjukkan oleh Pemkot Malang setidaknya merupakan tindak lanjut dari sikap pemerintah pusat dan himbuan Pemprov Jatim. Sinergitas tersebut juga terbangun dengan keterlibatan aparat pemerintah (aktor publik) di seluruh level mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga pusat dalam merespons ISIS. Hal itu menggambarkan *the whole-of-government approach* mengenai keterlibatan pemerintah di semua level dalam merespons isu tertentu.

Sinergitas respons tersebut sejalan pula dengan arah kebijakan dan komitmen pemerintahan Joko Widodo yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki pendekatan keagamaan (*religion approach*) dan pendekatan budaya (*cultural approach*) dalam menyikapi ISIS, yang kemudian dapat dirangkum sebagai pendekatan persuasif. Indonesia menolak ajakan masyarakat internasional untuk memerangi ISIS dengan cara kekerasan menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) (Sadiyah, 2014). Apalagi ancaman ISIS lebih didefinisikan sebagai ancaman ideologis, bukan ancaman fisik seperti aksi-aksi terorisme yang terjadi sebelumnya di Indonesia.

Hal ini pula menunjukkan, meminjam pendapat Fink, bahwa dalam 13 tahun terakhir *landscape* terorisme global telah berubah secara signifikan yang juga mempengaruhi perubahan upaya dalam meresponsnya (Fink, 2014). Artinya, ancaman terorisme tidak lagi sekadar secara fisik tetapi yang lebih laten adalah ancaman secara ideologis, seperti ISIS. Dengan demikian, dalam meresponsnya, pendekatan persuasif menjadi penting dan bukan lagi sekadar cara-cara militeristik dan koersif. Pasalnya, merespons terorisme dengan mengedepankan langkah militeristik semata justru hanya menciptakan lingkaran kekerasan dan bahkan menjadi teror baru bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

Daase, Christopher, dan Cornelius Friesendorf (eds.). 2010. *Rethinking Security Governance: The Problem of Unintended Consequences*, New York: Routledge.

Forest, James J. F. (ed.). 2007. *Countering Terrorism and Insurgency in the 21st Century: International Perspective*. Volume 1: Strategic and Tactical Consideration (London: Praeger Security International).

Martin, Gus (ed.). 2004. *The New Era of Terrorism: Selected Readings*. California: Sage Publications.

Shah, Anwar (ed.). 2006. *Local Governance in Developing Countries*. Washington DC.: The World Bank.

Laporan Penelitian:

Fink, Naureen Chowdhury. "Countering Terrorism and Violent Extremism: The Role of the United Nations Today and the Impact of Security Council Resolution 2178," *Global Center on Cooperative Security*, November 2014

Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). "Indonesia's Lamongan Network: How East Java, Poso and Syria are Linked," *IPAC Report No. 18*, 15 April 2015

National Institute of Standards and Technology. "Managing Information Security Risk: Organization, Mission, and Information System View," *NIST Special Publication 800-39*, March 2011

Artikel Online:

Branco, Erin. "ISIS Executions: 1,000 Iraqi Civilians Killed In ISIS-Controlled Towns Since June, Hundreds More Found In Mass Graves," [online] <http://www.ibtimes.com/isis-executions-1000-iraqi-civilians-killed-isis-controlled-towns-june-hundreds-more-found-1718076> (diakses pada 11/02/2015)

- Crawford, Jamie. "U.S. Officials Warn of Increase of ISIS Foreign Fighters," [online] <http://edition.cnn.com/2015/02/10/politics/isis-foreign-fighters-combat/> (diakses pada 11/02/2015)
- Lumanaw, Novy. "SBY: ISIS Terapkan Ideologi Eksklusif Antidemokrasi," [online] <http://www.beritasatu.com/nasional/216413-sby-isis-terapkan-ideologi-eksklusif-antidemokrasi.html> (diakses pada 14/02/2015)
- M. Nasrul Hamzah, "Waduh, 18 Warga Malang Direkrut ISIS," *Malang Times*, 26 Maret 2015, [online] <http://malangtimes.com/berita/26032015/29072/waduh-18-warga-malang-direkrut-isis.html> (diakses pada 22/05/2015)
- Martel, Frances. "Indonesia Criminalizes Support for ISIS," [online] <http://www.breitbart.com/national-security/2014/08/06/indonesia-criminalizes-support-for-isis/> (diakses pada 11/2/2015)
- Sa'diyah, Halimatus. "Jokowi Tolak Perangi ISIS dengan Cara Kekerasan," *Republika*, 13 November 2014, [online] <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/11/13/nez6ke-jokowi-tolak-perangi-isis-dengan-cara-kekerasan> (diakses pada 14/02/2015)

Wawancara:

Erik Maulana, 14 April 2015

Intelijen, wawancara 17 April 2015

Muhadjir Effendy, 3 Juni 2015

Noor Chozin Aksandar, 21 April 2015

Nur Widiyanto, 14 April 2015.

Suhartini, 14 April 2015

Tony Noermawan, 16 April dan 15 Mei 2015

Intervensi Kemanusiaan, Kewajiban Untuk Melindungi dan Kepentingan Dibaliknya

Oleh M. Syaprin Zahidi

Pendahuluan

Intervensi urusan domestik suatu negara dalam sejarah hukum internasional awalnya menjadi sesuatu yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) Piagam PBB, yang melarang negara anggota untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain dalam bentuk apapun. Pengecualian terhadap hal ini diberikan kepada Dewan Keamanan PBB yang berhubungan dengan pelaksanaan Bab VII Piagam PBB

Namun, Peristiwa Rwanda pada tahun 1994 menjadi satu titik balik yang membuka mata masyarakat internasional bahwa intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan militer memang sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa umat manusia yang terancam oleh konflik didalam negaranya. Disisi lain, Kewenangan Dewan Keamanan PBB dapat dikatakan memakan waktu yang lama untuk menentukan peristiwa Rwanda adalah suatu kondisi yang dapat mengancam perdamaian internasional sehingga pada waktu itu Dewan Keamanan PBB terkesan lambat untuk mengatasi masalah di Rwanda.

Peristiwa Rwanda akhirnya memunculkan suatu konsepsi baru dalam fora internasional yang dikenal dengan R2P (*Responsibility to Protect*) yang intinya adalah mengemukakan bahwa tanggung jawab dari suatu negara adalah melindungi warga negaranya jika negara tersebut tidak mampu melindungi warga negaranya maka negara tersebut dapat dianggap sebagai *failed state* (negara gagal) dan masyarakat internasional berkewajiban untuk melindungi warga negara di negara gagal tersebut. Operasionalisasi dari konsepsi R2P inilah yang dewasa ini kita kenal sebagai intervensi kemanusiaan (R2P, 2014).

Intervensi Kemanusiaan akhirnya menjadi suatu konsepsi baru yang

diterima oleh masyarakat internasional dan banyak dilakukan oleh negara-negara maju dengan restu Dewan Keamanan PBB untuk mengintervensi negara-negara yang dianggap gagal melindungi warga negaranya yang kebanyakan terjadi dinegara-negara berkembang sebagai contoh adalah intervensi kemanusiaan DK PBB ke Libya yang awalnya diinisiasi oleh Perancis sehingga banyak yang mengasumsikan bahwa Perancis memiliki kepentingan di Libya sehingga menjadi inisiator awal dari intervensi kemanusiaan di Libya.

Ada juga beberapa intervensi kemanusiaan lainnya yang dalam pandangan penulis juga dapat dicurigai sebagai bentuk instrumen untuk mencapai kepentingan negara-negara maju diantaranya adalah Kepentingan Amerika Serikat dalam intervensi kemanusiaan di Kosovo, Kepentingan Prancis dalam intervensi kemanusiaan di Mali dan beberapa intervensi kemanusiaan lainnya.

Proses Munculnya Konsepsi R2P

Munculnya Konsepsi *Responsibility to Protect* (R2P) tidak dapat dilepaskan dari beberapa peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, kelaparan, pemusnahan massal, kejahatan perang dan pembersihan etnis. Jika kita *flash back* ke masa perang dunia pertama pembunuhan terhadap orang-orang Armenia memakan korban jiwa lebih dari satu juta orang. Perang dunia kedua juga menjadi saksi bagaimana rezim Nazi menewaskan tidak kurang dari 11 juta orang termasuk didalamnya adalah enam juta orang Yahudi dan jutaan tawanan perang dan orang Gipsi (Rahayu, 2014).

Setelah Perang Dunia Kedua dan juga terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya dapat dikatakan bahwa masyarakat internasional telah berkomitmen untuk mengakhiri “drama pembantaian” terhadap umat manusia diseluruh belahan dunia ini. Namun, yang terjadi benar-benar mengejutkan masyarakat internasional dimana terjadi pembantaian di Kamboja dibawah rezim pemerintahan Khmer Merah dibawah pimpinan Pol Pot. Hal yang sama terjadi di Bosnia (1992-1995), Somalia (1993), Rwanda (1994), Kongo (1998) dan Kosovo (1999) (Rahayu, 2014).

Apa yang terjadi dibeberapa negara tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pendapat yang mengemuka dalam masyarakat internasional sendiri mengenai definisi kedaulatan. Sehingga intervensi suatu negara terhadap negara lain dianggap melanggar kedaulatan negara

tersebut, walaupun suatu negara melakukan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan didalam negaranya maka negara lain dilarang untuk ikut campur terhadap urusan domestik negara tersebut.

Aspek Kedaulatan ini sendiri telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“all members of the United Nations shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”

Pada pasal 2 ayat (4) ini intinya menjelaskan bahwa ada larangan yang sangat tegas bagi negara-negara anggota PBB untuk menggunakan kekerasan yang melanggar teritorial negara anggota lainnya.

Penjabaran mengenai Kedaulatan suatu negara juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”

Penjabaran dari pasal ini intinya adalah menjelaskan bahwa suatu negara dilarang untuk ikut campur (intervensi) dalam urusan dalam negeri negara lain. Hal tersebut mencakup segala hal diantaranya adalah politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain.

Secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat internasional mengakui apa yang dinamakan sebagai kedaulatan suatu negara sehingga setiap negara didunia ini dilarang untuk melanggar kedaulatan negara lain. Disisi lain, inilah yang menjadi sumber masalah yang membatasi ruang gerak masyarakat internasional jika terjadi suatu masalah kemanusiaan disuatu negara.

Kondisi tersebut diatas akhirnya melahirkan suatu ide tentang prinsip ‘R2P’ yang awalnya diinisiasi oleh Francis Deng seorang mantan diplomat asal Sudan yang pernah menjadi perwakilan khusus PBB untuk masalah pengungsi internal. Francis Deng berpendapat bahwa ide mengenai ‘kedaulatan negara’ seharusnya bukan menjadi dasar bagi semua negara untuk melakukan apapun yang dikehendaknya dan melarang adanya

campur tangan internasional. Disisi lain, seharusnya kedaulatan negara didasarkan pada perlindungan terhadap rakyatnya. Kedaulatan negara harusnya didasarkan atas konsep 'kedaulatan sebagai tanggung jawab' (*sovereignty as responsibility*). Jadi, jika suatu negara dianggap tidak dapat menerima tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya maka tekanan internasional dapat masuk ke negara tersebut (Rahayu, 2014).

Ide dari Francis Deng tersebut kemudian dikaji dalam ICISS (*International Commission in Intervention and State Sovereignty*) yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kanada yang pada bulan Desember tahun 2001 menyampaikan laporannya mengenai R2P. Dalam laporannya ICISS menyatakan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari berbagai macam bentuk kejahatan kemanusiaan seperti pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. ICISS berpendapat bahwa masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu suatu negara melindungi warga negaranya dari keempat kejahatan tersebut (R2P, 2014).

Kegagalan suatu negara dalam melindungi warga negaranya dapat menjadi alasan bagi masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan bagi warga negara di negara tersebut. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya adalah diplomatik, ekonomi dan hukum sedangkan penggunaan kekuatan militer merupakan upaya terakhir dalam kondisi yang mendesak. Laporan dari ICISS ini memberikan pandangan baru kepada masyarakat internasional dalam melihat apa yang dimaknai sebagai kedaulatan dan bagaimana seharusnya masyarakat internasional merespon kejahatan kemanusiaan yang terjadi disuatu negara (R2P, 2014).

Laporan dari ICISS ini menjadi pedoman juga bagi PBB ketika mengadakan konferensi tingkat tinggi dunia (*World Summit*) yang menghasilkan "*The World Summit Outcome Document*". Hasil yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi ini adalah tercapainya kesepakatan diantara pemimpin dunia bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Negara-negara dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tersebut juga sepakat untuk siap mengambil tindakan kolektif jika suatu negara gagal melindungi rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut.

Implementasi R2P Dalam Bentuk Intervensi Kemanusiaan

Implementasi R2P sebagaimana yang penulis jabarkan di pendahuluan dapat dilakukan dalam konteks istilah yang jamak kita kenal sebagai intervensi kemanusiaan. Penjabaran dari Intervensi Kemanusiaan sebenarnya secara umum dapat dilihat pada Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005, terutama Paragraf 138 dan 139 sebagaimana penjabaran diatas. Walaupun sebenarnya dua paragraf tersebut tidak secara langsung mendeskripsikan mengenai intervensi kemanusiaan.

Adapun paragraf 138 dan 139 dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut: (a) Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), serta berbagai macam tindakan yang dianggap mengarah kepada jenis-jenis kejahatan tersebut. (b). Adanya komitmen dari masyarakat internasional untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut. (c). Menjadi tugas setiap negara anggota PBB ketika suatu negara gagal menjalankan tanggung jawabnya melindungi warga negaranya untuk merespon kondisi dinegara tersebut dengan tindakan yang kolektif, tepat waktu dan tegas. Tindakan kolektif itu akan dilakukan melalui PBB dengan menggunakan cara damai bila cara damai gagal maka dimungkinkan untuk menggunakan cara kekerasan sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam PBB (ICISS, 2001).

Definisi mengenai intervensi kemanusiaan sendiri memang banyak sekali dikemukakan oleh para akademisi hukum internasional. Jika dirujuk kedalam *Black's Law Dictionary* intervensi dapat diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain atau dalam urusan dengan negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan. Sedangkan, intervensi kemanusiaan dapat didefinisikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu negara, walaupun tindakan itu melanggar kedaulatan negara tersebut (ICISS, 2001).

Penulis meminjam tipologi dari Starke mengenai intervensi kemanusiaan. Menurut Starke ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi negara terhadap negara lain: (1) Intervensi Internal : intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri

negara lain. (2) Intervensi Eksternal : Intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain. (3) Intervensi Punitive : Intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang di derita oleh negara tersebut (Starke, 1954). Penjabaran Starke mengenai tipologi intervensi kemanusiaan ini tidak menjadi justifikasi Starke untuk mengatakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain sebagai tindakan legal. Secara khusus ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional.

Adapun intervensi yang legal dalam kerangka hukum internasional menurut Starke adalah: (1) Intervensi Kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB. (2) Untuk Melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya dinegara lain. (3). Pembelaan diri. Intervensi dibutuhkan segera setelah adanya sebuah serangan bersenjata (*armed attack*). Adapun syarat-syarat pembelaan diri adalah : langsung (*instant*), situasi yang mendukung (*overwhelming situation*), tidak ada cara lain (*leaving no means*), tidak ada waktu untuk menimbang (*no moment of deliberation*). (4). Hubungan antara negara protektorat dengan dominionnya. (5). Negara yang diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional. Lima klasifikasi ini menjadi indikator untuk menentukan apakah suatu intervensi dapat dikatakan legal atau tidak. maka menurut Starke dapat disimpulkan bahwa doktrin intervensi kemanusiaan tidak sepenuhnya terlarang karena ada celah yang diberikan dalam mekanisme hukum internasional (Starke, 1954).

Pendapat Starke tersebut dalam konteks hukum internasional memang bisa diterima oleh masyarakat internasional apalagi setelah Prinsip R2P menjadi suatu norma yang diterima oleh masyarakat internasional. Namun, dalam perspektif yang berbeda ada juga yang sangat mencurigai bahwa intervensi kemanusiaan tersebut sarat akan kepentingan yang bukan lagi murni kepentingan kemanusiaan. Kecurigaan ini terutama di gerakkan oleh negara-negara berkembang yang tidak serta merta percaya bahwa intervensi kemanusiaan murni digunakan untuk mengatasi masalah kemanusiaan di suatu negara.

Pandangan-Pandangan Mengenai Intervensi Kemanusiaan

Perspektif dari negara-negara berkembang yang memandang intervensi kemanusiaan telah mengaburkan makna dari kedaulatan

serta yurisdiksi wilayah suatu negara akhirnya menimbulkan perdebatan yang cukup hangat mengenai perlu atau tidaknya suatu intervensi kemanusiaan disuatu negara. Dalam pembahasan ini penulis mencoba melihat pandangan yang pro dengan adanya intervensi dan pandangan yang kontra terhadap adanya intervensi.

Ada tiga pandangan yang memiliki perbedaan pendapat dalam melihat prinsip intervensi dan non intervensi. Pandangan-pandangan tersebut berasal dari kaum realis, sosialis dan liberalis. Dalam pandangan kaum realis secara garis besar mereka melihat bahwa keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) merupakan tujuan suatu negara. Kemudian, perang dapat dijadikan sarana untuk mencapai keseimbangan kekuasaan tersebut sehingga menurut pandangan ini tindakan intervensi baik secara kekerasan maupun tidak dapat dibenarkan sepanjang untuk kepentingan nasional mengembangkan keseimbangan kekuasaan.

Pandangan berikutnya dikemukakan oleh kaum sosialis yang terpecah pandangannya antara mendukung intervensi dan tidak. Penolakan adanya intervensi terutama digerakkan oleh Marx yang memandang bahwa intervensi sebagai suatu tindakan yang ilegal. Untuk memperluas sosialisme faktor yang paling penting adalah faktor dari dalam yaitu adanya liberalisasi kelas pekerja yang dapat diperoleh melalui kelas pekerja itu sendiri dan bukan dalam bentuk intervensi (Dayle, 1997).

Pandangan yang mendukung intervensi dari kaum sosialis dikemukakan oleh Stalin dan Lenin yang mengatakan bahwa peran revolusi internasional merupakan alat yang paling penting yang tidak saja berguna untuk memperluas sosialisme namun juga untuk mempertahankan negara komunis (Uni Soviet). Dalam hal ini Lenin dan Stalin menetapkan kebijakan yang kontradiktif guna memperlemah kekuatan agresif kapitalisme terhadap negara sosialis. Kebijakan kontradiktif tersebut dilakukan melalui intervensi terhadap politik domestik suatu negara (Dayle, 1997).

Pandangan kaum liberal juga memiliki dua prinsip yang berbeda mengenai intervensi. Pandangan yang tidak setuju dengan intervensi menyatakan bahwa prinsip non intervensi merupakan suatu instrumen dalam rangka melindungi hak asasi manusia kemudian juga memberikan kesempatan menetapkan jalan hidup tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Menurut John Stuart Mill, intervensi akan menyebabkan beberapa hal diantaranya adalah: (1) Terciptanya suatu pemerintahan yang

menindas, (2) menyebabkan timbulnya kembali perang sipil yang penuh dengan kekerasan, (3) Pihak-pihak yang melakukan intervensi akan terus menerus memberikan pengaruhnya dinegara tersebut (Dayle, 1997).

Disisi lain kaum liberal yang mendukung intervensi terbagi menjadi: (1) Kaum kosmopolitan kiri yang mendukung intervensi secara internasional dalam rangka memerangi pemerintahan yang korup dan pemerintahan yang tidak demokratis, (2) Kaum kosmopolitan kanan yang mendukung upaya penggulingan pemerintahan yang pro komunis. Namun, yang menjadi catatan kedua kaum kosmopolitan tersebut berada pada masa perang dingin (Nye, 1997).

Berdasarkan pada pandangan-pandangan mengenai intervensi kemanusiaan yang dikemukakan diatas maka dalam tulisan ini penulis menggunakan pandangan yang pertama yang digerakkan oleh kaum realis yang mengatakan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan atau dengan kata lain bisa penulis sebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya maka suatu negara akan menyetujui adanya intervensi jika intervensi tersebut memang dibutuhkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Intervensi Kemanusiaan Sebagai Instrumen Negara-negara Maju untuk Mencapai Kepentingannya

Dalam perjalanan intervensi kemanusiaan tidak dapat dipungkiri bahwa timbul pro dan kontra terhadapnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kecurigaan yang sangat besar dari negara-negara berkembang terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju dengan menggunakan Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi kemanusiaan di suatu negara dianggap sebagai suatu tindakan yang legal dan tidak melanggar kedaulatan suatu negara. Namun, dalam kenyataannya ternyata ada beberapa studi kasus mengenai intervensi kemanusiaan disuatu negara yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional negara penginisiasi intervensi kemanusiaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa studi kasus mengenai hal tersebut.

Kepentingan Amerika Serikat dalam Intervensi Kemanusiaan di Beberapa Negara

Amerika Serikat dalam beberapa kesempatan memang terlihat menggunakan intervensi kemanusiaan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Diantara beberapa intervensi kemanusiaan dimana Amerika

Serikat (AS) terlibat didalamnya adalah intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya untuk menggulingkan rezim Qaddafi yang dianggap telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Amerika Serikat yang menggalang koalisi internasional dan Pasukan NATO dibawah mandat Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi militer ke Libya. Dalam beberapa kesempatan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates, menyatakan bahwa Libya termasuk bagian dari kepentingan negaranya di kawasan Afrika Utara (Kawilarang, 2013).

Dalam wawancara bertajuk “Meet the Press” yang disiarkan stasiun berita NBC di Washington, Gates mengatakan bahwa “kami memang memiliki kepentingan” di Libya. Namun, dia tidak menjelaskan secara eksplisit kepentingan apa yang dimiliki AS atas negara yang kaya akan cadangan minyak mentah itu. Gates menyatakan bahwa Libya bukan “kepentingan yang vital” bagi AS. Namun, dia melanjutkan bahwa Libya hanya menjadi bagian dari kawasan yang vital bagi kepentingan Amerika, yaitu Afrika Utara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Libya menjadi batu loncatan bagi AS untuk mencapai kepentingannya di kawasan Afrika Utara (Kawilarang,2013).

Secara khusus dapat dianalisis bahwa kepentingan AS di Libya adalah kepentingan untuk dapat mengontrol Sumber Daya Alam berupa 60% cadangan minyak dan gas alam dunia. Ada satu istilah yang menjadi populer di AS waktu itu dimana dikatakan *Libya is a Prize Economy.* “*War is good for business*”. *Oil is the trophy of US-NATO led wars*. Libya bisa dikatakan sebagai negara dengan cadangan minyak yang terbesar di Afrika. Sehingga, operasi militer atas nama kemanusiaan yang digalang oleh AS ini diperlukan oleh AS untuk membangun hegemoninya di Afrika Utara (Chossudovsky,2013).

Disisi lain kepentingan AS juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan beberapa Multi National Corporationnya di Afrika seperti ExxonMobil, Chevron dan Conoco Phillips. Jadi penggulingan Rezim Qaddafi sangat diperlukan karena Qaddafi sangat keras terhadap Perusahaan minyak asing sehingga ketika Qaddafi sudah “turun tahta” maka Libya akan mudah dikuasai karena Libya merupakan “gateway” strategis menuju Afrika Tengah. Dimana negara-negara di Afrika Tengah seperti Aljazair, Tunisia, Niger dan Chad juga kaya akan minyak. Runtuhnya rezim Qaddafi di Libya akan mempermudah proyek pipanisasi yang direncanakan oleh Chevron dan ExxonMobil menuju Chad Selatan (Chossudovsky,2013).

Contoh diatas menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan sengaja digunakan oleh AS untuk mencapai kepentingannya atas minyak di Libya. Adapun intervensi kemanusiaan lainnya yang pernah dilakukan oleh AS untuk mencapai kepentingannya adalah intervensi kemanusiaan yang dilakukan di Kosovo meskipun alasan yang diusung adalah untuk menghentikan konflik dan memaksa Yugoslavia menerima status otonomi khusus bagi Propinsi Kosovo.

Keperentingan AS dalam intervensi kemanusiaan di Kosovo didasari oleh upaya untuk menghentikan secara penuh peran Rusia sebagai penguasa di kawasan Eropa Timur. Dengan makin banyaknya negara-negara di Eropa Timur yang menjadi atau setidaknya mengajukan diri sebagai anggota NATO maka AS mengharapkan negara-negara tersebut mampu memutuskan ikatan yang secara tradisional telah terjalin dengan Rusia (Haryono, 2014).

Disisi lain posisi Kosovo yang berada ditengah-tengah wilayah Republik Federal Yugoslavia juga memiliki arti khusus bagi AS dalam hal pengawasan semenanjung Balkan. Adanya pasukan NATO dibawah pimpinan AS dengan memasang pasak ditengah-tengah Balkan menjadikan AS memiliki 'batu loncatan' untuk menguasai atau masuk ke akses-akses selanjutnya di kawasan Balkan bagian timur dan utara. Selain itu alasan keterlibatan AS melalui NATO ini juga untuk mencegah munculnya semangat solidaritas etnik Albania yang dikhawatirkan akan memunculkan skenario Albania Raya (Haryono, 2014).

Penjabaran diatas menunjukkan bahwa negara maju dalam realitanya ternyata memang benar-benar menggunakan intervensi kemanusiaan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Selanjutnya penulis akan menjabarkan kepentingan negara maju lainnya yang menggunakan intervensi kemanusiaan sebagai jalan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Negara yang penulis soroti adalah Perancis. Berikut ini adalah pembahasannya.

Keperentingan Perancis dalam Intervensi Kemanusiaan di Mali

Sebenarnya ada banyak negara dimana perancis pernah menggunakan intervensi kemanusiaan sebagai instrumen mencapai kepentingan nasionalnya. Namun, dalam tulisan ini penulis akan lebih memfokuskan ke Mali karena intervensi ini belum lama terjadi. Secara umum sebenarnya intervensi Perancis ke Mali awalnya dilakukan secara

unilateral dengan alasan kemanusiaan. Tindakan Perancis ini sebenarnya pernah juga dilakukan oleh negara-negara barat lainnya yang melakukan intervensi tanpa adanya mandat PBB di Yugoslavia dan Somalia pada tahun 1992. Meskipun, Dewan Keamanan mempunyai legitimasi untuk menggunakan kekuatan bersenjata berdasarkan bab VII Piagam PBB untuk menyelesaikan masalah di Yugoslavia dan Somalia waktu itu namun tindakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata tersebut didahului oleh negara-negara dibawah pimpinan AS untuk melakukan intervensi dengan alasan kemanusiaan yang kemudian dilegitimasi oleh resolusi dewan keamanan (Dinstein, 1994).

Perancis sendiri melakukan intervensi militer ke Mali dengan alasan untuk menyelamatkan negara itu dari teroris-fundamentalis. Dikarenakan Militer Mali sudah tidak berdaya untuk menghadapi kaum separatis tersebut yang terdiri dari separatis Tuareg dan jaringan al-qaeda. Dalam statementnya Presiden Perancis, Francois Hollande menyatakan “Mali adalah salah satu negara termiskin di dunia dan menjadi korban terorisme selama bertahun-tahun”. Sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat bagi Hollande untuk memerintahkan intervensi militer atas nama kemanusiaan (Samuel, 2013). Dukungan untuk intervensi militer Perancis tersebut akhirnya datang dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang mengatakan untuk tetap memprioritaskan dialog sebagai jalan utama sebelum penggunaan militer (VOAIndonesia, 2012).

Namun, alasan-alasan kemanusiaan yang dikemukakan oleh Perancis tersebut sebenarnya dalam analisis yang lebih dalam memang hanya menjadi instrumen bagi Perancis untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang lebih penting yaitu dari aspek ekonomi dan politik. Dalam aspek ekonomi Mali menjadi penting bagi Perancis karena Mali merupakan negara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat kaya berupa emas, uranium, bauksit, besi, mangan, timah dan tembaga. Disisi lain, investasi Perancis di Afrika ada di Mali dan Nigeria. Tambang-tambang uranium yang ada di Mali dan Nigeria menjadi sumber energi nuklir Perancis yang melayani 75% kebutuhan listrik Perancis. Sehingga Perancis harus memastikan kondisi yang stabil di Mali.

Disamping kepentingan ekonomi diatas, Perancis juga memiliki kepentingan politik yaitu untuk memperlemah pengaruh tiga negara yaitu Tiongkok, Rusia dan Venezuela. Namun, diantara ketiga negara tersebut Tiongkok menjadi negara yang paling mengkhawatirkan dikarenakan

Tiongkok memiliki kebutuhan energi yang sangat tinggi dan pemasok paling besar dari kebutuhan energi Tiongkok adalah Mali (Samuel, 2013).

Apa yang dilakukan oleh Perancis dan Amerika diatas memang menunjukkan bahwa perdebatan mengenai perlu atau tidaknya intervensi kemanusiaan dalam fora internasional menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari karena adanya kecurigaan yang sangat besar dari negara-negara berkembang terhadap penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai kamouflage dari negara-negara maju untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa intervensi kemanusiaan bisa dikatakan bagaikan dua sisi mata uang dimana dia memiliki aspek positif ataupun negatif. Positif karena memang motivasi utama adanya intervensi kemanusiaan tersebut adalah untuk menyelamatkan umat manusia yang terancam kondisinya disuatu negara karena kejahatan kemanusiaan. Disisi lain, aspek negatif menjadi muncul ketika ternyata dalam realitanya intervensi kemanusiaan banyak digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Hal yang menjadi menarik kemudian ketika membahas mengenai intervensi kemanusiaan adalah dia merupakan norma yang diakui oleh mayoritas masyarakat internasional. Namun, disisi lain dia juga menjadi suatu hal yang kadang juga digunakan untuk membuat suatu negara menjadi negara yang benar-benar hancur (*failed state*). walaupun mungkin, sebelum adanya intervensi kemanusiaan itu negara tersebut belum sepenuhnya bisa dikatakan sebagai negara gagal.

Daftar Pustaka

Buku

Dayle W Michael.1997. *Way of War and Peace. Realisme, Liberalisme, and Socialism*, New York: Norton and Company Inc.

Dinstein Yoram.1994. *War, Aggression and Self-Defence, Second Edition*, Australia: Cambridge University Press.

Garner A, Bryan (ed.).1999., *Black's Law Dictionary*. Paulus: Minh.

Ir, Nye, Joseph S.1997. *Understanding International Conflict*, Harvard University: Longman.

Starke, G.J., 1954. *An Introduction To International Law, 3rd Edition*, London: Butterworth & Co. Ltd.

Artikel dan Laporan

Chossudovsky, Michel. 2013.*Chossudovsky,2013*, dalam <http://www.globalresearch.ca/operation-libya-and-the-battle-for-oil-redrawing-the-map-of-africa/23605>. diakses 17 Juni 2014

Kawilarang, Renne. 2011. *AS: Libya Masuk dalam Kepentingan Kami*. dalam <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/211729-as--libya-masuk-dalam-kepentingan-kami>. diakses 17 Juni 2014

Haryono Dwi Indro.2007.*Intervensi Kemanusiaan Dalam Konflik Kosovo*. Dalam <http://indronet.files.com/2007/09/kosovo-2.pdf>. diakses 17 Juni 2014

ICISS. 2001. '*The Responsibility to Protect*', *Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*.

Samuel, Raymon. 2013. *Imperialisme Mengincar Mali*. dalam <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20130202/imperialisme-mengincar-mali.html>. Diakses 17 Juni 2014

Rahayu. '*Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional*'. Dalam ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4212/3838. Diakses pada 10 Juni 2014

R2P – A Short History. dalam <http://www.unric.org/en/responsibility-to-protect/26981-r2p-a-short-history>. diakses pada 10 Juni 2014

VOAIndonesia. 2012. *VOAIndonesia, 2012* dalam <http://www.voaindonesia.com/content/sekjen-pbb-dukung-intervensi-di-mali/1555079.html> diakses pada 10 Juni 2014



**PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
DAN KUASA EKONOMI**

Ekonomi Politik Perdagangan Internasional: Sertifikasi Keamanan dan Kualitas Sebagai Kebijakan Standarisasi

Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

Pendahuluan

Perdagangan internasional menjadi janji ‘liberalisme’ untuk memajukan pembangunan sebuah negara secara umum dan kesejahteraan individu secara khusus. Ditambah lagi, para pakar ekonomi melihat adanya ‘invisible hand’ (tangan-tangan tak terlihat) sebagai mekanisme pasar yang menjamin masing-masing pelaku bisnis mendapatkan keuntungan sesuai dengan usaha yang dimaksimalkan -*the matter of productivity and efficiency*. Logikanya, jika produsen memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) diyakini produk yang dihasilkan mampu mencapai akses pasar secara kompetitif.

Namun kenyataannya, era globalisasi menuntut persaingan pasar yang lebih ‘ketat’. Ditambah lagi, perayaan ‘open market’ di negara-negara berkembang dan kemajuan industrialisasi negara-negara maju yang berbasis teknologi tinggi membuat perdagangan internasional seolah rimba yang tidak berujung. Siapa pihak yang kuat akan bertahan, sementara pihak yang tidak mampu berinovasi akan tergusur. Sistem perdagangan memuat serangkaian peraturan dan mekanisme kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dan multi-sektoral.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, masyarakat sebagai konsumen memiliki permintaan yang beragam dalam konteks jenis produk dan lebih spesifik serta detil dalam hal kualitas. Sebagai contoh dalam industri makanan dan minuman, konsumen ingin memastikan bahwa bahan yang digunakan merupakan pilihan para ahli, melalui proses yang higienis, dan sudah sesuai dengan standar kesehatan. Belum lagi, bagi komunitas muslim label ‘halal’ menjadi sebuah kebutuhan.

Sementara, untuk produk kosmetik, terutama impor, masyarakat

pastinya ingin adanya jaminan keamanan dan kualitas. Produk yang dijual diharapkan telah lulus uji laboratorium khusus kulit (*dermatology tested*) dan tidak diujicobakan kepada hewan (*no animal testing*). Dengan kemudahan akses dan keterbukaan informasi serta meningkatnya komunikasi publik, persepsi masyarakat sangat menentukan volume penjualan dan menjadi salah satu tolak ukur perkembangan bisnis secara umum.

Representasi permintaan pasar (*consumer choice*) yang bervariasi mendorong produsen untuk menyesuaikan diri demi bertahan dan berkembang dalam dinamika perdagangan internasional. Semakin produsen mampu memuaskan minat konsumen, semakin besar peluang dan keuntungan yang diperoleh. Oleh sebab itu, hadirnya sertifikasi keamanan dan kualitas (*quality and safety standards*) merupakan bentuk kebijakan standarisasi perdagangan internasional sebagai sebuah kebutuhan sekaligus konsekuensi.

Sertifikasi keamanan dan kualitas sejak lama telah dikenal dalam dunia industri. Kebijakan standarisasi ini hadir sebagai dua sisi koin mata uang. *Pertama*, kebijakan standarisasi melalui sertifikasi keamanan dan kualitas digambarkan sebagai hambatan dalam akses pasar bagi negara berkembang ke negara maju. Seperti yang diketahui bersama, perbedaan geografis, penerapan teknologi, pendidikan masyarakat, dan supremasi hukum sangat mempengaruhi perbedaan penerapan kebijakan standarisasi masing-masing negara.

Kedua, bagi para eksportir terutama perusahaan multinasional, hadirnya sertifikasi mampu menjadi jaminan keamanan dan kualitas produk. Hal ini menjadi peluang bagi pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap citra perusahaan/ produk sehingga berdampak positif bagi perluasan pasar dan peningkatan volume ekspor.

Dengan demikian, tulisan ini hadir sebagai upaya untuk menjelaskan eksistensi sertifikasi keamanan dan kualitas sebagai kebijakan standarisasi yang diakui dalam sistem perdagangan internasional. Implementasi kebijakan standarisasi masing-masing negara dipahami sebagai tantangan dan peluang yang dihadapi para aktor yang bergerak dalam bisnis ekspor-impor, khususnya Indonesia sebagai studi kasus.

Kebijakan Standarisasi Perdagangan: Kepentingan Nasional vs Pasar

Sertifikasi keamanan dan kualitas eksis sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional (*national legislation*) maupun praktik lembaga sertifikasi internasional. Program sertifikasi meliputi standarisasi bagi

sektor pangan, industri manufaktur, sistem administrasi dan manajerial institusi/ perusahaan, maupun pelaku bisnis ritail internasional secara umum. Fenomena ini menjadi fokus pembahasan dilatarbelakangi oleh kesepakatan GATT dan aturan WTO yang mengakui kebijakan standarisasi negara-negara anggota demi melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga, masing-masing negara diperbolehkan menerapkan kebijakan standarisasi dengan tetap memegang prinsip transparansi dan tidak mendiskriminasi mitra perdagangan.

Sistem perdagangan internasional mengenal 2 (dua) jenis sertifikasi keamanan dan kualitas. *Pertama*, sertifikasi yang menjadi bagian dari kebijakan sebuah negara dan telah diakui penerapannya oleh WTO. *Kedua*, sertifikasi yang disosialisasikan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi swasta dan diakui penerapannya oleh pelaku bisnis internasional.

Berdasarkan kesepakatan negara-negara dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kebijakan standarisasi perdagangan internasional diatur dalam “*Agreements on Technical Barriers to Trade/ TBT*” – Persetujuan Hambatan-hambatan Teknis pada Perdagangan. Persetujuan TBT merupakan modifikasi dari lebih lanjut dari hasil Putaran Tokyo (1973-79). Kesepakatan ini memuat regulasi, standar, teknik pengujian, dan prosedur sertifikasi di tingkat domestik yang tidak boleh menjadi hambatan bagi praktik perdagangan internasional.

the TBT Agreement addresses ‘product characteristics or the related process and production methods’ reflected in technical regulations and requires that these regulations conform to basic principles of transparency and non-discrimination. It seeks to ensure that technical regulations and standards, including packaging, marking and labelling requirements, and analytical procedures for accessing conformity with technical regulations and standards, do not create unnecessary obstacle to trade (Dell Aquila & Caccamisi, 2006)

Persetujuan ini menghormati hak-hak anggota untuk menggunakan standar-standar kelayakan tertentu untuk melindungi manusia, hewan, tumbuhan, kesehatan, lingkungan, dan kepentingan konsumen. Namun, persetujuan TBT menganjurkan negara-negara anggota untuk mengacu pada standar-standar internasional dalam menyusun kebijakan nasionalnya, tanpa mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan. Sehingga, dari kacamata hukum internasional, sertifikasi keamanan

dan kualitas yang diterapkan oleh masing-masing negara sifatnya boleh asalkan tidak menjadi kendala bagi akses pasar.

Menurut kesepakatan WTO, persetujuan TBT meminta negara-negara anggota untuk saling mengakui prosedur pengujian standar yang diterapkan di masing-masing negara, sehingga sebelum barang tersebut diekspor, produk tersebut sudah sesuai dengan standar yang diterapkan di negara pengimpor. Dalam rangka membantu kelancaran pelaku bisnis dalam aktifitas ekspor-impor, maka masing-masing negara anggota harus memberikan informasi yang akurat kepada WTO terkait peraturan standarisasi yang berlaku. Sehingga, tujuan awal kebijakan standarisasi adalah untuk perlindungan konsumen dan memberikan kemudahan bagi perdagangan produk domestik dengan tidak mendiskriminasikan produk impor.

Dalam bidang pangan, aturan WTO juga mengatur masalah keamanan dan kualitas produk, yang dikenal dengan persetujuan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS). Ketentuan SPS bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia yang secara khusus meminimalkan dampak negatif perdagangan internasional sesuai dengan kebijakan standarisasi masing-masing negara. Contohnya, di Amerika Serikat (AS), kebijakan kelayakan produk pangan berada pada otoritas FDA, sementara di Indonesia, masalah ini ditangani oleh BPPOM dan Kementerian Kesehatan serta departemen terkait.

Studi kasus tentang implementasi aturan SPS ini pernah menjadi berita hangat WTO pada tahun 2010 dalam sengketa perdagangan unggas antara Cina dan Amerika Serikat (Elin, 2010). Pada tahun 2004, Cina dan AS saling menghentikan impor produk unggas di antara mereka karena merebaknya wabah *avian influenza* (flu burung). Setelah kasus flu burung berakhir, impor produk unggas AS mulai mengalir kembali ke Cina. Namun tidak demikian sebaliknya, AS tetap melarang impor produk unggas dari Cina. AS berdalih bahwa kebijakannya ini telah sesuai dengan aturan WTO dan otoritas perdagangannya meragukan sistem keamanan pangan Cina yang tidak sesuai dengan tingkat perlindungan kesehatan yang ditetapkan AS.

Dalam merespon hal ini, Cina mengajukan panel resolusi perdagangan WTO dan menyatakan AS telah melanggar aturan perdagangan internasional. AS dituduh tidak mengizinkan penilaian ilmiah yang patut tentang keamanan produk unggas masak Cina bagi konsumsi masyarakat

Amerika, yang bahkan beberapa di antaranya berasal dari Amerika sendiri. WTO menerima protes Cina ini dalam laporan penyelesaian perselisihan, dan menyebutkan posisi Amerika tentang 'diskriminasi berdasarkan asal'. Argumen AS yang menyatakan produk Cina memiliki tingkat keamanan unggas yang berbeda dari anggota WTO lain adalah 'hipotetis' serta tidak memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Panel WTO juga menyatakan bahwa rezim perdagangan AS bertindak tidak sesuai dengan aturan SPS dan GATT 1994. Sehingga, Cina memenangkan sengketa perdagangan atas AS.

Dalam sengketa perdagangan antara Cina dan AS, kita bisa menelaah lebih lanjut bahwa penerapan kebijakan standarisasi dalam konteks TBT dan SPS masih diperdebatkan. Demi mempertahankan pendapatan nasional, masing-masing negara berusaha memanfaatkan celah dari aturan perdagangan internasional. Pertimbangan kondisi pasar dan eksistensi para pelaku ekonomi dalam negeri, membuat penerapan sertifikasi perdagangan menjadi tarik ulur kepentingan ekonomi politik negara-negara di dunia.

Sertifikasi keamanan dan kualitas berkembang di dunia sebagai jaminan dalam melindungi konsumen dan kunci akses pasar di luar negeri. Berdasarkan sistem perdagangan internasional, ada 2 (dua) tahapan untuk menilai standart keamanan dan kualitas produk (khususnya pangan) yang dikenal sebagai "*Quality Dimensions and the Supply Chain*" (CARIRI/ INEA dalam Dell Aquila & Caccamisi, 2006)

Pada proses produksi (*pre harvest stages*) dan penjualan (*post harvest stages*), standar kelayakan melekat sebagai atribut sebuah produk dan meliputi kriteria; 1.) Keamanan (*safety*), kualitas (*quality*), pengakuan asal produksi (*produce origin*), metode yang digunakan (*methods of production*), etika ketenagakerjaan (*worker's welfare*), etika perlindungan lingkungan hidup (*environmental issue*), informasi dan dokumentasi-administrasi (*process information and documentation*).

Perbedaan kebijakan standarisasi yang diterapkan masing-masing negara mendorong munculnya badan/ lembaga sertifikasi yang membantu perusahaan/ institusi bisnis untuk bisa menyesuaikan diri. "*Certification bodies are bussiness organizations or, less often, professional bodies or non-profit organizations. (Sometimes the letter exist primarily to offer a particular certification.) Whatever its nature, the certifying body determines the policies of the certification programme.*" (Dell Aquila &

Caccamisi, 2006). Lembaga sertifikasi bertujuan memudahkan masing-masing pelaku bisnis terutama eksportir untuk menyesuaikan sistem perdagangan internasiona dan meningkatkan kelayakan komoditas yang dihasilkan supaya memenuhi permintaan konsumen di level global.

Adapun lembaga sertifikasi swasta yang telah dikenal oleh publik antara lain ISO, BRC, EurepGAP, The Codex Alimentarius, dan organisasi terakreditasi di bawah naungan WTO seperti OIE dan IPPC (Dell'Aquila & Caccamisi, 2006). Secara umum, lembaga sertifikasi telah memiliki pengetahuan kebijakan standarisasi yang berlaku di dunia, keahlian khusus dalam audit, dan hubungan resmi dengan WTO maupun organisasi perdagangan lainnya. Eksistensi lembaga sertifikasi menjadi pertanda kuatnya kebijakan standarisasi masing-masing negara demi melindungi kepentingan domestik sekaligus menjadi tantangan bagi masuknya produk impor.

Implementasi Sertifikasi di Indonesia: SNI dan Label Halal

Pemerintah Indonesia berupaya melindungi masyarakat untuk memperoleh produk berkualitas dan aman untuk dikonsumsi melalui kebijakan *Standar Nasional Indonesia* (SNI). SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) di mana dalam pelaksanaannya dibantu oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (BSN, 2011).

Menurut pemerintah, SNI merupakan implementasi *Good Regulatory Practices* Indonesia. *Good Regulatory Practices* adalah regulasi teknis suatu negara berkaitan dengan pengaturan perdagangan baik produk domestik maupun impor. Peraturan tersebut mewajibkan produk-produk yang

beredar mencantumkan label, komposisi produk, dan tanggal kadaluarsa yang berbahasa Indonesia.

Penerapan SNI tidak melanggar aturan WTO – TBT dan SPS. Sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia, standardisasi diupayakan untuk melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat terhadap aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian lingkungan. Pengaturan standardisasi Indonesia ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong, meningkatkan, dan menjamin mutu barang/jasa serta mampu memfasilitasi produk Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan upaya ini dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di tingkat global (BSN,2011).

Salah satu produk yang telah mendapat standarisasi di Indonesia adalah tempe. Indonesia yang diwakili oleh BSN telah mengajukan usulan *Project Document* mengenai *Standard Regional Codex* untuk tempe. Pada akhirnya, usulan project tersebut disetujui menjadi *New Work of Standard Regional Codex on Tempe* pada Sidang Codex Alimentarius Commission (CAC) ke-34, di Jenewa, Swiss, tanggal, 4-9 Juli 2011, setelah sebelumnya di *review* Sidang Executive Committee ke-65 di Jenewa, Swiss, tanggal 28 Juni – 1 Juli 2011(BSN, 2012). Selain itu, beberapa produk diantaranya semen, ban, pupuk organik, tabung dan selang LPG serta barang-barang elektronik juga wajib memenuhi standar SNI(Kementerian Perindustrian,2012).

Program Gerakan Nasional Penerapan (GENAP) SNI dipahami sebagai strategi Indonesia untuk mencegah banjirnya produk impor. Pada tahun 2012, pemberlakuan SNI secara wajib baru 73 SNI. Sementara itu industri yang telah memegang Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI adalah sebanyak 2.984 perusahaan dengan 1.966 perusahaan merupakan industri dalam negeri. Sedangkan 1.018 perusahaan sisanya adalah perusahaan asing (BSN,2012). Adapun pengawasan terhadap produk-produk perdagangan di Indonesia pada umumnya dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), yang terdiri Direktorat Pengawasan Barang Beredar Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perindustrian (LensaIndonesia.com, 2012)

Selain itu, Indonesia menerapkan ‘sertifikasi halal’ sebagai bentuk penghormatan terhadap konsumen muslim yang merepresentasikan

jumlah populasi terbesar penduduk. Lembaga standarisasi halal di Indonesia berada pada otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berwenang menetapkan sertifikasi halal terhadap suatu produk yang beredar di pasaran. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Pihak yang berkepentingan harus melalui kurang lebih lima tahapan mulai dari pendaftaran hingga uji laboratorium untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI.(LPPOM MUI,2012)

Berdasarkan penerapan sertifikasi SNI, masyarakat sebagai konsumen memiliki nilai tawar dan variabel pembanding dalam membeli kebutuhan sehari-hari, di mana antara produk dalam negeri dan produk impor sulit dibedakan. Inovasi yang ditawarkan melalui kemasan menarik, iklan media massa yang meyakinkan, dan promosi-promosi khusus sering membuai konsumen sehingga kurang jeli dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhan.

Dengan sistem sertifikasi keamanan dan kualitas pangan oleh Kementerian Kesehatan dan BPPOM, masyarakat dapat dilindungi dari oknum pedagang yang mencampur bahan makanan dengan produk tidak halal, kurang higienis, bahkan terkontaminasi dari zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Begitu juga dengan kosmetik, sertifikasi menjamin masyarakat menggunakan produk-produk yang terjamin kualitasnya dan aman untuk dikonsumsi sesuai standar kesehatan di Indonesia. Pemerintah tentunya juga mempunyai dasar hukum dalam melakukan operasi pasar untuk mengamankan masyarakat terhadap produk impor ilegal yang kini marak di pasaran. Sehingga, baik produsen, konsumen, maupun pelaku bisnis ritail di Indonesia mempunyai pengetahuan dan perlindungan hukum dari aktifitas perdagangan internasional yang tidak mudah diprediksi.

Penutup

Struktur perdagangan internasional memang fenomena yang kompleks. Sertifikasi *'safety and quality standards'* menjadi bagian dari kebijakan standarisasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan domestik (baik konsumen maupun produsen) dalam merespon derasnya produk impor. Tanpa mendikotomikan negara berkembang atau negara

maju, memenangkan kompetisi perdagangan internasional menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Sehingga, penyesuaian terhadap implementasi kebijakan standarisasi masing-masing negara menjadi sebuah konsekuensi logis.

Perbedaan penerapan kebijakan standarisasi boleh dipandang sebagai tantangan teknis bagi pelaku bisnis terhadap usaha memperluas akses pasar di luar negeri. Para eksportir pada akhirnya menaruh harapan besar pada lembaga sertifikasi swasta yang dipandang memiliki pengetahuan, keahlian, dan sistem audit di mana dapat menjamin keberhasilan adaptasi dari kebijakan standarisasi yang berbeda-beda tersebut. Selain itu, sertifikasi '*safety and quality standards*' juga diyakini sebagai peluang untuk meningkatkan citra eksportir dalam membangun kepercayaan publik dan menjadi kunci sukses akses pasar di negara-negara maju.

Daftar Pustaka

- Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian.2012. *Daftar Peraturan Peraturan Kementerian Perindustrian*. dalam <http://regulasi.kemenerin.go.id/site/peraturan/7/all/30> diakses pada tanggal 4 Mei 2012
- BSN. 2011. *Penerapan SNI*. dalam http://m.bsn.go.id/index.php/bsn/p_sni. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012
- BSN. 2011. *Tentang Badan Standarisasi Nasional*. dalam <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php> . Diakses pada tanggal 4 Mei 2012
- BSN. 2012. *Kepala BSN Bicara Tentang Standar Tempe di TV One*. dalam http://m.bsn.go.id/index.php?/bsn/keg_detail/4064. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012
- BSN. 2012. *Penetapan Standard Nasional Indonesia Pelaku Industri Harapkan SNI Segera Diterapkan*”. dalam http://m.bsn.go.id/index.php?/bsn/std_detail/4050. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012
- Dell'Aquila dan Caccamisi. 2006. *Agricultural Trade Policy and Food Security in the Caribbean*. *Journal Accessing market opportunities: quality and safety standards*. dalam www.fao.org/docrep/010/a1146e/a1146e05.pdf. Diakses pada tanggal 3 Desember 2015

Elin. 2010. *Cina Menang di WTO* dalam <http://www.poultryindonesia.com/news/internasional/node1437/>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2012

Lensaindonesia.com. 2012. *Wamendag Masih Temukan Banyak Produk-produk Langgar Ketentuan SNI*. Dalam <http://www.lensaindonesia.com/2012/04/05/wamendag-masih-temukan-banyak-produk-produk-langgar-ketentuan-sni.html>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012

LPPOM MUI.2012. *Prosedur Sertifikasi Halal*. Dalam http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=320&lang=in. Diakses pada tanggal 4 Mei 2012

Ruang: Struktur dalam Kuasa Spatial Ekonomi (Mencandra Kota Malang sebagai sebuah Contoh)

Oleh Muhammad Hayat

Ruang secara sosiologis dipahami sebagai pemahaman praktek sosial, munculnya kekuatan institusional dan kompleksitas hubungan hasil dari tafsir tentang interaksi sosial. Tulisan ini mencoba melihat kota di Indonesia sebagai sebuah ruang yang lebih menempatkan relasi ekonomi sebagai wajah interaksi. Kota Malang adalah sebuah kota yang layak untuk dijadikan contoh.

Wajah Malang saat ini laksana melihat etalase yang menampilkan tubuh dengan dandanan *blink-blink* dan gaya yang selalu *catchy*. Keberadaan *Alfamart*, *Alfa Midi*, *Alfa Express* dan *Indomaret*, laksana gadis cantik yang selalu tersenyum dengan sapaan-sapaan khasnya. Kita juga bisa merasakan relaksasi tubuh yang lebih ber-status saat kita singgah dalam ruang etalase yang lebih besar dan lebih mewah. Sebut saja Matos (*Malang Town Square*), MOG (*Malang Olympic Garden*), Ramayana, *MX Mall*, Sarinah, Mitra, dll. Saat perut ingin dimanjakan oleh berbagai variasi makanan enak, jangan pernah khawatir, karena Kota Malang sudah siap memanjakan lidah sang penikmat rasa. *Week End* di luar dan menginap beberapa hari? Beragam hotel, maupun losmen dengan penawaran istimewa siap memberikan pelayanan yang terbaik. Semuanya tersedia dengan mudahnya. Hanya ada satu syarat yang harus dilakukan oleh setiap jiwa yang berhasrat mendapatkan seluruh kesenangan tersebut. Kapital. Itulah *thing* yang harus dimiliki.

Ilustrasi tadi sejatinya memberikan satu gambaran yang sangat jelas tentang kuasa kapital dalam interaksi sosial. Kapital menjadi *thing* yang memaksa keseluruhan relasi tersedot dalam makna yang lebih bersifat kuantitatif. Maksudnya, ukuran relasi adalah jelas tentang tanda material. Tidak ada kapital, tidak ada barang yang bisa singgah di tangan. Tapi jangan khawatir, tanpa kapital kita juga masih diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh penguasa ruang untuk menikmati keindahan ruang tersebut.

Sebut saja Matos. Kita bisa jalan-jalan dengan penuh gaya, pura-pura memilih barang, bertanya sambil seakan-akan mau membeli, lalu pergi tanpa merasa bersalah ke etalase lain. Sang penguasa ruang tidak marah, justru bangga karena “yang tidak punya uang tadi” telah belajar tentang mata kuliah “pengenalan akan barang-barang konsumsi”. Inilah hal yang penting, karena itulah “*stock of knowledge*” baru yang menjadi *chip* yang akan selalu melekat di otaknya. Dalam tradisi Post- Modernisme, telah terjadi perpindahan tentang realitas khayali ke dalam *mind*. Realitas itu akan menumpuk sebagai *chip-chip* kecil di otak, dan sewaktu-waktu siap ditransfer sebagai bentuk tindakan nyata, yaitu “siap belanja saat sudah punya uang”.

Gagasan dari beberapa pemikir Post-Modern berikut akan digunakan untuk mencandra tentang fenomena *space* tersebut. Menurut Henry Lavebre, ruang dipahami sebagai alat untuk mengontrol. Konteks mengontrol lebih merujuk pada pengambil kebijakan. Oleh karena itu, perencanaan ruang adalah hasil gagasan yang harus bisa dibuktikan dalam ruang praktik. Hal tersebut bertujuan agar fungsi kontrol bisa berjalan maksimal. Berkelindannya mereka yang diberi amanah untuk mengatur kota, seperti eksekutif, yudikatif maupun legislatif seringkali menjadi pemandangan jamak. Ketok palu sebuah keputusan yang merugikan masyarakat berkaitan dengan “*space*” adalah hal yang biasa terjadi. Pola-pola perubahan ruang seperti itu terlihat dengan cukup jelas di Kota Malang. Berubahnya wajah pasar tradisional seperti Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo menjadi pusat perbelanjaan mewah yang diawali dengan konflik adalah sebagian bukti dari wajah kontrol penguasa.

Kontrol dalam konteks ruang merujuk pada batasan yang bersifat sosial maupun ekonomi. Batasan secara sosial bisa ditafsir sebagai lahirnya aturan-aturan dalam bentuk teks maupun non teks. Teks merujuk pada fungsi penguasa secara administratif. Sebagai contoh, ketika pemerintah membangun *mall*, implikasi logisnya adalah *mall* akan menjadi pusat hubungan sosial baru dalam ritme ekonomi. Benturan “*interest*” diantara aktor adalah hal yang jamak terjadi. Itulah saat teks administratif menjadi batasan tentang bagaimana relasi harus dilakukan. Sementara non teks adalah *social fact* yang diproduksi oleh aktor dikarenakan menurunnya *power* pemilik ruang. Munculnya preman maupun pekerja seks komersial adalah bukti telanjang manifestasi *social fact* tersebut.

Batasan dalam konteks ekonomi bisa dipahami sebagai pembelajaran

tentang “ruang ekonomi” sebagai gagasan yang pada akhirnya mewujud dalam konteks tindakan. Inilah saat keseluruhan aktor dalam “*space*” berebut untuk memaksakan *interest*-nya masing-masing. Sebagai contoh, munculnya MOG (Malang Olympic Garden) akan berhubungan dengan kalkulasi keuntungan yang besar. Pemerintah bisa melakukan redefinisi ulang tentang kenaikan pajak bangunan, pajak reklame, pajak parkir, dan lain sebagainya. Sementara, masyarakat bawah akan menafsir seluruh ruang sebagai cara mendapatkan kapital. Pemandangan jamaknya adalah pedagang kaki lima, anjal, kesemrawutan lalu lintas, dan lain sebagainya.

Satu hal yang dikhawatirkan Karl Marx terjadi disini, yaitu *stock of knowledge* setiap aktor akan hanya dipenuhi dengan pembelajaran tentang materi. Tidak ada ruang singgah buat “yang sosial”. Seluruhnya adalah tentang ekonomi. Kondisi yang hampir sama saat Karl Marx menafsir ruang setelah revolusi industri. Ruang pusat hubungan sosial berubah menjadi ruang pusat hubungan ekonomi. Di pojok-pojok Matos, MOG, MX Mall, Alfamart, Indomaret semuanya sedang belajar tentang “kalkulasi”. Semuanya sedang belajar tentang *logic of capital*.

Ruang adalah kekuatan institusional, oleh karena itu menjalin relasi dengan pemilik kapital merupakan cara yang seringkali digunakan untuk semakin menguatkan basis struktur. Dalam konteks sosiologi, struktur dipahami sebagai kekuatan kelompok sosial, yang akan menguat manakala institusi juga semakin kuat. Institusi lebih dipahami sebagai jauh dekatnya jejaring sosial yang dilakukan oleh kelompok sosial. Semakin dekat jejaring maka semakin kuat struktur tersebut, sementara semakin jauh jejaring, semakin lemah struktur masyarakat tersebut. Konteks jejaring akan berimplikasi pada “*value*” yang diproduksi oleh struktur tersebut.

Kita bisa melihat antara penguasa kota dengan pemilik modal punya begitu banyak unsur untuk bisa mendekatkan jejaring. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kedekatan status dan peran yang mereka miliki. Dalam pandangan George Herbert Mead, implikasi relasi antar aktor tidak bisa dilepaskan dari peran dan status yang mereka miliki. Semakin dekat status dan peran, maka jejaring sosial akan semakin mendekat. Fase kedekatan status dan peran akan berdampak pada semakin besarnya kekuatan institusional. Pada akhirnya mereka bukan berdiri sendiri sebagai pemilik modal atau penguasa kota, tetapi bermetamorfosa sebagai sebuah struktur yang membentuk “*value*” bersama bagi kepentingan struktur.

Fase berkelindannya penguasa dengan pemilik kapital menjadi sebuah struktur akan semakin memberi keleluasaan bagi mereka untuk melakukan pembajakan “*space*”. Itulah yang disebut sebagai praktik spatial. Praktik spatial bisa berjalan dengan efektif tidak bisa dilepaskan dari kemampuan *state* (penguasa kota) memproduksi teks. Althusser menyebutnya sebagai kemampuan *state* memproduksi RSA (*Repressive State Apparatus*) dan ISA (*Ideological State Apparatus*). Lewat tangan apparatus, *state* menyebarkan ideologi. Dalam bahasa Althusser, birokrasi terlanggengkan kekuatannya lewat kemampuan aparat untuk melanggengkan kekuasaannya. *State of Apparatus* merupakan pernyataan penting Althusser manakala melihat kekuatan hegemonik negara yang dilanggengkan oleh kerja-kerja apparatus negara. Kerja apparatus menjadi lebih efektif dikarenakan apparatus punya kemampuan untuk menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik. Selain itu, efektifitas apparatus tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya untuk memproduksi ideologi .

Kekerasan oleh apparatus biasanya dijalankan dengan memproduksi aturan birokrasi untuk kepentingan mereka. Aturan pada dasarnya adalah cara sebuah rejim untuk melakukan represi terhadap masyarakat. Dari titik inilah, Althusser melihat bahwa kemampuan sebuah *state* atau negara memproduksi aturan administratif pada dasarnya adalah kemampuan negara untuk melakukan represi terhadap masyarakatnya. Aturan yang dipaksakan oleh *state* muara akhirnya adalah ideologisasi *state* terhadap masyarakat.

Tafsir sosiologis dari kondisi tersebut, pada akhirnya negara cuma milik sekumpulan individu atau kelompok sosial tertentu yang mempunyai struktur sosial sendiri dengan nilai-nilai yang diproduksi sendiri dan melibatkan jejaring sosial dari kelompok sosialnya sendiri. Struktur merujuk pada pola interaksi tertentu yang lebih kurang lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi-relasi sosial hirarkis dan pembagian kerja tertentu dan ditopang oleh kaidah-kaidah, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai budaya (Veeger, 1992:51). Apa yang dikatakan oleh Karel J. Veeger menunjukkan jika struktur pada dasarnya merupakan kerangkeng yang sudah punya otorisasi sendiri. Merujuk pada Veeger, Kota Malang sebagai *space* adalah struktur yang sudah punya otorisasi sendiri, yaitu otorisasi penguasa *space*.

Negara yang dipahami sebagai struktur dari kelompok sosial

tertentu, berimplikasi pada nilai-nilai yang diproduksi dan jejaring sosial yang terjadi adalah cuma milik kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu kelompok sosial tersebut berkepentingan untuk sebanyak mungkin memproduksi aturan demi tercapainya tujuan kelompok lewat kemampuan menjalankan kerja ideologi.

Menurut Althusser, ideologi menginterpelasi individu sebagai subjek (Donny Gahral Adian, 2011:70). Interpelasi adalah penyapaan tentang individu sebagai subjek. Saat individu disapa, seolah-olah individu tersebut adalah subjek yang otonom. Contoh dalam kasus pembangunan *Mall Dinoyo*, pedagang yang dijanjikan bedak seakan-akan adalah individu yang otonom. Pada kenyataannya ruang yang nantinya mereka tempati telah memiliki teks ekonomi dan teks sosialnya sendiri yang sudah diatur sedemikian rupa oleh penguasa teks. Inilah fase dimana pedagang harus mau belajar dan adaptif tentang ruang yang digagas penguasa.

Objek sebagai contoh adalah *Mall Dinoyo* menjadi objektif saat itu sejatinya objek telah mengkerangkeng subjek dalam nilai, *custom*, *more*, maupun tata-aturan bersama yang harus diamini bersama. Ketika *space* tentang Pasar Dinoyo sebagai objek sudah menjadi objektif saat itu sejatinya pedagang sebagai subjek telah terkerangkeng oleh nilai-nilai objek yang sudah menjadi objektif tersebut yang harus juga diamini bersama teks atau aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa ruang. Dari sini terlihat jika *represifitas* dari aparatus negara melalui alat ideologi telah menghasilkan struktur sosial yang memuat nilai-nilai dengan jejaring sosial untuk kelompok sosial yang ada di dalam struktur sosial tersebut. Saat ruang dirubah semauanya sendiri oleh penguasa ruang, aktor lain sudah tidak punya kekuatan untuk menafsir secara lain. Hal tersebut dikarenakan ruang sudah berubah dan diamini bersama antara penguasa dengan pedagang. Inilah fase dimana ruang alamiah telah berubah menjadi ruang abstrak.

Menurut Henry Lavebre, ruang abstrak merupakan hasil pemaksaan gagasan oleh penguasa ruang terhadap struktur di bawahnya. Matos, MOG, Hotel, *Alfamart*, *Indomaret*, dll adalah wajah abstrak kota yang mempunyai otorisasi sendiri. Sementara, tafsir David Harvey tentang ruang merujuk pada dekonstruksi tentang waktu dan space. Dalam *time-space compression*, Harvey menyatakan bahwa ruang adalah dominasi pemilik kapital yang bisa mengutak-atik ruang sesuai dengan seleranya. *Compression* merujuk pada efisiensi *space*. *Space* harus bisa memberi

keuntungan yang sangat luar biasa bagi pemilik kapital. Oleh karena itu, kota harus efisien. Salah satu caranya adalah bangunan di kota harus bisa difungsikan untuk berbagai macam kepentingan. Bisa difungsikan untuk tempat tinggal, hotel, kantor, pusat rekreasi, dsb. Fungsi utama *space* adalah kapital.

Implikasinya, terjadi perubahan struktur secara ekstrem. Wajah ruang alamiah yang lebih menitikberatkan pada “menghasilkan kebudayaan yang merupakan proses pembelajaran dari alam sekitar” berubah menjadi “menghasilkan kebudayaan yang mengambil, menjiplak, dipaksa, dan ikut-ikutan dengan kebudayaan yang justru menghilangkan jejak identitas sekitar”. Etalase hotel, *mall*, *café*, MTV adalah etalase tentang *grand narrative* (narasi besar kebudayaan) yang memperpendek waktu dan *space*. Jarak sebagai implikasi geografis pada akhirnya hilang saat fase “*compression*” adalah legitimate.

Kota Malang mulai menunjukkan indikasi tersebut. Bersumber dari buku panduan wisata yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1
Data Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan

Hotel	Restoran	Tempat Hiburan	Travel
73	209	42	112

Jumlah pusat perbelanjaan di Malang ada sekitar 10 buah. Jumlah tersebut belum termasuk *Alfamart* dan *Indomaret* . Bersumber dari Surya On Line jumlah gerai *Alfamart* di Malang Raya pada tahun 2013 sekitar 180. Jika kita asumsikan jumlah *Alfamart* di Kota Malang adalah 50% dari keseluruhan jumlah *Alfamart* di Malang Raya, ada sekitar 90 gerai *Alfamart* yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Malang. Jika diasumsikan jumlah gerai *Indomaret* sampai dengan tahun 2013 sekitar 200 buah. Jika kita asumsikan jumlah *Indomaret* di Kota Malang adalah 50% dari keseluruhan jumlah *Indomaret* di Malang Raya, ada sekitar 100 gerai *Indomaret* yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Malang. Angka-angka dalam wajah etalase tersebut belum termasuk komunitas berpagar maupun *cluster* yang menjadi bagian dari gaya hidup baru masyarakat Malang.

Luas kota Malang adalah 110,06 km persegi. Sementara jumlah

penduduk sampai tahun 2013 diperkirakan sebanyak 920.003 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 5 Kecamatan. Angka tersebut jika diasumsikan dibagi rata berdasarkan 5 Kecamatan, dalam setiap Kecamatan jumlah penduduk sekitar 184.000 jiwa. 184.000 jiwa tersebut diasumsikan menempati 22,012 km persegi. Jika di rata-rata per kilo meter, kepadatan penduduk di kota Malang dalam 1 km persegi mempunyai kepadatan 8359 jiwa. Ini artinya dalam 1 m persegi ditempati sekitar 8 penduduk.

Tingkat kepadatan tersebut mengindikasikan jika *space* dalam kontak relasi sosial tidak memberi kesempatan bagi terproduksinya ruang dalam wajah alamiah. Masyarakat pada akhirnya juga belajar mengabstraksikan ruang. Tentunya abstraksi dalam *space* dengan muatan ekonomi. Dalam titik ini, sejatinya setiap ruang oleh setiap individu dipahami sebagai penanda faktor produksi. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari semakin tercerabutnya *space* dari pusat hubungan sosial menjadi pusat hubungan ekonomi. Implikasinya adalah sengketa agraria berkaitan dengan tanah menjadi pemandangan jamak. Baik antar anggota masyarakat maupun anggota masyarakat dengan pengambil kebijakan atau penguasa kota.

Space yang secara spesifik dipahami sebagai tanah pada akhirnya dilekatkan sebagai penanda status. Gagasan *time-space compression* dari David Harvey sejatinya setali tiga uang dengan fase saat masyarakat masih berada dalam fase feodal. Yaitu fase dimana tanah adalah penentu simbol status. Satu kesimpulan yang sama, *space* pada akhirnya adalah alat legitimate bagi kelompok status.

Sementara jumlah etalase dalam wajah konsumsi adalah penanda tentang bagaimana realitas mistis atau khayali menjadi bentukan baru cara manusia berperilaku sosial. Ada sekitar 200 pusat perbelanjaan dari skala *minimarket* sampai dengan *supermall*. Merekam jejak bagaimana realitas khayali melakukan praktik *spatial*, kita bisa menggunakan data tersebut berdasarkan asumsi rata-rata per 1 km persegi. Luas kota Malang adalah 110, 06 km persegi, itu berarti dalam setiap 1 km persegi ada sekitar 1,8 pusat perbelanjaan. Dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8359 per km persegi, angka ini menunjukkan jika ruang relasi setiap jiwa dengan penanda konsumsi adalah dekat.

Mereka berdesak-desakan dan satu sama lain sepertinya tidak punya ruang sebagai *privacy*. Makna sosiologisnya adalah jarak geografis telah

berubah menjadi jarak dekat dan jarak intim. Dalam tafsir sosiologis, jarak intim adalah jarak dimana subjektivitas antar mereka yang berelasi telah menjadi nilai bersama. Penanda konsumsi mereka makna juga sebagai sesuatu yang subjektif. Makna sosiologisnya adalah penanda konsumsi adalah bagian yang pada akhirnya tidak bisa dipisahkan dari tindakan keseharian kita. Meminjam istilah Frederich Jameson, inilah kapitalisme dalam tahap kedua yang telah bergerak dan berubah menjadi imperialisme (George Ritzer, 2011). Penandaan utamanya adalah uniformitas atau keseragaman industri. Alfamart, Indomaret, Giant, Matos, MOG, adalah penanda imperialisme. Mereka seragam dan dengan mudahnya bisa hadir begitu dekat dan masuk sebagai *thing* yang merusak dan melenyapkan ruang lokalitas. Imperialisme adalah fase dimana *space* telah menyeragamkan seluruh isi *space*.

Bagaimana imperialisme dalam *space* yang seragam melakukan praktik spasial. Mereka merubah *space* dari jarak geografis menjadi jarak sosiologis. Jarak geografis lebih menekankan pada *space* sebagai ruang vakum. Misalnya dalam *space* ada tumbuhan, binatang, manusia yang bergerak dalam ruang alamiah. Sementara jarak sosiologis merujuk pada relasi antar aktor. Ada “kepentingan” yang dipertaruhkan. Ada empat model jarak secara sosiologis, yaitu jarak publik, jarak sosial, jarak dekat dan jarak intim. Jarak publik dipahami sebagai interaksi yang bersifat *by one traffic*, maknanya interaksi hanya berjalan satu arah. Dengan kata lain ada struktur yang lebih mengendalikan. Imperialisme lewat kekuatan uniformitas adalah struktur yang mengendalikan. Mereka mengendalikan *space* dalam bentuk perayaan konsumsi. Pada akhirnya setiap jiwa merasa harus ikut arus dalam perayaan tersebut. Yang tidak ikut akan dipahami sebagai udik atau ketinggalan jaman. Ada ketundukan pada struktur.

Jarak sosial merujuk pada relasi yang dibatasi oleh norma maupun aturan masyarakat. Jika kita tarik dalam konteks *space*, sang penggagas ruang justru menggunakan jarak sosial sebagai cara untuk membedakan anggota masyarakat berdasarkan posisi atau kelas sosial. Perbedaan ini berimplikasi pada lekatan benda-benda konsumsi yang harus dipakai oleh setiap orang dalam status sosial yang berbeda. *Space* pada akhirnya adalah ruang pameran bagi kelompok sosial dan ruang mengidentifikasi diri berdasarkan kelompok sosial.

Tindakan aktor berdasarkan identitas kelompok sosial yang sudah dirakayasa oleh pemilik *space* pada akhirnya menempatkan actor

bukan sebagai subjek. Meminjam istilah zizek dia hanyalah subjek terberi yang hanya merasa sebagai subjek karena penyapaan atau interpelasi yang digagas oleh penguasa ruang (pemilik capital). Pada akhirnya seluruh thing yang menjadi penanda status adalah sesuatu yang bersifat mistis. Meminjam istilah Erving Goffmann, telah terjadi *mistifikasi* benda-benda penanda konsumsi oleh “Sang Subjek Terberi”.

Fase mistis pada dasarnya adalah fase dimana benda seakan-akan begitu sangat dekat dengan diri kita, tetapi sejatinya “sang benda” berada sangat jauh dari kita. Oleh karena itu benda tersebut akan kita cari dan cari lagi. Benda konsumsi pada akhirnya menjadi “Tuhan” baru. Seberapa banyak dari kita yang merasa begitu hampa dan galau, saat barang-barang penanda konsumsi hilang atau tidak bisa kita dapatkan. *Space* dalam rekayasa *spatial* pada akhirnya adalah struktur yang menghantam ruang kesadaran kita. Semoga kita terhindar dari itu.

Daftar Pustaka

- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Malang, Buku Panduan Wisata
- Adian, Donny Gahral. *Setelah Marxisme*. 2011. Penerbit Koekoesan: Jakarta
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. 2011. Kencana Predana Media Group: Jakarta
- Surya Online. 2013. dalam surabaya.tribunnews.com/2013/01/27/2013. diakses 15 Desember 2015 (08.20).
- Veeger, Karel J. *Pengantar Sosiologi*. 1992. APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.



**PEMIMPIN OPINI, GERAKAN
SOSIAL, DAN IDENTITAS
MASYARAKAT MODERN**

Tantangan Pemimpin Opini dalam Sistem Komunikasi Pedesaan Antara Kesaktian Mbah Maridjan Versus Kedigdayaan Teknologi Komunikasi

Oleh Winda Hardyanti

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sejumlah program pemerintah yang didifusikan kepada masyarakatnya. Adakalanya program-program tersebut berupa sebuah inovasi, alias sesuatu yang benar-benar baru atau sesuatu yang sudah lama ada namun dianggap baru oleh masyarakat setempat. Sebuah program baru atau inovasi yang benar-benar baru ini tak jarang harus mengalami sejumlah tantangan ketika mengalami proses pendifusian atau yang lebih populer disebut sebagai proses difusi inovasi. Terlebih jika program-program baru ini diberikan pada masyarakat pedesaan yang memiliki karakter khas, misalnya berada di lokasi terpencil, *low literated* atau kurang berpendidikan, sarana komunikasinya masih melalui jalur-jalur tradisional, dsb.

Ketika program-program baru tersebut mengalami proses difusi inovasi, tentu banyak pihak atau hal yang harus dilibatkan. Salah satu pihak yang berperan besar dalam proses difusi inovasi ini adalah pemimpin opini atau biasanya disebut sebagai *opinion leader*. Pemimpin opini itu tidak selalu harus pejabat, pamong desa atau orang-orang yang menduduki posisi struktural (meskipun tak dapat dipungkiri orang-orang yang menduduki posisi struktural memiliki potensi besar untuk menjadi *opinion leader*). Bisa jadi yang menjadi *opinion leader* ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat karena tingkat pendidikannya yang tinggi, memiliki hubungan sosial yang baik di masyarakat atau orang-orang yang dihormati atau dituakan oleh masyarakat setempat.

Selain berupa program-program pemerintah, kedigdayaan *opinion leader* ini bisa kita lihat pada sejumlah fenomena lain. Seperti misalnya

fenomena almarhum Mbah Maridjan. Mbah Maridjan adalah tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat di sekitar lereng Merapi. Status sosialnya sebagai juru kunci Merapi memang membuatnya terlihat 'sangat sakti'. Apa yang diucapkan oleh Mbah Maridjan ini bahkan melebihi *power* yang dimiliki pemerintah ketika turun instruksi pemerintah agar masyarakat lereng Merapi segera mengungsi.

Dalam dunia sistem komunikasi, tindakan warga yang lebih percaya pada Mbah Maridjan daripada instruksi pemerintah ini menjadi bukti bahwa kekuatan *opinion leader* itu nyata. Bisa saja para *opinion leader* ini tidak menempati posisi struktural namun apa yang ia sampaikan justru lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak yang menduduki jabatan struktural. Menurut Laswell, komunikasi merupakan sebuah sistem yang didirikan oleh berbagai unsur, salah satunya adalah "*who*" (atau komunikator, pemberi pesan). Tidak semua komunikator (unsur "*who*") membawa efek pesan yang sama (Cangara, 2009).

Pemimpin Opini dan Karakteristiknya

Pemimpin opini mulai *booming* dan menjadi perbincangan dalam kajian komunikasi pada era 1950-1960an. Sebelum era itu, istilah *opinion leaders* atau pemimpin opini lebih sering disebut dengan istilah *influencers*, *tastemakers* atau istilah-istilah lain sejenis. Bisa dibayangkan *opinion leaders* pada masa itu lebih dikenal di masyarakat pedesaan. Tingkat melek media yang masih rendah dan tingkat pendidikan masyarakat desa yang belum tinggi membuat masyarakat cenderung untuk mengedepankan informasi dari orang-orang yang mereka percaya, dalam hal ini pemimpin opini. Meski tingkat melek media mereka rendah namun kebutuhan akan informasi di pedesaan pada dasarnya tidak berbeda dengan masyarakat di kelas-kelas lainnya. Kebutuhan informasi masyarakat pedesaan diterima dari mereka yang memiliki tingkat pemahaman lebih terhadap informasi.

Secara garis besar, *opinion leader* dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah Pemimpin Opini Aktif (*Opinion Giving*). *Opinion leader* aktif adalah *opinion leader* yang sengaja mencari penerima atau *follower* untuk mensosialisasikan sebuah informasi. Misalnya adalah *opinion leader* pada program Keluarga Berencana (KB). Untuk masyarakat yang masih awam dengan inovasi tentang pembatasan kelahiran, maka dibutuhkan peran aktif *opinion leader* untuk memberikan informasi

sejelas-jelasnya dan memberikan pengaruh pada para penerima dalam hal ini calon reseptor KB. Jenis *opinion leader* yang kedua adalah *opinion leader* pasif atau disebut sebagai *opinion seeking* (Anggia, 2012). Dalam hal ini penerima lah yang aktif mencari informasi dari *opinion leader*. *Opinion leader* adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan.

Menurut Everett M Rogers, *opinion leader* memiliki sejumlah karakteristik; (1) lebih tinggi pendidikan formalnya dibanding dengan anggota masyarakat lainnya, (2) lebih tinggi status sosial ekonominya, (3) lebih inovatif dalam menerima dan mengambil ide baru, (4) lebih tinggi pengenalan medianya (*media exposure*), (5) kemampuan empatinya lebih besar, (6) partisipasinya lebih besar, dan (6) lebih kosmopolit (mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas) (Rogers dan Shoemakers, 1983).

Pada umumnya ciri-ciri yang melekat pada *opinion leader* tidak harus melekat pada para pemimpin desa. Ada beberapa faktor yang membuat orang-orang yang tidak menjadi pemimpin desa justru menjadi pemimpin opini atau *opinion leader*. Salah satu keunggulan *opinion leader* dibanding dengan masyarakat kebanyakan adalah *opinion leader* lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Menurut Homas (1961), “Seorang yang memiliki status sosial yang tinggi (pemimin pendapat) akan senantiasa memelihara nilai-nilai serta norma kelompoknya sebagai syarat minimal mempertahankan statusnya.”

Peran dan Tantangan Pemimpin Opini dalam Sistem Komunikasi Pedesaan

Difusi inovasi menurut Rogers merupakan sebuah proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi dikembangkan secara perlahan-lahan melalui sebuah proses konstruksi sosial (Severin dan Tankard, 2005:247). Dari kalimat tersebut dapat diartikan bahwa sebuah proses difusi inovasi berinti pada proses komunikasi menyampaikan informasi. Informasi tersebut berupa sebuah inovasi yang dikembangkan secara perlahan-lahan dalam sebuah bentukan konstruksi sosial pada masyarakat.

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971:17) makna difusi lebih diartikan pada proses dimana sebuah inovasi disebarkan kepada anggota dari sebuah sistem sosial. Proses penyampaian informasi berupa inovasi

tersebut dapat dilakukan melalui berbagai sumber. Sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai saluran penyampai inovasi diantaranya adalah pamong desa, media massa, petugas penyuluhan maupun orang yang dekat dengan individu atau masyarakat.

Difusi inovasi terjadi dalam suatu sistem sosial. Dalam suatu sistem sosial terdapat struktur sosial, individu atau kelompok individu, dan norma-norma tertentu. Berkaitan dengan hal ini, Rogers (1971:148) menyebutkan adanya empat faktor yang memengaruhi proses keputusan inovasi. Keempat faktor tersebut adalah: 1) struktur sosial (*social structure*); 2) norma sistem (*system norms*); 3) pemimpin opini (*opinion leaders*); dan 4) agen perubah (*change agent*).

Opinion leader menjadi salah satu unsur yang sangat mempengaruhi arus komunikasi. Tak terkecuali di kawasan pedesaan. Bisa dibayangkan berbagai perubahan dan kemajuan masyarakat sangat ditentukan oleh *opinion leader*. Peran pemimpin opini adalah memotivasi masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan. Meskipun demikian, bukan berarti *opinion leader* adalah manusia yang serba tahu akan segala hal. Namun dalam hal menjalankan perannya, *opinion leader* memang memiliki kelebihan yaitu dianggap sebagai orang yang lebih peka dan *in group* serta tahu adat kebiasaan masyarakat setempat. Jiwa sosial mereka tinggi dan siap membantu proses perubahan sosial di lingkungannya.

Meski *opinion leader* memiliki peran yang cukup penting, tapi di wilayah pedesaan, tiap-tiap *opinion leader* akan menghadapi tantangan tersendiri. Ada suatu kecenderungan di kawasan pedesaan bahwa masyarakat desa umumnya lebih cenderung untuk berkomunikasi dengan orang yang tingkat pendidikan hampir setara, dalam kata lain mereka akan memilih berkomunikasi dengan orang yang tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi. Misalnya saja mereka akan memilih untuk berkomunikasi dengan orang-orang tamatan SD atau SMP daripada berkomunikasi dengan lulusan perguruan tinggi. Everett M. Roger dan Shoemaker pernah menuliskan bahwa bahwa orang-orang yang paling tinggi status sosialnya dalam sistem sosial jarang sekali untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang yang paling rendah status sosialnya.

Menjadi *opinion leader* khususnya di kawasan pedesaan memiliki karakteristik tersendiri. Adakalanya orang-orang yang menjadi *opinion leader* tidak selalu orang yang memiliki jabatan struktural. Bisa jadi yang menjadi *opinion leader* adalah orang yang dituakan atau tetua adat. Seperti

yang penulis sampaikan di awal, *opinion leader* memang lebih berperan di kawasan pedesaan. Lingkungan ini cenderung masih tradisional dan minim akses media. Hal ini tentu berbeda dengan daerah perkotaan yang lebih modern dan akses terhadap media lebih tinggi.

Contoh yang sederhana adalah kasus Mbah Maridjan. *Opinion leader* yang ada di desa seperti tetua adat, tentu bukanlah orang yang serba tahu. Akan tetapi, mereka diakui oleh masyarakatnya sebagai orang yang peka dan *in group* terhadap berbagai permasalahan yang ada di desanya, seperti yang sudah penulis kemukakan diatas. Secara relatif mereka adalah tempat meminta pendapat dan nasihat para warga. Mereka juga dapat memengaruhi sikap dan tingkah warga untuk bertindak dalam cara tertentu (Nurudin, 2007:166-169).

Alasan lain yang menyebabkan *opinion leader* begitu dihormati dan ditaati oleh para warganya adalah status sosialnya yang tinggi. Dengan status ini, ia akan selalu memelihara nilai-nilai serta norma-norma kelompoknya sebagai syarat minimal untuk memelihara statusnya (Homans, 1961, dalam Nurudin, 2007:161-162). Dalam kasus Mbah Maridjan, titah dari Sri Sultan HB IX untuk menjaga Merapi adalah status sosial tersebut. Sangat wajar bila kemudian status tersebut dipertahankan sampai titik darah penghabisan.

Dalam penelitian Van de Ban (1963) di Belanda menemukan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh pemuka pendapat cenderung diikuti oleh masyarakat. Pemuka pendapat mempunyai gradasi homofili yang lebih baik dibanding dengan pihak lain. Homofili artinya suatu tingkat dimana pasangan individu yang berinteraksi sepadan dalam hal tertentu, seperti suatu kepercayaan, nilai-nilai, pendidikan dan status sosial. Homofili kebalikan kata dari heterofili. Jika homofili dalam sistem sosial itu tinggi, maka komunikasi akan sangat mudah untuk dilakukan, tapi heterofili suatu interaksi dalam berkomunikasi yang belum mempunyai dasar dalam bentuk kepercayaan untuk melakukan hal tersebut (Umri, 2008)

Di berbagai belahan dunia lain, perkembangan teknologi komunikasi adalah musuh dari *opinion leader*, tak terkecuali *opinion leader* di pedesaan. Akses teknologi komunikasi yang makin mudah mengubah pola interaksi antara masyarakat dengan *opinion leader*. Hubungan yang awalnya intim, perlahan tapi pasti mulai tergantikan dengan adanya teknologi komunikasi. Hal ini menjadi tantangan yang perlu dicermati oleh *opinion leader* khususnya yang berada di kawasan pedesaan.

Keterlibatan Pemimpin Opini dalam Pencapaian Keberhasilan Proses Difusi Inovasi

Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan sejumlah analisis mengenai keterlibatan pemimpin opini dalam proses difusi inovasi pada beberapa program pemerintah. Penulis akan mengangkat dua program pemerintah yang cukup sukses salah satunya berkat peran serta dari pemimpin opini. Program pertama adalah program konversi minyak tanah ke LPG. Beberapa tahun lalu, penulis pernah melakukan penelitian langsung mengenai sejauh mana keterlibatan atau peran serta pemimpin opini dalam proses difusi inovasi program.

Penelitian tersebut mengambil objek penelitian di sebuah kawasan pedesaan tepatnya di Desa Durung Banjar, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dalam data peta persebaran kemiskinan yang penulis peroleh dari Bakesbanglinmas setempat, desa Durung Banjar ini merupakan salah satu desa termiskin di Sidoarjo. Karakter masyarakat pedesaan di kawasan ini cukup khas, rata-rata mereka hanya berpendidikan setingkat SD, pola komunikasi tradisional, tidak gampang percaya pada hal baru dan sangat tergantung dengan apa kata pemimpin opini (menurut hasil penelitian diketahui bahwa pemimpin opini di daerah tersebut adalah pamong desa). Program pemerintah kedua yang akan penulis analisis adalah program keluarga berencana.

1. Kasus Konversi Minyak Tanah Ke LPG

Masyarakat di Desa Durung Banjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa responden yang menjadi subjek penelitian memilih ketua RT sebagai sumber informasi pertama. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar 62 %. Ketua RT adalah orang pertama yang terlintas dalam benak 62% responden ketika ditanya darimana info pertama mengenai program konversi minyak tanah mereka peroleh.

Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa sebagai salah satu pamong desa, ketua RT adalah pihak yang paling dekat dengan warga saat proses sosialisasi. Analisis ini diperkuat dengan adanya temuan data yang mengungkapkan bahwa ketua RT menjadi pihak pertama yang menjadi rujukan sumber informasi. Ketika ketidaktahuan terhadap program konversi melingkupi diri responden, sekitar 75% dari total responden mencari tahu kepada ketua RT (Hardyanti, 2008).

Berdasarkan teori difusi inovasi dapat dikatakan ketua RT merupakan

pamong desa yang memiliki fungsi sebagai opinion leader. Dalam proses penyebaran inovasi, model *two step flow* mengungkapkan bahwa pesan tidak seluruhnya langsung mengenai audiens. Dalam model ini dikenal banyak pihak-pihak tertentu yang membawa pesan dari sumber informasi (agen pembangunan) untuk diteruskan kepada masyarakat. Pihak-pihak tertentu tersebut dikenal dengan opinion leader (pemimpin opini/pemuka pendapat). (Nurudin,2004:152). Ketua RT memiliki kualifikasi sebagai *opinion leader* bagi responden.

In general, when opinion leaders are compared with their followers we find that they (1) are more exposed to all forms of external communication, (2) are more cosmopolite, (3) have higher social status, and (4) more inovative.(Rogers and Shoemaker, 1971:35).

Sesuai dengan ciri *opinion leader* yang dikemukakan oleh Rogers dan Shoemaker, jika dibandingkan dengan pengikutnya, ketua RT memang memiliki kualifikasi memadai sebagai seorang opinion leader. Ketua RT adalah orang yang menjadi perpanjangan tangan dari pamong desa untuk menyampaikan informasi pada masyarakat selain petugas penyuluhan. Selain itu dalam hubungan sosial, unsur homofili juga bisa dilekatkan pada hubungan antara ketua RT dengan responden. Namun dalam hal inovasi bersifat heterofili. Sehingga komunikasi antara responden dan ketua RT bisa terjalin secara efektif.

Sifat hubungan yang dimiliki ketua RT dengan masyarakat tentu berbeda dengan petugas penyuluhan. Ketua RT lebih memiliki nilai-nilai yang memiliki kadar relatif sama dengan masyarakat yang menjadi responden. Berbeda dengan petugas penyuluhan yang umumnya didatangkan dari luar komunitas masyarakat tersebut. Sehingga dalam kasus difusi inovasi program konversi minyak tanah di daerah Desa Durung Banjar, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini, ketua RT memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi opinion leader dibandingkan petugas penyuluhan.

“ For instance, opinion leaders who are sought for information about innovations are usually somewhat more innovative in adopting new ideas than their followers, yet the leaders are seldom innovators, the very first to adopt. This suggests that there is an optimal degree of heterophily for effective diffusion. Ideally, source and receivers are homophilous on all other variables (education, social status and the like) even though heterophilous regarding innovation.” (Rogers dan Shoemaker, 1971:15).

Ketidakpastian yang muncul ketika akan mengadopsi inovasi akan membuat calon adopter untuk mencari informasi lebih dalam mengenai inovasi tersebut melalui proses komunikasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakpastian seperti hakikat dari komunikasi komunikasi yang dilakukan yaitu mengurangi ketidakpastian. Upaya untuk mengurangi ketidakpastian ini dijadikan salah satu indikator model difusi inovasi yang terjadi.

2. Kasus Program KB

Keberhasilan program KB di Indonesia tidak terlepas dari peran serta *opinion leader*. Dalam program KB, keterlibatan pemimpin opini bahkan terjadi secara terang-terangan. Bagi sebagian masyarakat yang menganut paham religius konservatif, KB adalah sesuatu hal yang haram bagi mereka. Keterlibatan para kiai dan tokoh masyarakat lain sebagai *opinion leader* yang dipercaya terutama di kalangan masyarakat konservatif sangat berperan penting. Misalnya saja yang terjadi di sebuah kantor kades di kawasan Patalan, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Sejumlah kiai dan tokoh masyarakat setempat pun ikut mensosialisasikan program KB dan menyatakan bahwa program KB adalah program yang halal dan sah. Masyarakat yang awalnya merasa ragu, takut, atau khawatir menggunakan alat kontrasepsi pun lambat laun mau mempercayai program KB ini setelah *opinion leader* mereka, dalam hal ini kiai dan tokoh masyarakat, memberikan semacam ‘jaminan’ bahwa program ini tidak menyalahi aturan agama alias halal.

Bagi masyarakat pedesaan, filosofi banyak anak banyak rezeki menjadi semacam penghambat kultural yang menjadi tantangan bagi pemerintah sebagai pemilik program. Bisa dibayangkan jika *opinion leader* tidak berperan serta, tentu program yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran ini akan sia-sia.

Contoh keberhasilan peran pemimpin opini juga terjadi di Peru. Negara tersebut pernah dilakukan kampanye inovasi kesehatan kepada penduduk desa. Kampanye ini dilakukan oleh sebuah lembaga pelayanan kesehatan yang telah berhasil mengkampanyekan program tersebut di Amerika Latin dengan cara memotivasi penduduk untuk membuat jamban, membakar sampah, melaporkan kasus-kasus penyakit yang mencurigakan ke Puskesmas dan memasak air. Dalam kasus ini ditemukan bahwa peran pemimpin pendapat sangat signifikan terhadap suksesnya program (Rogers, 1983).

Media, Pemimpin Opini, dan Proses Difusi Inovasi

Dalam hal sumber informasi, masyarakat ternyata juga memperoleh informasi dari pihak lain selain pamong desa. Dari hasil penelitian yang pernah penulis lakukan, masyarakat pedesaan juga memperoleh informasi dari media massa.

Meski tidak menempati prosentase tertinggi sebagai pihak yang mampu menciptakan keterpahaman tertinggi namun kehadiran media massa tetap memberikan kontribusi informasi bagi masyarakat. Memang tidak semua anggota masyarakat memiliki tingkat media literasi yang tinggi sehingga menjadikan TV sebagai media yang paling penting sebagai sumber informasi. Namun dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sejumlah anggota masyarakat ada yang menggunakan berita di TV sebagai sumber informasi rujukan.

Temuan data tersebut memperkuat bukti bahwa media massa memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi masyarakat tak terkecuali masyarakat pedesaan. Menurut Robert K Avery dalam *Communication and The Media* (Kuswandi,1996:24) dan Sanford B Wienberg dalam *Messages-A Reader Human Communication* (Kuswandi, 1996:24) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi media yaitu mengamati lingkungan (*the surveillance of the environment*), mengadakan korelasi antara informasi data yang diperoleh dengan kebutuhan khalayak sasaran dan fungsi ketiga adalah menyalurkan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi. Ketiga fungsi diatas pada dasarnya memberikan satu penilaian pada media massa sebagai alat atau sarana yang secara sosiologis menjadi perantara untuk menyambung atau menyampaikan nilai-nilai tertentu pada masyarakat (Kuswandi, 1996:25).

Rogers dan Shoemaker (1971:382) mengungkapkan bahwa media massa maupun saluran interpersonal (misal penyuluhan) memiliki peran yang sama penting dalam proses difusi inovasi. Bedanya, media massa lebih berperan dalam fungsi pengetahuan (memberi pengetahuan mendalam tentang inovasi) sedangkan saluran interpersonal berperan pada fungsi persuasi dan pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Rogers dan Shoemaker (1971:382) bahwa saluran media memiliki fungsi pengetahuan yang lebih penting sedangkan saluran interpersonal memiliki fungsi persuasif yang lebih penting dalam proses keputusan inovasi.

Jika dikaitkan dengan posisi *opinion leader* di pedesaan dengan

segala kekhasannya, keberadaan media yang terbungkus dalam teknologi yang kian canggih memang menjadi dua sisi mata uang. Satu sisi bisa menjadi musuh, di sisi lain peran media ini sama pentingnya dengan peran komunikasi personal. Pola komunikasi dalam interaksi yang bisa berubah karena teknologi harus disiasati secara arif dengan menempatkan media (teknologi komunikasi) pada fungsi utamanya yakni fungsi pengetahuan. Sedangkan saluran interpersonal tetap menjadi alat persuasif yang berperan penting dalam keputusan inovasi. Dengan demikian, efek buruk teknologi komunikasi dalam interaksi sosial bisa diminimalisir.

Seperti kata Marshall McLuhan yang mempopulerkan istilah *global village* dan membenarkan konsep bahwa teknologi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, membentuk *desa global*. Maksudnya, tidak ada lagi batasan informasi dan semua orang bisa mengaksesnya. Informasi berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat. Selain itu ia juga mengungkapkan perihai teori determinisme teknologi. Teori tersebut menyatakan bahwa perubahan dalam perkembangan teknologi, turut mengubah kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Inilah tantangan yang dihadapi oleh *opinion leader* khususnya di wilayah pedesaan, bersikap arif pada teknologi dengan mengembalikan fungsi teknologi pada posisi utamanya sebagai sumber pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Anggia, Intan. 2012. *Peran Opinion Leader Dalam Sistem Komunikasi* dalam <https://intananggia.wordpress.com/2012/04/23/peranan-opinion-leader-dalam-sistem-komunikasi/> .Diakses pada 15 Desember 2015
- Hardyanti, Winda. 2008. *Proses Difusi Inovasi Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Jahi, Amri (ed.).1993.*Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga:Suatu Pengantar*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Kuswandi,Wawan.1996.*Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

- Nasution, Zulkarimein. 2004. *Komunikasi Pembangunan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nurudin. 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rogers, Everett M and Vloyd Shoemaker. 1971. *Communication of Innovation A-CrossCultural Approach*. New York: The Free Press.
- Rogers, Everett M and D Lawrence Kincaid. 1981. *Network Communication Toward A New Paradigm For Research*. New York: The Free Press
- Rogers, Everett M., 1983. *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press
- Severin, Wemer J & James W Tankard, Jr. 2005. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Prenada Media
- Umri. 2008. *Peranan Opinion Leader dalam Sistem Komunikasi*. dalam <http://umrikebo.blogspot.com/2008/10/peranan-opinion-leader-dalam-sistem.html> . Diakses pada tanggal 15 Desember 2015

Peta Teoritik Studi Gerakan Sosial (*Social Movements*) Masyarakat Modern

Oleh Oman Sukmana

Pengantar

Studi tentang gerakan sosial sebagai manifestasi *social power*, berkembang dengan sangat pesat dalam area penelitian sosiologi (Della Porta & Diani, 2006:1). Pada era akhir tahun 1940-an, studi tentang gerakan sosial pada umumnya masih bersifat studi deskriptif dengan tujuan lebih kepada upaya memahami tentang bagaimana gerakan sosial terjadi, dimana masih terdapat kelemahan dalam kerangka analisis teoritiknya. Menurut Singh (2010: 20-21), gerakan-gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka. Dengan demikian, gerakan sosial terkait dengan dimensi perlawanan atau penentangan.

Di Indonesia, sejak era Orde Baru fenomena gerakan sosial yang dilakukan masyarakat sipil terutama sebagai reaksi (*respons*) terhadap dampak negatif kebijakan pembangunan sudah banyak terjadi. Di era reformasi, seiring dengan munculnya keterbukaan dan kebebasan sistem politik, maka peluang untuk melakukan gerakan sosial semakin terbuka. Beberapa contoh gerakan sosial, misalnya di Papua, gerakan sosial dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa). Gerakan sosial ini merupakan bentuk perlawanan masyarakat Timika, Papua, dalam menentang proyek pertambangan PT Freeport yang telah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan fisik dan sosial (Ngadisah, 2003: xx). Gerakan perlawanan masyarakat Papua terhadap PT Freeport hingga saat ini masih tetap berlangsung.

Peristiwa gerakan sosial di Jawa Timur yang juga banyak menyita perhatian adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo yang berlangsung antara tahun 2006 hingga saat ini. Korban bencana Lumpur Lapindo melakukan gerakan sosial sebagai bentuk

perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc., (PT LBI) dan pihak pemerintah dalam proses penyelesaian masalah bencana Lumpur Lapindo.

Apa yang Dimaksud dengan Gerakan Sosial?

Tidak semua perilaku kolektif (*collective behavior*) dan tindakan kolektif (*collective actions*) dikategorikan sebagai bentuk gerakan sosial. Tindakan kolektif (*collective action*) didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seorang atau beberapa orang individu (Zomerren, 2009: 646). Mengacu kepada konsep Olson, maka inti dari konsep tindakan kolektif adalah adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama (*public goods*) yang diusung di antara kelompok orang-orang (Oliver, 1993: 272). Menurut Weber, suatu tindakan dikatakan terjadi ketika individu melekatkan makna subjektif dalam tindakan mereka tersebut (Ritzer & Goodman, 2009: 136-137).

Bagaimana kaitan antara tindakan kolektif dan gerakan sosial? Sebagaimana dikatakan Macionis (1999: 607), bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah merupakan tipe paling penting dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Untuk memperjelas konsep tentang Gerakan Sosial (*social movement*), selanjutnya dikemukakan berbagai definisi tentang Gerakan Sosial (*social movement*) dari beberapa ahli.

Macionis (1999: 607), menyatakan bahwa *social movement* adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*). Dari definisi gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan Macionis tersebut maka dapat digaris-bawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni: adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.

Klandermans (Quah & Sales, 2000: 236), menyitir pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Dari pendapat Tarrow ini maka dapat elaborasi bahwa: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan terhadap elit, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, pihak berwenang, dan elit; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk

meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial.

Menurut Hiller (1975:343) dari berbagai hasil studi awal tentang gerakan social yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti Dawson dan Getty, Smelser, dan King`s, menempatkan proses pengorganisasian atau proses institusionalisasi sebagai bagian dari tahap dalam proses dan dinamika gerakan sosial. Misalnya Dawson dan Getty (1951) menyebutkan tahap-tahap suatu gerakan sosial meliputi: (1) *preliminary stage of social unrest*(tahap awal kerusuhan sosial); (2) *popular stage of collective excitement*(tahap popoler dari semangat kolektif); (3) *stage of formal organization*(tahap dari pengorganisasian formal); dan (4) *institutionalization*(tahap institusioanlisasi).

Dari paparan tersebut diatas maka dapat dipertegas bahwa inti yang penting dari suatu gerakan sosial yang dibedakan dari bentuk perilaku kolektif adalah bahwa gerakan sosial itu merupakan suatu tindakan kolektif yang diorganisir.

Pemetaan Teoritik Gerakan Sosial

Kerangka pemetaan teoritik studi gerakan sosial paling tidak dapat diletakkan atas dua perspektif, yakni yang dikembangkan oleh Singh dan Crossley.

Pada umumnya studi-studi tentang gerakan sosial, khususnya di Indonesia, meletakkan pemetaan kerangka analisis teoritiknya kepada pandangan Singh (2001). Menurut Singh (2001: 111), secara umum tradisi teoritis studi tentang gerakan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yakni: (1) Klasik; (2) Neo-Klasik, dan (3) Gerakan Sosial Baru (Kontemporer).

Selanjutnya Singh (2010: 111) menjelaskan bahwa tradisi klasik meliputi sebagian besar studi-studi dalam perilaku kolektif seperti: *crowd*, *riot* dan *rebel*, utmanya oleh para psikolog sosial Barat dan para sejarawan dari sebelum tahun 1950-an. Dalam tradisi klasik, akar konseptual studi gerakan sosial dan tindakan kolektif sebagian terletak dalam tradisi psikolog sosial klasik. Kontribusi dari para psikolog seperti karya Gabriel Tarde tentang *Laws and Imitation* (1903), karya Gustave Le Bon tentang *The Crowd* (1909), karya William McDougall tentang *The Group Mind* (1920), serta karya E.D. Martin tentang *The Behavior of Crowd* (1929) dapat membantu untuk memaparkan fondasi teoritis dalam studi perilaku kolektif. Sementara karya W. Trotters tentang *Animal Behavior in Peace and War* (1920), yang merupakan

sebuah studi tentang perilaku kelompok dalam situasi-situasi ekstrem pada kehidupan binatang, memberikan suatu paradigma yang berpengaruh untuk studi serupa yang menekankan pada stres dan dampaknya pada perilaku kelompok manusia dalam ilmu sosial. Paradigma klasik dan neo-klasik pada tindakan kolektif, khususnya neo-klasik, tetap dominan hingga 1970-an, baik yang merujuk pada studi tentang crowd, suatu kolektifitas yang liar (*collectifies riotous*), sebagaimana menurut para psikolog klasik, maupun studi dalam gerakan sosial lama dalam tradisi sosiolog neo-klasik.

Sementara tradisi neo-klasik dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi gerakan sosial lama (*old social movements*). Kebanyakan tulisan dalam tradisi neo-klasik dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Tradisi ini dibagi lagi dalam dua model gerakan sosial lama, yaitu fungsional dan dialektika Marxis. Hal ini barangkali menunjukkan bahwa tidak seperti studi dalam tradisi klasik, studi neo-klasik menghadirkan kontribusi sosiolog Barat maupun India.

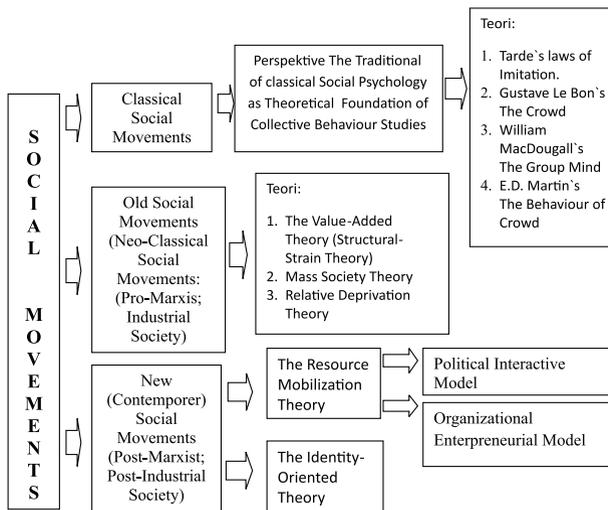
Sedangkan perspektif ketiga dari studi gerakan social, yakni *New Social Movements* (NSMs) atau gerakan sosial kontemporer, muncul sekitar era tahun 1960-an dan 1970-an, terutama di masyarakat Eropa dan Amerika (Singh, 2001:96). Pada masyarakat Eropa dan Amerika saat itu menyaksikan munculnya gerakan skala besar sekitar isu-isu yang mendasarkan pada aspek humanis (*humanist*), cultural (*cultural*), dan non-materialistik (*non-materialistic*). Tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari gerakan ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan model gerakan social lama (klasik dan neo-klasik), maka model Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*, NSMs) tidak terjebak ke dalam diskursus ideology seperti anti-kapitalisme (*anticapitalism*), revolusi kelas (*class revolution*), dan perjuangan kelas (*class struggle*). Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru tidak tertarik dengan ide revolusi, termasuk melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan system pemerintahan Negara. Strategi dan tujuan dari Gerakan Sosial Baru (GSB) memiliki sedikit kesamaan dengan model gerakan masa lalu yaitu dalam memperjuangkan untuk isu-isu seperti: peningkatan upah buruh industry, menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas (*class exploitation*).

Pada dasarnya *New Social Movements* (NSMs) bersifat plural. Menurut Melucci (1980), Cohen (1985), Slater (1985) dan Touraine (1985), ekspresi *New Social Movements* (NSMs) bergerak dari anti-rasialisme (*anti-racism*), anti-nukliarisme (*anti-nuclearism*), perlucutan senjata (*disarmament*),

feminism (*feminism*), lingkungan (*environmentalism*), regionalisme dan etnisitas (*regionalism and ethnicity*), kebebasan sipil (*civil libertarianism*), dan sebagainya, hingga ke isu-isu kebebasan personal dan perdamaian. Perkembangan masyarakat dari masyarakat modernitas (*modernist society*) menuju masyarakat pasca modernitas (*post modernist-post society*) merefleksikan terjadinya perubahan bentuk dari gerakan social (*social movements*) dari bentuk lama (klasik dan neo-klasik) kepada bentuk Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dengan kata lain, terjadinya perubahan bentuk masyarakat berhubungan dengan terjadinya perubahan bentuk dari gerakan social (Singh, 2001:97).

Berdasarkan klasifikasi studi teoritis tentang tindakan kolektif dan gerakan sosial, maka teori-teori yang termasuk di dalamnya meliputi sebagai berikut: (1) *Classical Social Movements*, teori-teorinya meliputi antara lain: *Tarde's laws of Imitation*, *Gustave Le Bon's The Crowd*, *William MacDougall's The Group Mind*, dan *E.D. Martin's The Behaviour of Crowd*; (2) *Old Social Movements (Neo-Classical Social Movements; Pro-Marxist; Industrial Society)*, teori-teorinya meliputi antara lain: *The Value-Added Theory (Structural-Strain Theory)*, *Mass Society Theory*, dan *Relative Deprivation Theory*; dan (3) *New Social Movements (Contemporer Social Movements; Post-Marxist; Post-Industrial Society)*, teori-teorinya meliputi antara lain: *Resource Mobilization Theory*, dan *The Identity Theory*.

Tabel 1
Klasifikasi Teoritis Studi Gerakan Sosial



Sumber: Rekonstruksi berdasarkan hasil kajian pustaka

Berbeda dengan pandangan Singh, Crossley (2001: 10-13) membagi tradisi analisis studi gerakan sosial berdasarkan dimensi waktu dan seting wilayah. Dalam dimensi waktu tradisi studi gerakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi yakni sebelum tahun 1970-an dan setelah tahun 1970-an. Sementara dalam seting wilayah, studi gerakan sosial dapat dilihat dalam konteks seting Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya Crossley menggambarkan peta teoritik studi gerakan sosial tersebut dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial

	Amerika Serikat	Eropa
Sebelum Era 1970	Perilaku Kolektif (<i>Collective Behaviour</i>)	Marxisme (<i>Marxism</i>)
Setelah Era 1970	Mobiliisasi Sumber Daya/ Proses Politik (<i>Resource Mobilization/ Political Process</i>)	Gerakan Sosial Baru (<i>New Social Movements</i>)

Sumber: Crossley, 2002:10

Mengacu kepada pandangan Crossley sebagaimana digambarkan dalam tabel 1, maka di Amerika Serikat sebelum era tahun 1970-an, tradisi analisis studi gerakan sosial lebih diwarnai oleh pemikiran perspektif perilaku kolektif. Sementara di era setelah tahun 1970-an, tradisi studi gerakan sosial analisisnya lebih banyak diwarnai oleh perspektif mobilisasi sumberdaya atau proses politik. Berbeda dengan perkembangan di Amerika, di Eropa sebelum era tahun 1970-an analisis studi gerakan sosial diwarnai tradisi Marxis, dan setelah era 1970-an analisis gerakan sosial lebih banyak diwarnai oleh tradisi perpektif Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*).

Studi gerakan sosial yang berkembang di Amerika pada era sebelum tahun 1970-an meletakkan analisisnya pada pendekatan perilaku kolektif (*collective behavior*). Crossley (2002: 11) menjelaskan bahwa pendekatan perilaku kolektif: (a) Menggambarkan munculnya gerakan sebagai refleksi respons atas keluhan-keluhan (*grievances*), kekurangan (*deprivations*), ketidakpastian (*anomie*), ketegangan structural (*structural strains*) atau bentuk-bentuk penderitaan lainnya. Stereotip dari teoritisi perilaku kolektif meyakini bahwa adanya berbagai kesulitan (*hardship*) secara obyektif merupakan penyebab munculnya bentuk protes dan gerakan; (b) Menggambarkan bahwa protes dan gerakan yang dipicu oleh suatu penderitaan merupakan respons psikologis irasional, sebagai manifestasi

dari psikologi massa (*mob psychology*) atau hysteria kolektif (*collective hysteria*); (c) Menggambarkan bahwa mereka yang terlibat dalam suatu massa (*mobs*) adalah sebagai individu-individu yang terisolasi yang tidak dapat berintegrasi secara baik dengan masyarakat; dan (d) Gerakan social menggumpal bersama dengan berbagai macam bentuk perilaku kolektif lainnya, seperti mode (*fashions*), kegilaan dan panic (*crazes and panics*), tanpa mempertimbangkan keunikan mereka dan kebenaran alaminya.

Berbeda dengan di Amerika Serikat, studi gerakan sosial di kawasan Eropa pada era sebelum tahun 1970-an lebih diwarnai oleh tradisi Marxist (Hegelian) tentang filsafat sejarah (*philosophy of history*). Tipe perdebatan di Eropa lebih banyak berkisar pada kemunculan gerakan modern dalam relasi antara gerakan tersebut dengan masyarakat dan “peran sejarah” di dalamnya, Tradisi Marxist berasumsi bahwa kunci dari suatu masyarakat ditandai oleh konflik (pertentangan) dan kontradiksi, dan konflik ini membangun (melahirkan) suatu gerakan dalam masyarakat. Para sarjana Eropa mempertanyakan tentang: Apa konflik utama di dalam kehidupan? Dan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut?

Berbagai kritik muncul terhadap kedua tradisi ini, yakni tradisi perilaku kolektif (*collective behavior*) di Amerika Serikat dan tradisi Marxisme (*Marxism*) di Eropa. Beberapa hasil studi yang dilakukan para ahli, seperti Snyder dan Tilly (Crossley, 2002: 12), memberikan kritik terhadap cara pandang tradisi perilaku kolektif (*collective behavior*) dalam analisis gerakan social. Menurut hasil studi tersebut, secara objektif ditemukan bahwa meningkatnya berbagai kesulitan (*hardship*) tidak menyebabkan meningkatnya aksi protes dan aktivitas gerakan. Dalam kenyataannya aksi protes seringkali juga terjadi selama periode waktu dalam kondisi reformasi dan kemajuan ekonomi.

Sementara itu kritik terhadap tradisi Marxis yang berkembang di Eropa menyatakan bahwa sesungguhnya ketegangan dan konflik (*strains and conflicts*) adalah merupakan faktor tetap (konstan) dalam kehidupan sosial (*social life*) dan tidak dapat ditemukan dalam protes dan gerakan, baik kejadian maupun intensitasnya. Sebagai contoh, konflik struktural dan ketegangan yang terjadi antara warga kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat telah terjadi jauh sebelum munculnya gerakan hak sipil (*civil rights movements*). Hasil studi juga telah gagal menunjukkan bahwa partisipan suatu gerakan direkrut dari anggota-anggota yang tidak berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

Sebaliknya, suatu gerakan seringkali nampak karena adanya suatu jaringan. Sebagai contoh, gerakan hak sipil kulit Hitam di Amerika Serikat dibentuk di sekitar lingkungan Gereja dan di luar lingkungan Gereja. Para teoritis gerakan social mendapatkan tantangan dan kesulitan untuk memahami bahwa perilaku gerakan dan keyakinan (*belief*) sebagai hal yang irasional. Suatu aktivitas gerakan hanya dapat dipahami jika kita berasumsi bahwa perilaku aktivis sebagai sesuatu yang rasional. Pandangan ini bertentangan dengan pendekatan perilaku kolektif (*collective behavior approach*) dimana lebih berorientasi normatif.

Setelah era tahun 1970-an, para teoritis gerakan sosial mulai meninggalkan cara berpikir tradisi perilaku kolektif (*collective behavior*) dan tradisi Marxis dalam menganalisis gerakan sosial dengan memunculkan cara pandang baru. Sejak era tahun 1970-an hingga dewasa ini, di kawasan Eropa berkembang tradisi baru dalam menganalisis studi gerakan sosial yakni tradisi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Tradisi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) mulai dibangun sejak era tahun 1960-an yang berkembang di masyarakat barat (*western societies*), termasuk gerakan lingkungan (*environmentalism*), gerakan perdamaian (*peace movement*), feminisme gelombang kedua (*second-wave feminism*), hak-hak binatang (*animal rights*), dan sebagainya.

Apabila di Eropa setelah era tahun 1970-an analisis studi gerakan sosial diletakkan atas kerangka perspektif teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*), maka di Amerika Serikat analisis studi gerakan sosial diwarnai oleh pemikiran tradisi perspektif mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) atau proses politik (*political process*). Munculnya paradigma baru sebagai pengganti cara pandang paradigma lama ditandai oleh beberapa perkembangan. Pada perkembangan awal ditandai oleh dua elemen kunci, yakni: (1) model aktor rasional dari agen sosial telah disesuaikan bersamaan dengan fokus ekonomi atas relasi pertukaran (*exchange relations*) dalam kehidupan sosial, serta pengaruh gerakan atas sumberdaya antar agen; dan (2) model jaringan struktural dari relasi sosial (*social relations*) dan kehidupan sosial (*social life*) telah diadopsi. Melalui dua elemen ini para teoritis gerakan dalam pendekatan mobilisasi sumberdaya telah mampu menguji keseimbangan dari biaya (*cost*), hadiah (*rewards*), dan insentif (*incentive*) yang mampu mendorong motivasi agen untuk terlibat dalam perjuangan.

Pendekatan mobilisasi sumberdaya berkembang sebagai basis utama dalam menganalisis gerakan di Amerika Serikat. Namun mulai

tahun 1980-an, selain pendekatan mobilisasi sumberdaya, muncul pula pendekatan yang lainnya yakni pendekatan proses dan system politik (*political systems and processes*) yang mendorong terbuka dan tertutupnya peluang untuk terjadinya aktivitas protes. Menurut perspektif pendekatan proses dan system politik (*political systems and processes*) aktor rasional cenderung melakukan aksi manakala terdapatnya peluang (*opportunity*) yang besar. Pandangan ini memberikan basis kerangka berpikir dalam perkembangan paradigm baru yang kemudian disebutnya sebagai pendekatan proses politik (*the political process approach*).

Teori Perspektif Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory*)

Dalam disiplin sosiologi dewasa ini, teori Mobilisasi Sumberdaya (*the Resource Mobilisation Theory*) merupakan kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif (Buechler, 1993: 217). Menurut Cohen (Singh, 2001:106), para teoritis mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) mengawali tesis mereka dengan penolakan atas perhatian terhadap peran dari perasaan (*feelings*) dan ketidakpuasan (*grievances*), serta penggunaan kategori psikologi dalam memahami gerakan sosial (*social movements*).

Para teoritis yang berdiri dalam arus pemikiran ini, seperti Oberschall (1973), mempertanyakan asumsi konvensional bahwa secara umum para aktor mobilisasi kolektif adalah orang-orang yang mengalami alienasi dan ketegangan sosial. Asumsi dasar paradigma mobilisasi sumber daya adalah bahwa gerakan kontemporer mensyaratkan sebetuk komunikasi dan organisasi yang canggih, bukan sekedar terompet dan genderang dari gerakan sosial lama (*old social movements*). Gerakan sosial kontemporer adalah sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional (Singh, 2010: 135).

Resource Mobilization Theory (RMT), pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall (Locher, 2002:258). Menurut Oberschall, *mass society theory* tidak mampu ketika menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam gerakan anti-demokrasi, seperti Gerakan Nazi (*Nazism*) di Jerman. *Resource Mobilization Theory (RMT)*, memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. *RMT* lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik daripada *Mass Society Theory* atau *Relative Deprivation Theory*, serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari

anggota gerakan. Teori ini juga dibangun tidak didasarkan atas asumsi bahwa terdapat motivasi individu ketika bergabung dalam suatu gerakan, dan adanya keterasingan individu (*individual alienation*) adalah dianggap tidak relevan (kurang tepat). *Resource Mobilization Theory* berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*social movements*). Menurut Oberschall (Locher, 2002:259), istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.

Klandermans (1984:583), dengan mengutip pendapat Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy dan Zald, dan Snow, menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumberdaya (*the availibility of resources*) untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Sedangkan menurut Fireman dan Gamson (Pichardo, 1988:98) esensi dari *Resource Mobilization Theory (RMT)* adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial.

Beberapa teoritis telah melakukan kajian untuk memahami basis rasionalitas partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Misalnya Olson (Pichardo, 1988:98) mengembangkan model utilitarian untuk menjelaskan partisipasi perilaku kolektif dan menyatakan bahwa untuk dapat memahami mengapa individu terlibat dalam suatu perilaku kolektif maka harus dianalisis tentang konsep imbalan dan biaya (*reward and cost*) yang dialami oleh individu tersebut. Berbagai bentuk biaya (*cost*) yang dihubungkan dengan partisipasi dalam aktivitas kolektif meliputi antara lain: waktu (*time*), uang (*money*), keamanan personal (*personal safety*), dan hilangnya pekerjaan (*loss of job*). Olson berpendapat bahwa aktivitas kolektif harus mampu menawarkan pilihan insentif, seperti prestise (*prestige*), gaji (*salary*), dan kepemimpinan (*leadership*) untuk menarik partisipasi masyarakat dalam suatu aktivitas kolektif.

Perkembangan gerakan sosial dipandang sebagai produk dari kekuatan-kekuatan lingkungan (*environmental forces*) baik bersifat internal maupun eksternal terhadap gerakan. Faktor-faktor internal meliputi: kepemimpinan (*leadership*), tingkat ketersediaan sumberdaya (*level of available resources*), ukuran kelompok (*group size*), dan tingkat dari organisasi internal (*degree of*

internal organization). Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi: tingkat represi dari masyarakat (*the level of societal repression*), tingkat simpatisan eksternal (*extent of external sympathizers*), serta jumlah dan kekuatan kelompok politik (*number and strength of polity groups*). Interaksi dari berbagai faktor tersebut disebut sebagai faktor penentu atas perkembangan dan perilaku dari suatu gerakan sosial (McCarthy & Zald, Oberschall, Gamson, Ash-Garner, Freeman, Marx, & Morris; dalam Pichardo, 1988:99).

Selanjutnya terdapat dua model analisis dalam pendekatan *Resource Mobilization Theory* (Pichardo, 1988:99; Phongpaichit, dalam Triwibowo, 2006:11), yakni: *Pertama; The Political-interactive model (The Political process models)*. Model ini dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam. Model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring (*network*), serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok-kelompok tertindas (*aggrieved groups*) sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menempatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial sulit untuk mencapai tujuannya, demikian juga sebaliknya. Pichardo (1988:99) menjelaskan bahwa model ini menekankan pada kapasitas internal dari komunitas untuk menghasilkan organisasi gerakan sosial.

Kedua, The Organizational-entrepreneurial model (The Professional organizer models). Model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan *carriers of social movements*. Organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan preferensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Setiap Organisasi Gerakan Sosial (*Social Movement Organization; SMO*) harus mampu mengelola sumber-sumber (*resources*) yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), dan tabungan (*savings*), serta sumber-sumber non-material seperti wewenang (*authority*) komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan

(*skills*) dan sebagainya. Menurut Oberschall (Locher, 2002:260), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang bergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan (*opponents*).

Oberschall (Locher, 2002:260), menyatakan bahwa keberadaan kelompok sosial akan lebih memungkinkan untuk memunculkan suatu gerakan sosial jika kelompok sosial tersebut tersegmentasi. Karena kelompok sosial yang tersegmentasi akan menarik keanggotaannya dari kelas khusus dalam suatu masyarakat. Semakin tersegmentasi kelompok asosiasi dalam suatu masyarakat, maka semakin besar kemungkinannya untuk dimobilisasi ke dalam *Social Movement Organization (SMO)*. Kesamaan keanggotaan dalam suatu kelompok cenderung memiliki kesamaan juga dalam hal keinginan bersama.

Faktor penting mengapa kelompok lebih mudah untuk melakukan mobilisasi karena kelompok memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan (*established*), terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan adanya partisipasi tradisional dari para anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, tempat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagi kepercayaan, symbol serta bahasa yang sama. Seorang pemimpin dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial harus memusatkan perhatiannya kepada masalah mobilisasi, hal-hal yang membuat ketidakpuasan, pilihan taktis, dan infrastruktur masyarakat dan gerakan yang diperlukan agar suatu gerakan sosial berhasil (McCarthy & Zald, dalam Locher, 2002:261).

Pemimpin (*leaders*) dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial, memiliki resiko dan tanggung jawab yang lebih besar daripada para anggotanya, namun mereka juga akan menerima keuntungan yang lebih besar atas keberhasilan suatu gerakan sosial. Pemimpin biasanya akan mendapatkan keuntungan dalam hal status dan wewenang, kadang-kadang juga dalam hal kekayaan, atas posisinya dalam suatu Organisasi Gerakan Sosial. Menurut Morris dan Staggengborg (dalam Snow, Soule, & Kriesi, 2004:171) menyatakan bahwa para pemimpin (*leaders*) sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, membimbing tuntutan-tuntutan, dan mempengaruhi hasil-hasil. Pemimpin gerakan (*leaders movement*) didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (*strategic decision-makers*)

yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.

Peta Baru: *Global Social Movements*

Ada perspektif yang menarik yang secara spesifik membahas tentang peta (fenomena) baru gerakan sosial kontemporer, yakni perspektif Moghadam (2009).

Moghadam (2009: ix) menyatakan bahwa gerakan sosial global berkembang pesat dewasa ini karena faktor ekonomi, politik, kultural, dan geografis yang mendorong terjadinya peningkatan mobilitas global (transnasional) dalam kapital (*capital*), manusia (*peoples*), organisasi (*organizations*), gerakan (*movements*), ide-ide (*ideas*), dan sebagainya. Dalam aspek komunikasi, munculnya internet dan teknologi informasi merupakan instrumen yang memungkinkan terjadinya percepatan komunikasi, transfer, dan mobilisasi transnasional. Tipe dari globalisasi ekonomi telah mendorong munculnya *neoliberal capitalist*, yang menandai *denationalization*, *privatization*, *flexible labor markets*, dan *deregulated capital markets*. Sementara disisi lain aspek-aspek *labor rights*, *human rights*, *women's rights*, dan *environmental protection* semakin tercederai. Munculnya *neoliberal capitalism* mendorong munculnya tindakan kolektif (*collective actions*). Fokus dari gerakan sosial global (transnasional) terletak pada tiga bentuk gerakan, yakni: (1) Gerakan perempuan dan jaringan feminist transnasional (*the global women's movement and transnational feminist networks*); (2) Gerakan dan Jaringan Islam transnasional (*transnational Islamist movements and networks*); dan (3) Gerakan ketidakadilan global (*the global justice movement*).

Daftar Pustaka:

Buku:

Crossley, Nick. 2002. *Making Sense of Social Movements*. Philadelphia: Open University Press.

Della Porta, Donatella; & Diani, Mario. 2006. *Social Movements an Introduction*. Malden: Blackwell Publishing.

Fakih, Mansour. 2005. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.

- Fakih, Mansour. 2010. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: InsistPress.
- Johnston, Hank, & Klandermans, Bert (eds.). 1995. *Social Movements and Culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Klandermans, Bert; & Roggeband, Conny (eds.). 2007. *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. New York: Springer Science Business Media, LLC.
- Klandermans, Bert; & Staggenbog, Suzanne (eds.). 2002. *Methods of Social Movement Research*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Macionis, John J. 1999. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Moghadam, Valentine M. 2009. *Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Ngadisah. 2003. Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja.
- Ritzer, George; & Goodman, Douglas J. 2009. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: KreasiWacana.
- Singh, Rajendra. 2010. Gerakan Sosial Baru (Terj.). Yogyakarta: Resist Book.
- Snow, David A.; Soule, Sarah A.; & Kriesi, Hauspeter (eds.). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. New York: Newbery Award Records, Inc.

Jurnal:

- Hiller, Harry H. 1975. A Reconceptualization of the Dynamics of Social Movement Development. *The Pacific Sociological Review*, Vol. 18, No. 3 (Jul., 1975), pp. 342-360.

- Hollander, Jocelyn A.; & Einwohner, Rachel L. 2004. Conceptualizing Resistance. *Sociological Forum*, Vol 19, No. 4 (Dec., 2004), pp. 533-554.
- Hollinger, David A. 2006. From Identity to Solidarity. *Daedalus*, Vol. 135, No. 4, On Identity (Fall, 2006), pp. 23-31.
- Jenkins, J. Craig. 1983. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements. Annual Review of Sociology*, Vol. 9 (1983), pp. 527-553.
- Klandermans, Bert. 1993. *A Theoretical Framework for Comparisons of Social Movement Participation. Sociological Forum*, Vol. 8, No. 3 (Sept., 1993), p.383-402.
- Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory. American Sociological Review*, Vol.49, No. 5 (Oct., 1984), pp.583-600.
- Klandermans, Bert, Jose Manuel Sabucedo, Mauro Rodriguez, danMarga de Weerd. 2002. Identity Processes in Collective Action Participation: Farmers` Identity and Farmers` Protest in the Netherlands and Spain. *Political Psychology*, Vol. 23, No. 2 (Jun., 2002), pp. 235-251.
- Malena, Carmen; & Heinrich, Volkhart Finn. 2007. *Can We Measure Civil Society? A Proposal Methodology for International Comparative Research. Development in Practice*, Vol. 17, No. 3 (Jun., 2007), p. 338-352.
- McCarthy, John D., & Zald, Mayer N. 1977. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 6 (May, 1977), pp. 1212-1241.
- Oliver, Pamela E. 1993. *Formal Models of Collective Action. Annual Review of Sociology*, Vol. 19 (1993), pp. 271-300.
- Pichardo, Nelson A. 1997. *New Social Movements: A Critical Review. Annual Review of Sociology*, vol. 23 Issue 1, p.411.
- Pichardo, Nelson A. 1988. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations. The Sociological Quarterly*, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1988), pp. 97-110.

Foto Selfie dan Penyakit Sosiopat Masyarakat Modern

Oleh Nurudin

“Di antara deretan bunga amarilis yang sedang mekar, Tri Wuri Handayani (20) berpose dengan beragam gaya. Kadang-kadang ia berdiri sambil melirik kamera, lalu kali lain dia duduk sambil berpose dengan senyum semanis mungkin. Gamis warna oranye bermotif bunga yang dipakainya terlihat serasi dengan pemandangan sekitar.

Sesudah beberapa gaya, dahi Tri terlihat berkeringat. Sapuan bedak di wajahnya sedikit memudar, namun warna lipstik di bibirnya masih terlihat tanpa cela. Sesaat kemudian, dia mengecek foto-foto hasil jepretan temannya. Keduanya kemudian bertukar peran karena sekarang giliran sang kawan yang bergaya di depan kamera.

Minggu siang, 29 November lalu, Tri dan seorang teman perempuannya sedang berwisata di kebun bunga amarilis di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selama beberapa hari terakhir, kebun milik Sukadi (43), warga Dusun Ngasemayu, Desa Salam, Patuk, itu menjadi buah bibir setelah foto-foto pemandangannya menyebar di media sosial.

Para pengunjung pun berdatangan karena ingin melihat hamparan bunga yang secara berlebihan kadang dibandingkan dengan Taman Bunga Keukenhof di Belanda itu. Namun, seperti Tri, kebanyakan pengunjung datang tak sekadar untuk menikmati pemandangan, tetapi juga, atau malah terutama, untuk berfoto.

“Kami datang ke sini untuk foto-foto. Ini pakaiannya memang sengaja saya pilih supaya serasi dengan warna bunganya,” kata Tri yang mengaku tak tertarik untuk membeli bibit amarilis. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta itu menambahkan, foto-fotonya di kebun bunga amarilis itu tak dipakai untuk tujuan khusus, melainkan hanya untuk dipamerkan di media sosial” (*Kompas*, 30 November 2015).

Sukadi (43) pemilik kebun bunga amarilis di Dusun Ngasemayu, Desa Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sebagaimana disebut di awal tulisan ini mendadak sangat populer. Kebun miliknya yang berukuran 2.300 meter persegi menjadi tempat wisata selfie masyarakat. Ia menjadi lebih terkenal setelah kebunnya dipakai foto selfie pengunjung. Pengunjung tak hanya foto tetapi ikut merusak kebun miliknya. Kabar kerusakan ini semakin meluas setelah banyak pengunjung mengunggah foto selfienya di media sosial.

Atas kerusakan kebun amarilis itu, pendapat masyarakat terbelah. Ada yang menganggapnya biasa karena begitulah ulah anak muda, ada juga yang protes karena foto selfie dengan tidak memperhatikan kerusakan lingkungan. Orang yang protes juga dianggap hanya sekadar protes, kalau dia bisa ikut foto selfie di kebun Sukadi perilakunya mungkin akan sama saja. Fenomena foto selfie semakin membuka mata banyak orang yang hanya ingin pamer foto tanpa melihat dampak buruknya. Betapa manusia sekarang cenderung luntur kepedulian pada sesama dan lingkungan asal kebutuhan dirinya terpenuhi.

Semakin besar keinginan seseorang agar orang lain mengakui eksistensi dirinya, semakin miskin kepekaan orang itu. Lihat akun instagram milik Hestisundari yang mengunggah foto selfie dengan latar belakang di kebun milik Sukadi, *“gue foto di sini masalah? Bodo amat suka-suka gue dong. Ngurus hidup sendiri aja belum tentu bisa kok, sok-sokan ngurusin bunya yang layu di kebun”*. Status itu kemudian diikuti dengan hastag: #dolanjogja #explorejogja #kebunbungaanarylis #gunungkidul #jogja.

Lihat juga salah satu tanggapan netizen *“Moral.....gak ada....”*. Ada juga komentar lain; *“Pasti die orang norsee gimana kalau keLN yaaaa yg bunganya dibiarkan tumbuh ditaman2..heiii centil.gw juga hobby selfi tapi kalau kayak gini sih kagak lah yaouwww..norakkkkk”*. Atas cacian netizen, akun hestisundari dihapus.

Hestisundari (mahasiswi di universitas Yogyakarta), hanya salah satu contoh pengunggah foto selfie yang tidak peduli dengan dampak buruk perilakunya, yang penting bisa foto. Bisa jadi komentar senada banyak, hanya tidak sempat mengunggahnya di media sosial.

Saat ini pula mulai banyak ibu-ibu muda yang foto selfie saat menyusui bayinya. Bahkan model dan artis terkenal seperti Gisele, Miranda Kerr, dan Gwen Stefani berani foto selfie (*brelfie* atau *breastfeeding*) lalu

diunggah di media sosial. Sebuah fenomena baru dari seorang pesohor dan sangat mungkin akan diikuti oleh masyarakat kebanyakan. Alasannya, masyarakat kita adalah masyarakat yang mudah untuk meniru apapun yang dilakukan oleh pesohor.

Coba amati perilaku masyarakat di sekitar kita yang punya akun media sosial. Ada yang senang dengan memfoto diri, kemudian menghabiskan waktunya di android, tab, laptop untuk mengedit kemudian mengunggahnya di media sosial. Tak jarang fotonya biasa saja tetapi ditambahi efek-efek tertentu sehingga mengesankan seseorang foto di suatu tempat untuk menimbulkan kesan tertentu pada orang yang melihatnya. Pertanyaannya, mengapa banyak masyarakat hilang kepekaan sosialnya hanya ingin eksistensi dirinya diakui masyarakat umum? Apa yang bisa petik untuk melihat fenomena bangsa dan negara ini?

***Self Objectification* dan Eksistensi Diri**

Seseorang rela untuk menghabiskan waktu lama hanya untuk mengedit foto selfie kemudian dia mengunggah di media sosial dan tujuannya apalagi kalau tidak ingin dikomentari oleh orang lain. Seolah foto yang dia tampilkan memang hanya dipakai agar orang lain berkomentar.

Orang yang berada dalam kenyataan ini berusaha bagaimana agar fotonya dikomentari teman. Tak jarang ia seringkali melihat fotonya itu dengan suatu harapan siapa saja yang berkomentar. Jika ada komentar ia kemudian berusaha untuk menjawab komentar itu. Jadi, setiap saat ia akan berusaha melihat foto yang diunggahnya siapa tahu ada yang berkomentar.

Jika tidak ada komentar, kemudian ia mengupload foto lagi, begitu seterusnya kegiatannya sehari-hari. Mempunyai alat komunikasi, yang penting bisa untuk mengambil gambar dan mengunggahnya. Seolah dia sudah merasa hebat dan dianggapnya keren. Bisa jadi ia mencari hiburan, tetapi tanpa sadar sebenarnya ia sedang mengindap sebuah penyakit.

Apa yang dilakukan oleh orang yang digambarkan di atas oleh seorang peneliti Jesse Fox (2013) dari Ohio State University merupakan tanda dari orang yang mengindap *self objectification*. Pengeditan foto untuk memperbaiki penampilan termasuk dalam gejala *self objectification*. Jika dikembangkan lebih lanjut, apalagi jika ia memang berharap mendapat komentar orang lain. Seolah-olah komentar orang lain itu sedemikian

penting bagi dirinya, tepatnya untuk eksistensi dirinya.

Seseorang yang mengindap *self objectification* lebih memikirkan pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri soal foto itu. Lihat misalnya foto putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri yang memakai kaos bergambar palu arit (lambang komunis). Apakah dia tidak sengaja mengunggah foto? Apakah ia hanya mendokumentasikan fotonya itu untuk dilihatnya sendiri suatu saat? Tentu saja, ia berharap dan biar dianggap keren oleh orang lain. Bisa jadi biar dia tambah populer. Bukan popularitas positif yang didapatkan, tetapi ia bahkan *dibully* oleh *followernya*.

Ia tentu tidak mengira kalau sampai *dibully*, karena menganggap foto dengan gambar palu arit itu sama dengan foto-foto yang lain. Namun demikian, gambar palu arit yang dipertontonkan di negara kita punya sejarah panjang terkait paham komunis yang dilarang.

Bagaimana pula dengan artis yang mengunggah foto saat dia sedang menyusui? Apakah hanya sekadar ia memberitahukan kalau dia punya anak atau dia ibu yang sangat perhatian dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI)? Apakah dia juga tidak sadar kalau foto selfie itu juga diketahui agar punya kesan tertentu sementara anaknya hanya minum susu kaleng?

Masyarakat tidak bisa dibohongi sedemikian rupa. Satu hal yang digarisbawahi, kita hidup dalam masyarakat yang *sok*. Anehnya juga masyarakat juga terbuai dengan sesuatu yang *sok* pula. Sehingga, dibohongi sedemikian rupa juga tidak sadar. Foto selfie dengan editan kemudian diunggah biar terkesan *wah*, padahal tidak seperti itu aslinya bukan?

Penyakit Sosiopat Masyarakat Modern

Dalam kajian psikologi sosial, orang yang terlalu mementingkan diri sendiri dan kurang peka pada lingkungannya dinamakan dengan sosiopat (penyakit sosial). Istilah ini dituturkan dari kata psikopat berarti sakit jiwa (*psyche*=jiwa, *pathos*=penyakit). Pengindap penyakit itu tak peduli di atas bisa disebut sosiopat (*sosio*=berarti sosial, *phatos*=penyakit) karena ia anti sosial dan cenderung merugikan orang disekitarnya.

Orang yang anti sosial cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri. Misalnya, sekarang banyak orang yang jika berjalan bersama-sama bukan berbicara dan bercengkerama dengan teman seperjalanan, tetapi sibuk dengan androidnya sendiri-sendiri. Mereka senyum-senyum

sendiri, tertawa-tertawa sendiri, cemberut sendiri, dan sikap-sikap lain yang melekat pada seseorang di tengah khalayak ramai. Orang yang termasuk kelompok itu bisa jadi membela diri, bukankah ini konsekuensi teknologi modern? Teknologi memang diciptakan untuk membantu manusia dalam mempermudah pekerjaan, bukan membuat manusia lupa daratan lantaran teknologi itu.

Bibit sikap egoisme manusia modern yang cenderung tak peduli dengan sesama juga terlihat saat menghadiri rapat. Berapa orang yang menyimak rapat dan berapa orang yang sibuk dengan gadgetnya? Lihat juga saat beberapa orang berjalan bersama, banyak diantara mereka tetap sibuk dengan androidnya, hanya sesekali menyauti pernyataan teman.

Seorang peneliti bernama Robert D Hare (Universitas Columbia) secara ekstrem bahkan pernah mengatakan bahwa mereka yang termasuk sosiopat sering melakukan tindakan komufase. Penderita penyakit itu akan berkomufase, mudah memutarbalikkan fakta, cenderung menyebar kebohongan dalam media sosial untuk keuntungan dirinya (Nurudin, 2015).

Dampak dari ketidakpedulian masyarakat pada sesama ini membuat mereka hanya mementingkan tujuan, yakni asal tujuannya tercapai. Persoalan apakah tujuan itu merugikan orang lain atau tidak, tak pernah dipikirkan. Karena tujuannya hanya biar dianggap keren di media sosial, ia akan melakukan pembohongan-pembohongan.

Tak jarang orang mengunggah foto di media sosial agar dikomentari teman-temannya. Jika tidak ada komentar banyak, ia akan kirim foto lagi bahkan diedit sedemikian rupa agar kelihatan lebih keren. Juga, mereka mau-mau saja menampilkan foto biasa dengan latarbelakang tempat tertentu biar dianggap keren. Misalnya latarbelakang menara kembar di Kuala Lumpur, biar seolah-olah ia pernah ke sana.

Mereka yang sering memasang foto-foto selfie di media sosial pernah disindir oleh Erik Qualman dengan istilah *braggadocian behavior*. Dalam bukunya berjudul *Socialnomics How Social Media Transforms The Way We Live and do Business* (2010), Qualman menjelaskan bahwa ciri kelompok ini sering *update* status di media sosial, upload foto-foto yang dianggapnya keren agar dianggap orang lain melakukan kegiatan yang elok, istimewa, wah dan semacamnya. Jika ia mengupload foto, akan bergaya narsis yang menurut mereka layak diketahui orang lain. Mereka beranggapan bahwa cara-cara semacam itu membuat dirinya bisa eksis

di dunia masa kini (Nurudin, 2012).

Ini hampir sama sebagaimana dilakukan oleh para komedian atau artis *stand up comedy*. Karena memang bertujuan untuk menghibur, apapun dilakukan (termasuk berbohong) yang penting menghibur. Anehnya, komedian membawa perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang tanpa sadar tak bisa membedakan dirinya sebagai komedian atau sebagai manusia nyata dalam kehidupan sehari-hari karena seringkali dicampuradukkan.

Tak terkecuali, mereka yang sering mengunggah foto selfie, sama dengan komedian atau artis *stand up comedy*. Kadang dalam kehidupan nyata ia berperilaku layaknya sedang menghibur orang lain di atas panggung, meskipun bicaranya terkesan serius tetapi ia sedang berakting.

Apakah Ini Karakter Kita?

Perilaku foto selfie sebagaimana digambarkan pada kebun bunga amarilis bisa dikontekskan pada skala yang lebih luas; *pertama*, kita masih menjadi individu yang latah. Bahkan jika kenyataan ini kita seret pada persoalan yang lebih luas menjadi penyakit bangsa yang akut. Kita sering latah, yang tak peduli dengan kepentingan orang banyak.

Coba lihat saja status di media sosial. Meskipun Pemiihan Presiden (Pilpres) sudah usai, tetapi “perseteruan” dan perang dingin antar pendukung terus berlanjut. Ketika presiden lambat dalam merespon persoalan masyarakat, ini kesempatan kelompok “musuhnya” untuk menyerang. Saat Setya Novanto (ketua DPR) tersandung kasus Freeport, yang tidak suka dengan gencar menyerangnya pula. Kebencian pada presiden atau anggota DPR sudah mengarah pada suka dan tidak suka pada individu. Mengapa kita tidak menjadi bangsa yang saling belajar dengan mempunyai dua cermin? Satu cermin untuk melihat kekurangan diri dan satu cermin lainnya untuk melihat kelebihan orang kelompok lain. Saat ini yang terjadi justru sebaliknya.

Kedua, kita masih menjadi bangsa yang munafik sebagaimana ciri manusia *braggadocian behavior*. Terhadap diri sendiri saja munafik, apalagi pada orang lain. Kita tidak pernah jujur dan sportif mengakui kelebihan orang lain. Yang melulu kita tonjalkan adalah kelebihan diri sendiri yang bisa jadi tidak substansial.

Foto selfie dengan akibat buruk telah menjadi barometer bagaimana perilaku kita atas diri kita, sesama, dan bangsa dalam skala lebih luas.

Banyaknya kejadian yang tidak mengarah pada kemajuan bangsa ini seharusnya menjadi teladan baik, bukan malah saling menertawakan apalagi saling mengejek.

Daftar Pustaka

Firdaus, Haris. 2015. "Berwisata di Era Selfie". *Kompas*, 30 November 2015.

Nurudin. 2012. *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. Yogyakarta: Buku Litera.

_____. 2015. "Foto Selfie dan Gejala Sosiopat". *Malang Post*, 8 Juli 2015.

Qualman, Erik. 2010. *Socialnomics How Social Media Transforms The Way We Live and do Business*. New York: John Willey and Sons.

Warta Kota. 2015. "Wow, Selebriti Ramai-ramai Selfie Sambil Menyusui" dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/02/wow-selebriti-ramai-ramai-selfie-sambil-menyusui> diakses tanggal 7 Desember 2015, jam 22.10 WIB.

Menyoal Bentuk dan Peran Identitas Kolektif Dalam Gerakan Sosial

Oleh Rachmad K Dwi Susilo

Pendahuluan

Gerakan sosial menjadi perhatian yang menarik ilmuwan-ilmuwan sosial, seperti: sosiolog, psikolog, antropolog dan ilmuwan politik. Salah satu sebab karena fenomena ini begitu dinamis. Gerakan sosial merupakan instrumen penting untuk terjadinya perubahan sosial (Hunt dan Horton, 1989: 195).

Para sosiolog menjelaskan gerakan sosial ini dalam dua perspektif yang bisa dibagi secara garis besar yaitu perspektif struktur dan kultur. Perspektif struktur menjelaskan kemunculan dan perkembangan gerakan dari faktor di luar aktor, seperti: mobilisasi sumber daya dan kesempatan politik. Kemudian disusul perkembangan berikutnya yang mengkaji potensi-potensi aktor yang berkontribusi. Pada perspektif kedua, potensi-potensi individu lebih penting dari pada struktur. Dua teori yang dihasilkan dari perspektif kedua ini yaitu identitas kolektif dan pengkerangkaan (*framing*) isu.

Selain itu, ketertarikan sosiolog mendorong mereka membagi isu dalam gerakan sosial lama dengan gerakan sosial baru. Jika gerakan sosial lama menekankan pada isu-isu determinisme ekonomi, gerakan sosial baru menekankan pada isu-isu non ekonomi, seperti: identitas, kultur, gender dan lingkungan. Teori gerakan sosial baru melihat logika tindakan berdasar pada politik, ideologi, kultur dan sumber-sumber identitas (etnis, gender dan seksualitas). Gerakan ini menekankan proses yang mempromosikan otonomi dan penentuan diri (*self determination*) dari pada strategi untuk memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan (Buechler, Steven M, 1994).

Adapun identitas kolektif dalam gerakan sosial yang dimaksud yaitu:

a) Definisi bersama dari sebuah kelompok yang berasal dari solidaritas,

pengalaman dan kepentingan bersama (Taylor & Whittier dalam Choup, Marie Anne 2008),

- b) Definisi bersama dan interactive yang diproduksi oleh beberapa individual yang harus dinyatakan sebagai sebuah proses, karena ia dikonstruksi dan dinegosiasi oleh aktivitas berulang-ulang yang menghubungkan individu-individu dengan kelompok (Melluci dalam Jacquelien & Klandersmans).
- c) Menunjuk kepada hubungan-hubungan kultural, emosional, dan psikologis pada komunitas, praktik atau lembaga yang lebih luas. Ia merupakan persepsi dari status-status yang dibagi dan berakar pada kepentingan, pengalaman, dan motivasi bersama untuk aksi-aksi (Polleta & Jasper, 2001, Rupp & Taylor, 1999, dalam Trumpy, Alexa J, 2015).

Untuk memperjelas pemahaman, identitas kolektif sering dikontekskan dalam oposisi dengan kelompok lain, batas-batas identitas yang kuat menekankan kesamaan-kesamaan kelompok dan membedakan kelompok kita (*insiders*) dari kelompok di luar kita (*outsiders*) (Leitz, 2011 dalam Trumpy, Alexa J, 2015). Jenkins (2004) menyatakan bahwa dalam menjelaskan identitas perlu memahami kesamaan (*similarity*) dan perbedaan (*difference*).

Adapun ciri-ciri dari identitas kolektif, yaitu :

- 1. Sistem relasi dan representasi (Meluci dalam Saunders, Clare). Bersifat dinamis karena didefinisikan dan diredefiniskan oleh aktor-aktor yang terlibat,.
- 2. Identitas bisa dilihat sebagai hasil dan proses. Sebagai hasil ia merupakan produk dari kerja keras dan sebagai proses karena ia tidak sekali jadi, konsekuensinya identitas kolektif tidak sama.

Sementara itu, bentuk-bentuk identitas kolektif yaitu bahasa, ritual, artefak kultural dan praktik-praktik. Identitas ini diekspresikan dalam material kultural seperti nama-nama, narasi-narasi, simbol-simbol, gaya-gaya verbal, ritual dan pakaian (Polletta & Jasper, 2001).

Sedangkan peran identitas kolektif, yaitu:

- 1. Kreasi kolektif klaim.
- 2. Rekrutmen pada gerakan
- 3. Pengambilan keputusan strategis dan taktis

4. Hasil gerakan
5. Efek mengikat (*binding effect*) gerakan sosial
6. Ia memberikan aktivis konsep makna dan kepemilikan pada organisasi.

Jaringan organisasi-organisasi dan individu-individu yang menyusun gerakan tidak dapat didefinisikan kecuali jika mereka membagi identitas kolektif (Diani 1992 dalam Saunders, Clare, 2008).

Konteks Tulisan

Ada dua konteks yang melatarbelakangi tulisan ini, pertama, perkembangan pesat Kota Batu sebagai Kota Wisata. Ada dua kecenderungan yang muncul dari pariwisata di Kota Batu. Pertama, melalui rekaya sosial (*social engineering*) yang dimainkan negara, karakter Kota Batu yang sebelumnya kota pertanian (agropolitan) berubah menjadi kota jasa. Kedua, Dengan dikerjakan oleh investor-investor, lokasi-lokasi wisata baru digarap gencar-gencaran. Salah satu dari konsekuensi tersebut “infrastruktur pendukung” pariwisata, seperti villa, hotel, *resort* maupun *cottage* bermunculan. Begitu masifnya pembangunan infrastruktur pariwisata membawa kecenderungan kurang diperhatikannya regulasi dan kearifan lokal masyarakat sekitar.

Sementara itu, berkembangnya identitas kolektif dalam kelompok dilatarbelakangi oleh kemunculan dan perkembangan gerakan penyelamatan mata air di Kota Batu yang terjadi antara 2012-2015, dimana masyarakat pengguna air (Desa Bumiaji, Desa Sidomulyo, dan Dusun Cagar, Desa Bulukerto) dihadapkan pada rencana pembangunan hotel yang berlokasi dekat Sumber Air Gemulo, dimana jarak antara hotel dan sumber mata air kurang lebih 150 meter. Karena arti pentingnya mata air tersebut, masyarakat tiga desa memprotes rencana pembangunan hotel. Mereka meyakini bahwa pembangunan hotel rentan merusak mata air, baik pencemaran yang dihasilkan oleh limbah hotel maupun penggunaan paku bumi yang bisa mengalihkan arah mata air.

Dengan membentuk sebuah forum yang dinamakan Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA), tokoh formal maupun informal menginisiasi gerakan dengan tujuan penyelamatan mata air tersebut. Perjuangan tidak mudah karena baik pemerintah maupun pihak hotel tidak bersedia menghentikan pembangunan. Pihak hotel sudah mendapat perizinan dari pemerintah, sementara itu pemerintah tidak bersedia

mencabut izin pembangunan hotel tersebut, akhirnya selama tiga tahun kelompok ini menekan pemerintah agar mencabut izin pembangunan hotel.

Adapun strategi yang ditempuh yaitu strategi lokal dengan strategi nasional. Strategi lokal yaitu seperti membangun aliansi dengan LSM-LSM, menekan pengambil kebijakan (*lobby-lobby*, somasi dan demonstrasi), dan melakukan penguatan-penguatan internal komunitas. Sedangkan, strategi nasional yaitu melaporkan kasus ke lembaga-lembaga negara dan meminta lembaga-lembaga tersebut untuk memediasi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.

Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil yaitu walikota bersedia menandatangani surat pernyataan pencabutan izin pembangunan hotel. Kemudian, ketika pelaksanaan surat pernyataan tidak efektif, penghentian pembangunan hotel tidak dilakukan secara total, FMPMA melakukan penekanan ke Pemerintah Kota Batu kembali hingga keluar kebijakan penghentian aktivitas pembangunan hotel. Namun persoalan masih belum selesai atau strategi lokal dipandang tidak efektif, FMPMA mengembangkan strategi nasional dengan meminta mediasi ke lembaga-lembaga nasional di Jakarta.

Strategi ini membuahkan hasil, dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga nasional, seperti: Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI, Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) mengalir. Tiga lembaga ini mengeluarkan rekomendasi yang pada intinya menyatakan bahwa pembangunan hotel harus dihentikan. Sekalipun dukungan dari lembaga-lembaga nasional sudah diperoleh, aksi-aksi FMPMA ini, mendapat gugatan dari pihak hotel. Akhirnya, FMPMA mau tidak mau harus berhadapan dengan pengadilan.

Di Pengadilan Negeri Kota Malang persidangan digelar selama sembilan bulan yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa hakim menolak gugatan pihak hotel. Kemudian, pihak hotel melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Setelah menunggu selama delapan bulan akhirnya dihasilkan keputusan sama dimana menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Malang. Tidak berhenti di sini, pihak hotel melakukan banding ke Mahkamah Agung. Ketika artikel ini ditulis kasus ini belum selesai. Dari awal kemunculan dan perkembangan gerakan bisa dikatakan bahwa kelebihan gerakan penyelamatan ini memiliki nilai lebih karena

memiliki daya tahan yang kuat atau dalam bahasa yang populer dikenal sebagai keberlanjutan (*sustainable*).

Keberlanjutan dan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai gerakan dikarenakan gerakan ini berhasil membangun identitas kolektif. Identitas ini membedakan dengan kondisi desa/dusun pada waktu-waktu sebelum muncul gerakan, membedakan dengan gerakan-gerakan yang lain berhasil melahirkan sikap-sikap, ethos dan perilaku “baru”. Dikarenakan identitas kolektif ini juga, gerakan ini mampu mengundang pihak-pihak luar untuk bergabung pada gerakan dan gerakan mampu mengatasi konflik-konflik internal. Dengan kalimat lain bisa dikatakan bahwa identitas kolektif yang dibangun oleh tokoh-tokoh gerakan berperan penting baik dalam kemunculan maupun perkembangan gerakan. Identitas ini dibangun oleh para pengusung gerakan baik dari tokoh-tokoh komunitas maupun tokoh pendamping yang rata-rata berasal dari LSM. Untuk pembatasan topik/kajian bahwa tulisan ini hanya memfokuskan kepada : bentuk dan peran dari identitas kolektif. Oleh karena itu, tulisan ini lebih banyak mengkaji dari sisi komunitas yang diwakili oleh FMPMA.

Bentuk-Bentuk Identitas Kolektif

Selama menginisiasi gerakan penyelamatan mata air, identitas kolektif muncul di kalangan aktivis-aktivis FMPMA, sebagai berikut:

1. Identitas Pejuang Mata Air

Pejuang mata air merupakan istilah yang digunakan penulis, di lapangan, tokoh-tokoh gerakan menyebutnya tidak sama. Identitas ini dikonstruksi oleh baik tokoh-tokoh komunitas maupun para pendamping gerakan. Ada yang menyebut istilah ini dengan pejuang mata air, pejuang lingkungan atau kelompok peduli lingkungan. Pada saat mengadakan pertemuan gerakan, misalnya, Nugroho, tokoh gerakan dari Dusun Cangar, menyebut tokoh-tokoh gerakan dalam undangan dengan istilah pejuang. Kemudian, ketika memimpin rapat-rapat gerakan, tidak henti-hentinya ia mengingatkan bahwa mereka yang berjuang untuk penyelamatan mata air ini adalah pejuang.

Kemudian, pada pertemuan dan aksi-aksi gerakan, Dr. Purnawan D. Negara, pendamping gerakan, menyatakan bahwa tokoh-tokoh FMPMA adalah para pejuang lingkungan. Ia juga mengingatkan jaminan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 66 yang menyatakan bahwa mereka yang memperjuangkan

lingkungan yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana dan digugat secara perdata. Konstruksi ini berhasil membentuk identitas baru bagi tokoh-tokoh gerakan, dimana identitas sebelumnya sebagai petani, pengusaha atau peternak kelinci. Pernah suatu hari Chamim, tokoh dari Desa Bumiaji, ada pertemuan dengan salah satu dinas di Kota Batu. Ada salah satu birokrat yang memanggilnya “pejuang” dari Desa Bumiaji. Sementara itu, *jagongan* digunakan untuk memperkuat pemahaman atas bahan-bahan dalam pertemuan gerakan. Ketika mengobrolkan kisah-kisah penyelamatan mata air ini, mereka menyebutnya sebagai *wong-wong sing berjuang* (orang-orang yang berjuang).

Karakter utama pejuang mata air yaitu sensitif terhadap persoalan air di sekitar mereka. Jika sebelumnya kepedulian mereka terhadap persoalan ini rendah, tetapi setelah berpartisipasi dalam gerakan, mereka lebih sensitif. Misalnya, tidak mudah pihak luar, baik pemerintah desa lain maupun pengusaha untuk mengambil air dari sumber-sumber air di desa-desa penyokong gerakan ini. Pemerintah Desa Bumiaji, misalnya, menolak permintaan seorang pengusaha yang akan membangun hotel di Desa Giripurno (tetangga Desa Bumiaji) untuk mengambil air dari sumber yang terdapat di Desa Bumiaji. Hal ini karena baik pemerintah desa maupun masyarakat Bumiaji berkomitmen bahwa sepanjang warga Desa Bumiaji belum merasakan air, tidak boleh air diberikan ke desa-desa lain. Kasus sama, di Dusun Cangar, ketika Pemerintah Desa Giripurno akan mengambil air dari sumber air di dusun ini, spontan tokoh-tokoh FMPMA menentang keras. Salah satu pertimbangan yaitu desa tersebut tidak pernah ikut dalam perjuangan penyelamatan Sumber Gemulo. Kesadaran ini muncul ketika gerakan berlangsung.

Kemunculan sensitivitas ini dikonstruksi dalam pertemuan-pertemuan gerakan dan *jagongan* antar tokoh-tokoh gerakan. Dalam pertemuan-pertemuan selalu saja ada tokoh-tokoh yang menyinggung masalah air, Bambang Parianom, pendamping awal gerakan, misalnya menekankan arti pentingnya Kecamatan Bumiaji sebagai penyangga hulu Brantas. Menurutnya, pembangunan hotel akan rentan merusak sumber air Gemulo. Heran Tri, tokoh gerakan dari Desa Bumiaji, pada banyak kesempatan menyatakan bahwa pembangunan hotel pasti menggunakan paku bumi yang berpotensi merusak gentong air yang terletak di dasar *sumber gemulo*.

Tindakan yang selalu dilakukan oleh Zaenal, tokoh gerakan dari

Desa Sidomulyo yaitu pada setiap pertemuan, ia selalu memberikan informasi tentang krisis air di desa/kelurahan di Kota Batu. Misalnya, pengambilan air yang dilakukan oleh PDAM, tempat wisata dan konflik air yang dialami oleh penduduk. Dari karakter ini lahirlah tokoh-tokoh peduli lingkungan yang akan melawan siapapun yang akan mengancam keberadaan sumber air yang dimanfaatkan mereka.

Bentuk kongkret rasa kepedulian dan sensitivitas terhadap air di Dusun Cangar, Desa Bulukerto, ditunjukkan dengan berkembangnya organisasi-organisasi lingkungan, seperti: FMPMA, Pemuda Peduli Lingkungan (PPL) dan Nawakalam Gemulo. PPL adalah organisasi pemuda yang bergerak dengan isu-isu lingkungan. Jika FMPMA *concern* kepada advokasi, PPL lebih kepada pemberdayaan potensi-potensi pemuda Dusun Cangar untuk konservasi lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan bercorak budaya. Sedangkan Nawakalam Gemulo adalah perubahan dan pengembangan dari PPL. Dibanding PPL, kegiatan Nawakalam Gemulo lebih terencana. Kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan seperti Peringatan Hari Air, Festival Mata Air dan *tumpengan* dalam rangka *slametan* dusun.

Selain itu, sensitivitas pada isu lingkungan yang dimiliki tokoh-tokoh Nawakalam Gemulo ditunjukkan dalam bentuk keaktifan mereka pada kegiatan jejaring sosial. Keaktifan ini ditunjukkan ketika ada aksi solidaritas atas perjuangan lingkungan di Kota/Kabupaten lain, mereka aktif dan memberikan dukungan. Seperti, peringatan Korban Lumpur Lapindo, tewasnya pejuang lingkungan di Kabupaten Lumajang, dan lain-lain. Dari sini bisa dikatakan bahwa gerakan penyelamatan mata air memunculkan gerakan lingkungan yang merupakan kreasi identitas baru yaitu identitas sosio-biologis yang menunjukkan sebuah budaya dari spesies manusia sebagai komponen alam. Identitas ini melapiskan ke atas pada aspek-aspek beragam dari tradisi, historis, bahasa dan simbol-simbol kultural (Castell, Manuel, 2010:184).

2. Komunitas Pembelajaran

Salah satu dari “berkah” kemunculan dan perkembangan gerakan ini, yaitu kemunculan komunitas pembelajar di Dusun Cangar, Desa Bulukerto. Komunitas pembelajar yang dimaksud yaitu sekumpulan orang yang selalu semangat belajar dan membaca semua informasi terkait lingkungan, pembangunan dan informasi-informasi politik di Kota Batu. Semangat belajar tokoh-tokoh gerakan terlihat sejak awal gerakan,

terutama pada saat pertemuan dengan pengambil kebijakan dengan menyampaikan argumen-argumen mengapa menolak pembangunan hotel.

Dua regulasi yang selalu diikuti oleh para tokoh yaitu:

- a. Tentang perizinan hotel dimana mengatur jarak pembangunan hotel tidak boleh di bawah 200 meter dan pemenuhan berkas-berkas dokumen perizinan seperti upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Tentang perlindungan bagi aktivis lingkungan, seperti dinyatakan pada pasal 66 UU LH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Proses belajar dalam komunitas bukanlah diselenggarakan secara formal dengan dibimbing guru atau dosen tertentu. Proses pembelajaran ini berjalan dimanapun dan kapan pun. Baik pada pertemuan-pertemuan formal/informal FMPMA, PPL dan Nawakalam Gemulo, tokoh-tokoh berdiskusi dan mengkritisi perkembangan Kota Batu. “Guru-guru” mereka adalah pengalaman, akademisi, tokoh-tokoh LSM, tokoh-tokoh budaya yang datang ke Dusun Cangar. Cara-cara belajar mereka yaitu melakukan pengamatan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, mengobrolkan berita-berita di TV di saat *jagongan* dan berdiskusi dengan berbagai pihak dengan latar belakang beragam, apakah seniman, dosen, aktivis LSM dan pegawai pemerintah.

Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh-tokoh gerakan selalu melakukan update informasi dari televisi yang ditonton baik televisi lokal maupun nasional. Misalnya, Wirai, Zaenal dan Nugroho selalu menonton dan mengkritisi diskusi yang diselenggarakan *Indonesian Lawyer Club* (ILC) di TV One. Selain itu, isu lingkungan, politik dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang terjadi di Kota Batu maupun daerah-daerah lain di Indonesia.

Kondisi ini benar-benar berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya dimana rata-rata warga Cangar tidak peduli dengan berita-berita di televisi dan isu-isu lingkungan di sekitar mereka. Pembelajaran ini yang akhirnya menggeser dari karakter gerakan yang memanfaatkan *okol* (tenaga) menjadi gerakan yang menggunakan pikiran. Jika sebelumnya menghindari perdebatan dengan pihak lain (berprinsip *sing penting pokoke*), kini tokoh-tokoh gerakan siap melakukan perdebatan dengan siapapun.

Produk-produk dari komunitas pembelajar, yaitu: a). gerakan anti kekerasan, b). tidak membawa gerakan kepada kepentingan politik golongan, dan c) Kritis dengan agenda pemerintah/negara.

a). Gerakan Anti Kekerasan

Sejak gerakan muncul, anti kekerasan menjadi ciri khas FMPMA. Tokoh-tokoh gerakan mencari informasi tentang kebenaran pembangunan hotel. Pada awal-awal gerakan, Untung Santoso, tokoh Dusun Cangar, ditantang oleh Kepala Dusun Cangar yang mendukung pembangunan untuk membuktikan bahwa hotel beresiko merusak sumber mata air. Tantangan ini yang memotivasinya mencari data sebanyak-banyaknya, akhirnya tradisi mencari dan membaca data-data menjadi kebiasaan tokoh-tokoh FMPMA.

Kemudian rasionalitas mereka menyatakan bahwa sekalipun mereka siap “berani mati”, wajib menghindari resiko-resiko yang akan merugikan mereka. Akhirnya data-data dicari, baik pada baik informasi yang dimiliki Pemerintah Desa Bulukerto, Pemerintah Kota Batu maupun dari LSM-LSM. Dengan demikian berargumentasi menjadi kultur antikekerasan. Sekalipun pada pertemuan-pertemuan, tokoh-tokoh gerakan *gregetan* dengan ketidakaktifan desa-desa pengguna mata air, kemudian ada beberapa tokoh yang mengusulkan agar pipa air mereka dirusak, tetapi usulan tersebut tidak disetujui peserta pertemuan.

Kemudian, strategi anti kekerasan dilakukan dengan melakukan kampanye, aksi-aksi dan penguatan-penguatan ritual atau kebudayaan. Tokoh-tokoh gerakan memakai kaos yang bertuliskan pasal 66 UU No 32 Tahun 2009. Dari isi pasal ini ada dua pengertian, yaitu: 1). mereka percaya diri bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar aturan karena ada jaminan hukum dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan 2). Dengan pasal ini mereka tidak akan melakukan tindakan anarkhis. Yunanto, tokoh Dusun Cangar, menyatakan bahwa pasal ini akan berlaku bagi mereka, sepanjang tidak melakukan tindakan anarkhis.

Bentuk kampanye yang lain yaitu pengiriman surat-surat ke dinas-dinas pemerintah, lembaga-lembaga negara di Jakarta dan aliansi-aliansi peduli lingkungan. Selain menginformasikan tentang pembangunan juga melakukan penekanan dalam bentuk somasi. Sementara itu, penguatan-penguatan ritual atau kebudayaan Peringatan Hari Air Sedunia dan Festival Mata Air yang dihubungkan dengan ritual dan kebudayaan. Tujuan mereka yaitu menunjukkan bahwa gerakan masih solid dalam

memperjuangkan penyelamatan mata air dan mengkampanyekan kearifan lokal.

Pemahaman seperti ini dikonstruksi oleh para pengusung gerakan lewat pertemuan-pertemuan gerakan, dimana semua elemen menekankan bahwa gerakan penyelamatan sumber gemulo ini gerakan damai. Tokoh-tokoh gerakan bersepakat bahwa jika melakukan tindakan anarkhis, maka isu gerakan bisa bergeser kepada isu yang destruktif lain. Oleh karena itu, anti kekerasan menjadi identitas kolektif dari gerakan ini.

b). Tidak Membawa Gerakan kepada Kepentingan Politik Pribadi/ Golongan

Selain menggunakan strategi/taktik anti kekerasan, tokoh-tokoh gerakan ini tidak membawa gerakan kepada individu atau golongan tertentu. Padahal rata-rata tokoh gerakan aktif pada partai-partai politik dan LSM-LSM lokal. Kemudian, ketika FMPMA masih memperjuangkan tuntutan, di Kota Batu terjadi pergantian pimpinan daerah, kemudian kegaduhan politik terjadi yaitu terbelahnya kelompok pendukung walikota *incumbent* dan ada yang bukan pendukung walikota *incumbent*. Ada dua tokoh FMPMA yang ikut dalam hajatan politik ini. Sekali lagi, mereka berpartisipasi aktif pada pilkada tidak membawa agenda atau isu FMPMA.

Mekanisme diri (*self mechanism*) dari gerakan ini yaitu tidak membawa gerakan ke arus politik pragmatis. Misalnya, pada awal-awal gerakan ada tawaran pendampingan hukum dari Partai GOLKAR, tetapi tawaran ini ditolak oleh FMPMA, sebab ada satu tokoh gerakan mengancam akan keluar dari gerakan. Demikian, juga ketika ada tawaran bantuan dana untuk kampanye salah satu partai politik, Hari, tokoh gerakan dari Desa Sidomulyo, menentang keras keterlibatan itu. Dengan demikian membawa gerakan kepada kepentingan politik bisa dihindari.

c) Kritis dengan Agenda Pemerintah/Negara

Selain tidak membawa politik golongan dalam FMPMA, identitas kolektif terlihat dari kekritisannya tokoh-tokoh terhadap kebijakan dan perilaku birokrat negara. Mereka mengkritisi pembangunan tempat-tempat wisata yang baru, perilaku anggota DPRD, perilaku walikota, perilaku birokrat, pembangunan taman kota dan perilaku kepala desa/camat. Akhirnya sikap kritis terhadap negara terbentuk di tokoh-tokoh utama FMPMA. Lebih lanjut, kekritisannya dengan negara ditunjukkan dengan sikap-sikap sebagai berikut: 1). Menolak tawaran program

pemerintah. 2). tidak membayar pajak sebagai bentuk protes izin pembangunan hotel dan 3). tidak datang pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Ada dua sebab mengapa mereka kritis terhadap pemerintah, yaitu pertama, pengetahuan kolektif mereka yang menyatakan bahwa lemahnya gerakan jika sudah kerja sama dengan pihak yang dikritik. Oleh karena itu, langkah awal menguatkan gerakan yaitu membentengi tokoh-tokoh gerakan dari suap, baik dari investor maupun orang-orang pemerintah. Penolakan kompromi dengan pemerintah menjadi sesuatu yang merugikan gerakan telah menjadi pengetahuan kolektif rata-rata tokoh gerakan.

Kedua, kekecewaan dengan janji-janji politisi. Politisi yang terlibat dalam gerakan ini yaitu kepala desa, walikota dan DPRD Kota Batu. Kekecewaan kepada sikap kepala desa ditunjukkan dengan ketidakpedulian mereka atas keberadaan lembaga-lembaga desa. Misalnya, akibat gerakan ada dua posisi lembaga desa yang ditinggalkan, yaitu Kepala Urusan Pemerintahan (kaur pemerintahan) dan Kepala Dusun Cangar. Kaur pemerintahan ditinggalkan Agus karena ia bergabung di FMPMA, sedangkan Kepala Dusun Cangar kosong karena pejabat tersebut diberhentikan oleh Kepala Desa Bulukerto atas desakan warga. Dua posisi ini dibiarkan tidak terisi dan ketika pemerintah berencana melakukan pemilihan ulang, tokoh-tokoh gerakan menanggapi dengan apatis.

Peran Identitas Kolektif Untuk Keberlanjutan Gerakan

Identitas kolektif memiliki peran penting dalam memberikan kekuatan baik kepada tokoh-tokoh gerakan maupun kolektivitas yang terhimpun dalam FMPMA. Menariknya, FMPMA bukanlah sebuah organisasi formal, ia hanya forum untuk memfasilitasi gerakan. Oleh karena itu organisasi ini tidak memiliki struktur kaku dan berkarakter cair. Siapapun tokoh yang terlibat (baik dari Dusun Cangar atau luar Dusun Cangar) berkewajiban menginisiasi konsep dan aksi-aksi penting untuk penyelamatan mata air. Kemudian yang menonjol dari FMPMA ini adalah kolektivitas yang bekerja secara tim.

Untuk kepentingan analisis, peran-peran identitas kolektif bisa dijelaskan sebagai berikut:

a) Keberanian dan Konsistensi Menginisiasi Perlawanan

Keberanian menginisiasi perlawanan kepada pemerintah hasil dari pembelajaran sosial (*social learning*) yang dilakukan antara tokoh-tokoh komunitas dengan para pendamping gerakan. Kesiapan menerima ilmu-ilmu dari pihak-pihak lain merupakan modal penting yang memberikan pengaruh kepada mental mereka. Kepercayaan diri tokoh-tokoh terlihat ketika tidak ada rasa minder atau rendah diri ketika berhadapan dengan siapapun yang bergelar tinggi. Mereka belajar dari sumber manapun tentang resiko pembangunan hotel dan resiko yang akan diterima jika memperjuangkan sumber air. Selain itu, demikian pula, mereka belajar tentang saluran-saluran (*channels*) yang bisa digunakan untuk memperjuangkan gerakan.

b) Keterlibatan dan Mobilisasi Massa

Untuk menilai keberpihakan dalam gerakan, partisipasi dalam gerakan massa menjadi salah satu indikatornya. Dalam demonstrasi, persidangan dan pemanggilan pihak kepolisian, pengerahan massa selalu ditunjukkan. Bahkan, pada satu demonstrasi, warga dari Dusun Cangar mematikan pipa air, sehingga semua warga dusun ini, termasuk tokoh-tokoh FMPMA tidak bisa menikmati air. Nugroho, tokoh gerakan dari dusun ini, menyatakan bahwa keputusan pipa merupakan pembelajaran masyarakat agar bisa merasakan dalam kondisi tidak ada air, sehingga mereka rela berkorban untuk terlibat dalam gerakan penyelamatan mata air ini.

c) Seleksi Aktor-Aktor Gerakan

Sejak kemunculan gerakan, seleksi atas tokoh-tokoh yang benar-benar berjuang untuk gerakan merupakan salah satu ciri penting gerakan. Tokoh-tokoh gerakan melakukan proses seleksi agar orang yang berjuang memiliki satu tujuan yaitu menyelamatkan mata air. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan ada tujuan yang lain seperti mengambil keuntungan yang bertentangan dengan gerakan. Tokoh-tokoh yang sebelumnya bergabung dengan gerakan dan memiliki kepentingan ganda akan dinilai (*dititani*) tokoh-tokoh gerakan. *Niteni* merupakan perilaku yang digunakan oleh tokoh-tokoh gerakan untuk menandai komitmen dan kredibilitas tokoh-tokoh yang terlibat. Ketika tokoh tersebut tidak kredibel maka tidak dilibatkan dalam gerakan.

d) Mengompakkan Tokoh-Tokoh Gerakan

Identitas kolektif mempengaruhi kekompakan tokoh-tokoh gerakan terlihat dari kepemilikan atas gerakan. Tokoh-tokoh gerakan menyatakan bahwa ia harus terlibat dalam aksi-aksi gerakan karena setiap gerak FMPMA selalu dimonitor musuh. Karena itu, kondisi gerakan harus dipertahankan. Tujuannya agar musuh tetap membaca bahwa gerakan masih solid.

Kekompakan tokoh-tokoh gerakan ditunjukkan dengan saling memberi kabar jika ada berita tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan, misalnya ada lawyer yang masuk televisi, Nugroho, tokoh gerakan dari Desa Bumiaji, memberitahukan lewat sms. Kemudian, pada saat bertemu mereka saling membicarakan tokoh tersebut. Kasus sama, ketika ada salah satu tokoh pendukung gerakan meninggal, maka berita ini disampaikan ke semua aktor gerakan.

Kemudian, kebanggaan sebagai tokoh-tokoh gerakan ditunjukkan dengan kekompakan ketika ada tokoh gerakan yang diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Setiap ada pemanggilan, tokoh-tokoh utama gerakan selalu mendampingi. Disinilah identitas kolektif terlihat dikalangan tokoh-tokoh gerakan. Kekompakan ini disebabkan oleh meningkatnya intensitas interaksi sosial antartokoh gerakan, dimana hubungan antarmereka yang sebelumnya tidak akrab menjadi akrab.

Kesimpulan

Identitas kolektif benar-benar menyumbang pada kemunculan dan keberlanjutan gerakan penyelamatan mata air ini, tetapi identitas ini sesungguhnya ia tidak berlangsung sempurna. Pendukung gerakan ini yaitu tiga desa, tetapi identitas kolektif ini terlihat secara jelas di Dusun Cangar. Bisa dikatakan dengan kalimat lain bahwa identitas ini tidak tersebar merata pada di Desa Sidomulyo maupun Desa Bumiaji. Salah satu faktor yang mempengaruhi ini karena penggerak gerakan yang bervariasi. Tokoh-tokoh gerakan di Dusun Cangar rata-rata anak muda, sementara itu dari Desa Bumiaji rata-rata orang tua, sedangkan dari Desa Sidomulyo bervariasi. Hanya dari segi jumlah, tokoh-tokoh di Desa Sidomulyo lebih sedikit.

Kemudian, pengaruh identitas kolektif tidak tetap, tetapi pasang surut. Pada saat FMPMA menginisiasi demonstrasi-demonstrasi dan

mendatangi persidangan tokoh-tokoh gerakan terlihat kompak. Kondisi berbeda yaitu setelah pihak hotel berniat menjual lahan hotel dan selesainya persidangan di PN Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya dimana memenangkan posisi FMPMA, identitas kolektif FMPMA terlihat mengendur. Bisa dikatakan bahwa kondisi identitas kolektif sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal gerakan. Kondisi internal seperti motivasi, persepsi dan makna, sedangkan kondisi eksternal sangat dipengaruhi oleh struktur sosial-politik dan budaya tempat berlangsungnya gerakan. Kedua kondisi tersebut bersifat dinamis.

Tulisan ini hanya memfokuskan kepada bentuk-bentuk dan peran-peran dari identitas kolektif, tetapi belum sampai menjelaskan terbentuknya identitas kolektif dan faktor-faktor apa yang menentukan kuat lemahnya identitas kolektif dan sisi positif/negatif identitas kolektif pada gerakan sosial. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan riset atau tulisan-tulisan lain.

Daftar Pustaka

Alexa J, 2015, *I Hate It, but It Still Sounds Good: Collective Identity and The Evaluation of The Oppositional Frame Resonance*, Social Movement Studies: Journal of Social and Political Protest, 2015

Buechler, Steven M, 1995, *New Social Movement Theories*, The Sociological Quarterly, Volume 36, Number 3, pages 441-464

Castell, Manuel, 2010, *The Power of Identity with A New Preface*, USA: Wiley Blacwell

Choup, Marie Anne, 2008, *The Formation and Manipulation of Collective Identity: A Framework for Analysis*, Social Movement Studies, Vol.7, No.2, September 2008, 191 207

Jacquelien & Klandersmans, 2007, *Individuals in Movement: Social Psychology of Contention* dalam Klandersman dan Roggeband, 2007, Handbook of Social Movement

Across Disciplines, Springer Science and Bussines Media, LLC

Jenkins, Richard, 2004, *Social Identity*, London: Routledge

Melluci, Alberto, 1996, *Challenging Codes; Collective Action in The Transformation Age*, Melbourne: Cambridge University Press

Paul, Horton & Chester, L Hunt, 1989, *Sosiologi Jilid 2*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Polleta & Jasper, 2001, *Collective Identity and Social Movement*, Annual Review of Sociology, 2001: 27, 283-305

Saunders, Clare, *Double-edged swords? Collective Identity and Solidarity in the environmental Movement* dalam *The British Journal of Sociology* 2008 Volume 59 Issue 2

Konstruksi Citra Politik: Kajian dalam Perspektif Komunikasi Politik

Oleh Zen Amirudin

Pendahuluan

Menarik apa yang disampaikan oleh Goenawan Muhammad yang membuat kesimpulan menyindir. Menurutnya, kehidupan politik telah berubah menjadi lapak dan gerai, kios dan show-room. Sebuah masa yang menempatkan hasil jajak pendapat umum jadi ukuran yang lebih penting ketimbang kebenaran. Dan penampilan yang atraktif, lebih efektif ketimbang prestasi dan gagasan sosial yang menggugah (Majalah Tempo, 27 Juli 2008).

Goenawan tidak berlebihan dengan kesimpulannya itu. Di berbagai negara, kemasam atau kemampuan mengelola citra menjadi penjelasan yang paling representatif dalam banyak pemilihan umum. Misalnya di Jerman, tahun 1998, Gerhard Schroeder begitu keras menentang penyatuan Jerman namun tidak pernah melakukan keputusan-keputusan politik yang berani. Ia mampu mengalahkan Helmut Kohl yang telah memimpin negara itu sebagai kanselir selama empat dekade dengan segudang prestasi dalam membangun Jerman dan Uni Eropa. Kekalahan Kohl karena citranya tidak tepat untuk *political picture* abad 21 yang pro keharmonisan dan keindahan. Sebaliknya, Schroeder tampil penuh keanggunan dan senyuman, memiliki daya tarik seksual (*sex appeal*) dan karakter yang halus (*smooth*).

Barack Obama di Amerika Serikat (2008), berhasil menambah referensi sejarah politik dunia; orang berkulit hitam pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Ini terjadi di negara yang selama ratusan tahun menjadikan kulit hitam sebagai budak. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kepiawaian Obama membangun citra sebagai pribadi yang merakyat, merangkul, jujur, pintar, dan berkeinginan kuat merubah peta politik Amerika Serikat. Ia pun berhasil merebut faktor keterkesanan atau *impression* pemilih, dibandingkan citra McCain, pesaingnya dari

Partai Republik. Daya pengaruh pencitraan politik ini, juga bermunculan di berbagai belahan negara. Di Inggris, Franklin (1994) menulis hasil kajiannya dalam buku *In Packaging Politics*. Di Perancis, Lindon (1976) menulis *Marketing Politique et Sosial*. Namun, perlu dipahami, sekalipun memiliki daya pengaruh yang luar biasa, aktifitas politik yang hanya mengedepankan pencitraan politik, tanpa dibarengi kualitas diri politik, pada akhirnya hanya meretas nihilisme. Corner dan Pels, menyebutnya *cynicism*.

Komunikasi dan Pencitraan Politik

Di negara kita Indonesia, pencitraan politik sebagai salah satu konsentrasi kajian dalam komunikasi politik, mulai merebak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999. Pencitraan politik semakin berkembang dan atraktif setelah penerapan sistem pemilihan langsung dalam Pemilu 2004, terlihat hingga Pemilu 2009 dan terakhir dalam 2014 ini. Seiring dengan perubahan sistem politik, utamanya dalam Pemilu 2014, dengan masa kampanye lebih lama dan sistem suara terbanyak, membuat komunikasi dan pencitraan politik yang dilakukan politisi, baik secara institusional maupun individual, semakin beragam dan menarik, melalui berbagai strategi yang terkadang mengabaikan etika politik.

Ada sejumlah strategi pencitraan yang dilakukan oleh para kandidat. Pertama, *Pure Publicity* yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Misalnya, moment hari-hari besar, perayaan Hari Kemerdekaan dan lain-lain. Pada umumnya, partai maupun kandidat, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencitrakan apa yang disebut Nimmo (1993) sebagai “diri politik” sang politisi.

Kedua, *Free Ride Publicity* yakni publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau “menunggangi” pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Tampil menjadi pembicara di sebuah forum, berpartisipasi dalam event-event olah raga, mensponsori kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Ketiga, *Tie-In Publicity* yakni memanfaatkan extra ordinary news – kejadian sangat luar biasa. Peristiwa tsunami, gempa bumi atau banjir bandang, gunung kelud meletus misalnya. Kandidat dapat mencitrakan diri sebagai orang atau partai yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sebuah peristiwa luar biasa, selalu menjadi liputan utama media, sehingga partisipasi didalamnya sangat menguntungkan secara politik.

Keempat, *Paid Publicity* yakni cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Misalnya, pemasangan advertorial, iklan, *blocking time* program, dan lain-lain. Seiring dengan itu, lembaga konsultan politik/agen pencitraan, yang melayani proyek pencitraan dari hulu sampai hilir, mulai dari pemetaan kelemahan dan kekuatan klien, survei opini publik, perumusan konsep iklan, pembuatan *tagline* (slogan), materi iklan, penempatan iklan di media, manajemen isu, hingga pengaturan acara klien, tumbuh bak jamur di musim hujan. Diantaranya, Fox Indonesia, Hotline Advertising, PT. Lingkaran Survei Indonesia, Finalpoint, dan lain-lain.

Biasanya bentuk pencitraan politik yang dilakukan terbagi dalam dua strategi, yaitu *Incumbent Vs Challenger*. Yang pertama menunjukkan pencapaian sehingga perlu untuk diteruskan. Sementara Challenger menunjukkan kegagalan-kegagalan kebijakan pemerintah sehingga tema kampanyenya adalah perubahan untuk digantikan secara konstitusional. Dua strategi itulah, pencitraan politik dilakukan untuk meraih simpati dan kepercayaan publik, melalui aneka ragam aksi.

Strategi *Challenger*, pada rangkaian Pemilu 2009, terlihat dari apa yang dilakukan Megawati Soekarno Putri yang dulu terkenal jarang berkomentar, apalagi mengkritik, saat ini justru lebih banyak mengkritik pemerintah, dalam ungkapan-ungkapannya seperti, “tebar kerja bukan tebar pesona” atau “bagaikan penari poco-poco”. Selain melontarkan kritik, Megawati juga giat melakukan berbagai safari politik, dengan mengunjungi desa terpencil, tempat pelelangan ikan, pasar, untuk mengukuhkan citra politiknya sebagai figur yang peduli terhadap wong cilik. Wiranto, secara dramatis ikut makan nasi aking bersama warga miskin dan mengiklankan diri di berbagai media massa.

Kalau dicermati sedikitnya terdapat tiga seri iklan Wiranto yang bertema kemiskinan, yang sekaligus mengkritik pemerintah. Seri pertama, tentang kesulitan hidup rakyat sehingga harus makan nasi aking. Seri kedua, jumlah rakyat miskin di Indonesia yang meningkat. Seri ketiga, menagih janji SBY untuk tidak menaikkan BBM. Prabowo Subiyanto juga gencar mencitrakan dirinya sebagai figur yang peduli dan berpihak terhadap rakyat kecil, melalui iklan layanan masyarakat/politik Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI),

Asosiasi Pedagang Pasar se-Indonesia, dan partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Dan memanfaatkan momentum 100

tahun Kebangkitan Nasional, Sutrisno Bachir muncul dan menyentak publik melalui slogan “Hidup adalah perbuatan!” Sementara bagi *incumbent*, pencitraan SBY tercermin dalam setiap iklan Demokrat yang menunjukkan hasil positif seperti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), program BLT, beras untuk masyarakat miskin (raskin), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan anggaran pendidikan. Begitupun JK (*incumbent* sekaligus *challenger* pada Pemilu 2009), muncul dengan tagline “Beri Bukti Bukan Janji” dan “lebih cepat lebih baik”, mengklaim keberhasilan swasembada beras dan pencapaian pembangunan infrastruktur yang merupakan kontribusi partai Golkar, yang dipimpinnya.

Dalam proses tersebut, tingkat popularitas dan elektabilitas calon presiden yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga survei sepanjang tahun 2011 dan 2013, menambah gemuruh kontestasi Pilpres 2014, di antara lembaga-lembaga survei tersebut: Indo Barometer, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Riset Indonesia (LRI), Lembaga Survei Nasional (LSN), National Leadership Centre (NLC), Reform Institute, dan Indonesian RDI.

Jeffrie Geovanie, mengutarakan dalam tulisannya ‘Persepsi Publik sebagai Panglima’. Bahwa, relasi politik antara Presiden Yudhoyono dan parpol mitra koalisi seperti Golkar (JK) yang terbangun adalah pola relasi yang tidak seimbang. Jika popularitas pemerintah meningkat, otomatis citra Presiden mengalami eskalasi, hal itu tidak berdampak secara linier terhadap partai-partai di barisan koalisi. Namun, jika popularitas dan citra pemerintah (Presiden Yudhoyono) dianggap buruk dan mengalami penurunan, partai-partai mitra pendukung pemerintah akan mendapatkan imbas penurunan itu.

Setelah SBY memastikan maju dalam Pilpres 2009, dan mensinyalir kembali berduet dengan JK, yang kemudian direspon secara positif oleh JK, membuat konstelasi Pilpres 2009 hanya terpola pada dua kubu, yakni kubu SBY dan Mega. Namun, seiring dengan perubahan konstelasi politik menjelang Pileg 2009, JK yang sebelumnya disebut-sebut hanya akan mengambil posisi Wapres berpasangan dengan SBY menyatakan kesediaannya sebagai Capres. Irama politik pun berlangsung dalam irama cepat. Pemicunya adalah soal angka 2,5 persen yang dilontarkan kader Partai Demokrat (PD). Hal ini membuat tersinggung orang-orang Partai Golkar. Ujungnya, seluruh pimpinan DPD Golkar “mendesak” JK maju

sebagai Capres, yang kemudian diamini oleh JK. Padahal, saat itu, ada upaya untuk melestarikan pasangan SBY-JK agar berpasangan kembali dalam Pilpres 2009. Semua survei pun selalu mengunggulkan pasangan ini. Dapat dikatakan, mereka tak terkalahkan. Namun, pecah kongsi keduanya membuat kontestasi politik semakin dinamis.

Kajian Komunikasi Politik

Studi komunikasi politik yang terorganisasi dapat ditandai dari analisa teknik propaganda Harold Lasswell (1927) yang kini dikenal sebagai bapak perintis ilmu komunikasi modern – ketika mengumumkan hasil penelitiannya tentang propaganda politik dalam *The American Political Science Review*. Hasil riset Laswell itu menjelaskan bagaimana “efek” dan “pengaruh” komunikasi massa. Menurutnya, sebuah tindak komunikasi bisa dianalisa dengan pertanyaan “siapa/mengatakan apa/ di saluran yang mana/ kepada siapa/dengan akibat (efek) apa”. Sebagai disiplin ilmu yang sekalipun interdisipliner; ilmu komunikasi, politik, sosiologi, psikologi, sejarah, retorika, dan lainnya, menurut Ryfe (2001), komunikasi politik tetap mendapatkan tempat, karena adanya komitmen teoritis dan metodologis pada riset-riset awal. Komitmen tersebut pada gilirannya dibentuk oleh tiga disiplin utama, yaitu; (1) Psikologi Sosial, (2) Riset Komunikasi Massa, dan (3) Ilmu Politik. Adapun, batasan wilayah studi komunikasi politik adalah; *opinion, attitudes, beliefs, politics as a process* dan *media effect*. Tetapi batasan ini, menurutnya bersifat fleksibel.

Luasnya bidang kajian komunikasi politik, pada akhirnya memunculkan banyak defenisi. Beberapa pakar/ilmuan yang memaparkan defenisi komunikasi politik, diantaranya; Mc. Nair (2003) dalam *An Introduction to Political Communication*, mendefenisikan komunikasi politik sebagai “*purposeful communication about politics*” yang meliputi: Pertama, semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi dan aktor-aktor politik lainnya dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Kedua, komunikasi politik ditujukan oleh aktor-aktor tersebut kepada non-politisi, seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. Ketiga, komunikasi tentang aktor-aktor tersebut, dan kegiatan-kegiatan mereka, seperti termuat dalam berita, editorial dan bentuk-bentuk media lainnya mengenai politik. Dan menurut Kaid (2004), sejauh ini, definisi terbaik komunikasi politik adalah ungkapan sederhana Chaffee (1975) bahwa komunikasi politik merupakan “*role of communication in the political*

process” penggunaan (ilmu) komunikasi dalam proses politik. Swanson dan Nimmo (1990) dalam *New Direction in Political Communication*, menegaskan bahwa, mainstream komunikasi politik adalah studi tentang strategi penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi pengetahuan publik, kepercayaan dan tindakan politik.

Adapun fungsi komunikasi politik, menurut Gazali, adalah: (1) Mengurangi ketidakpastian, (2) Untuk kepentingan publik (*prospective public policies*), (3) Sebagai alat untuk memprediksi dan, (4) Merencanakan dan menjelaskan komunikasi strategik. Seiring dengan perkembangan studi komunikasi politik, muncullah konsentrasi kajian yang disebut *Political Marketing*, yang secara khusus membahas bagaimana “menjual” produk politik (kebijakan, partai, kandidat) agar “laku” di masyarakat. Dalam perkembangannya kemudian, Keele, Jennifer Lees-Marshment, memperkenalkan apa yang disebut *Comprehensive Political Marketing (CPM)*. Menurut Lees, CPM tidak saja menginformasikan bagaimana cara berkampanye, namun juga bagaimana politisi mendesain kebijakan-kebijakannya atau organisasi mereka supaya bisa diterima oleh pasar. Lees menambahkan, konsep-konsep serta teknik-teknik marketing tidak saja bisa digunakan sebagai panduan bagi partai untuk mengkomunikasikan “produk” mereka namun juga bisa memandu bagaimana partai menentukan apa yang akan mereka produksi dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku terhadap pasar politik mereka.

Comprehensive Political Marketing (CPM) sebagai satu kerangka teoritis memiliki prinsip-prinsip kunci (*key principles*) sebagai berikut; *Pertama*, CPM memandang marketing politik lebih dari sekedar komunikasi politik. *Kedua*, CPM mengaplikasikan pendekatan marketing ke seluruh perilaku organisasi politik atau partai, tidak sekedar tentang bagaimana mereka berkampanye atau bagaimana kampanye diorganisir namun juga pada bagaimana partai mendesain produknya. Untuk itu, analisis marketing politik dalam CPM melingkupi perilaku partai dari awal sampai akhir lingkaran pemilihan politik, bukan sebatas masa kampanye, dan juga meliputi berbagai aspek seperti aspek kepemimpinan partai, para anggota parlemen dari partai itu, keanggotaan, struktur organisasi, simbol-simbol partai, konstitusi partai dan aktifitas-aktifitas partai.

Ketiga, CPM menggunakan konsep-konsep marketing seperti orientasi produk, sales atau market, bukan hanya teknik-teknik marketing

seperti intelijensi pasar, desain produk atau promosinya. *Keempat*, CPM mengintegrasikan ilmu politik dalam analisisnya dan konsep-konsep marketing digunakan untuk penyesuaian dengan pemahaman yang ada dari pembahasan tradisional tentang partai politik. *Kelima*, CPM mengadaptasi teori marketing dan menyesuaikan teori-teori itu dengan hakekat yang berbeda dari dunia politik. Konsep-konsep marketing tentang produk, harga, tempat dan promosi disesuaikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan aktifitas politik partai.

Pencitraan Politik

Citra adalah dunia menurut persepsi kita, atau *pictures in our head* (Water Lippman, 1965), yang merupakan gambaran tentang realitas, mungkin saja tidak sesuai dengan realitas. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima melalui berbagai media, utamanya media massa cetak dan elektronik, yang bekerja membentuk, mempertahankan, atau mendefinisikan citra. Dari sudut pandang ilmu sosial, salah satu pendekatan teoritik tentang penciptaan citra adalah *impression management*-manajemen kesan, dimana citra dipandang sebagai kesan seseorang atau suatu organisasi terhadap orang atau organisasi lain.

Menurut Nimmo (1978), citra adalah segala hal yang berkaitan dengan situasi keseharian seseorang; menyangkut pengetahuan, perasaan dan kecenderungannya terhadap sesuatu. Sehingga citra dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu. Teori *image building* menyebutkan bahwa, citra akan terlihat atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (panca indra), masuk ke saringan perhatian (*attention filter*), dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti (*perceived message*), yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya membentuk citra. (M. Wayne De Lozier, 1976:44).

Gunter Schweiger dan Michaela Adami (1999) mengemukakan, citra merupakan gambaran menyeluruh yang ada di kepala pemilih mengenai kandidat maupun program. Kedua penulis ini berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan tidak selamanya dipengaruhi oleh pengetahuan pemilih tentang program-program partai maupun oleh informasi-informasi yang membangun brand politik, tetapi proses itu bisa jadi dipengaruhi kuat oleh *impression* (keterkesanan) dan *nonrational evaluation criteria* (kriteria yang tidak rasional yang dipakai pemilih dalam mengevaluasi para kandidat/parpol).

Bruce Newman (1994) dalam bukunya *The Marketing of The President: Political Marketing as Campaign Strategy* mengemukakan bahwa saat ini kampanye politik telah berjalan menggunakan kaidah-kaidah bisnis, termasuk prinsip-prinsip pemasaran yaitu: *marketing research, market segmentation, targeting, positioning, strategy development* dan *implementation*. Artinya, perubahan-perubahan dalam demokrasi politik telah memperlihatkan bahwa kecenderungan terhadap stylisasi estetika (*aesthetic stylisation*) itu berlangsung alamiah dan tak mungkin dihindari dalam sistem pemilihan langsung. Kecenderungan natural inilah yang menjelaskan mengapa citra, yang dimiliki kandidat semakin berpengaruh terhadap pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Menyikapi perkembangan politik pencitraan dalam pentas demokrasi Indoensia, Gazali menilai, dalam level sederhana politik pencitraan termasuk *political marketing*, karena kandidat dipasarkan mirip menjual sebuah produk. Jika lebih canggih, bisa dikategorikan politik komunikasi, yaitu politisi mensosialisasikan kebijakan secara substansial dengan cara-cara yang memikat publik. Sebagai unsur terpenting yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, maka tidak mengherankan jika politisi memanfaatkan konsep citra untuk menjembatani jarak antara perilaku pemilih yang dipahami politisi dengan apa yang sesungguhnya tersimpan di benak para pemilih (Nimmo, 1974 dalam newman, 1999:354).

Citra di dalam politik sebenarnya lebih dari sekedar strategi untuk menampilkan kandidat kepada para pemilih. Tetapi juga berkaitan dengan kesan yang dimiliki oleh pemilih baik yang diyakini sebagai hal yang benar atau tidak. Artinya, citra lebih dari sekedar pesan yang dibuat oleh kandidat ataupun gambaran yang dibuat oleh pemilih, tetapi citra merupakan negosiasi, evaluasi dan konstruksi oleh kandidat dan pemilih dalam sebuah usaha bersama. Dengan kata lain, keyakinan pemilih tentang kandidat berdasarkan interaksi atau salingbergantungan antara yang dilakukan oleh kandidat dan pemilih. Dengan demikian citra adalah transaksi antara strategi seorang kandidat dalam menciptakan kesan personal dengan kepercayaan yang sudah ada dalam benak para pemilih.

Menurut McGinnis, (1970) dalam Kavanagh (1995:13), pemilih sesungguhnya melihat kandidat bukan berdasarkan realitas yang asli melainkan dari sebuah proses kimiawi antara pemilih dan citra kandidat (gambaran imajiner). Citra yang baik, dengan sendirinya

akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat, begitupun sebaliknya. Sehingga, tidak salah bila politisi “jumpalitan” melakukan pencitraan politik. Karena semakin dapat menampilkan citra yang baik, maka peluang untuk meraup dukungan pemilih semakin besar. Namun dalam konteks pembentukan citra, tidak sedikit yang kehilangan kekuatan penarik perhatian (*eye catching*). Citra yang sebelumnya diharapkan mampu menciptakan kejutan, stimulasi, dan gebrakan informasi tak terduga (*entroy*) berubah menjadi pengulangan-pengulangan yang terduga (*redundancy*). Citra-citra berestetika dan berselera tinggi, karena kehabisan perbendaharaan tanda, pada akhirnya menjadi citra-citra yang murahan dan dangkal. Dalam konteks komunikasi politik, hal ini berlangsung saat citra-citra politik tampil dalam jumlah banyak, frekuensi tinggi, dan waktu cepat sehingga menyebabkan pesan yang disampaikan tidak lagi menarik perhatian publik.

Menurut Yasrif Amir Piliang, proses ini dapat dilihat dalam beberapa logika, yakni: Pertama, logika kecepatan (*speed*), saat ada kecenderungan di kalangan tim pemenangan (capres-cawapres) mengerahkan segala potensi dan perbendaharaan tanda, citra, dan narasi dalam waktu yang dipadatkan (*time compression*) sehingga pada satu titik tertentu menimbulkan kejenuhan publik. Kedua, logika ekstasi komunikasi (*ecstasy of communication*), yaitu ekstasi dalam penampakan citra diri (*appearance*) capres secara habis-habisan dengan mengerahkan segala potensi citra yang ada, bahkan citra yang telah “melampaui” kapasitas, kemampuan, kompetensi, dan realitas yang bersangkutan-tanpa mempertimbangkan kaitan antara waktu penayangan dan kondisi psikologi massa. Ketiga, logika tontonan (*spectacle*), yaitu kampanye politik capres dan cawapres yang telah bergeser ke arah bentuk tontonan massa, dengan mengikuti prinsip dan logika tontonan umumnya, yaitu memberi kesenangan, hiburan, kepuasan semaksimal mungkin, dengan menggali berbagai efek kelucuan, humor, dan dramatisasi yang bersifat palsu tanpa ada ruang untuk menginternalisasikan makna-makna politik yang sesungguhnya. Keempat, logika simulakrum (*simulacrum*), yaitu eksplorasi perbendaharaan tanda dan citra secara berlebihan dan “melampaui batas” sehingga antara citra politik yang ditawarkan dan realitas capres-cawapres sebenarnya ada jurang amat dalam. Inilah capres yang dicitrakan “sederhana”, “bersahaja”, dan “merakyat”, padahal hidup dalam kemewahan dan kelimpahan harta.

Kelima, logika mitologisasi (*mithologisation*). Berbagai bentuk mitos, fantasi, dongeng, fiksi, imajinasi, halusinasi- yang bukan bagian realitas seorang capres-cawapres-kini ditampilkan seakan- akan sebagai “realitas” yang sebenarnya. Inilah mitos-mitos tentang keturunan, asal-usul, kesuksesan atau kebesaran masa lalu, yang sebenarnya bukan merupakan realitas masa kini. *Keenam*, logika pencitraan sempurna (*perfection of image*), yaitu penggambaran citra seorang capres-cawapres sebagai sosok sempurna, seakan-akan tanpa cacat, kelemahan, dan dosa. *Ketujuh*, logika budaya populer (*popular culture*), yaitu menampilkan citra- citra dangkal, permukaan, dan populer dalam rangka mendekati seorang capres dan cawapres dengan massa populer (*popular mass*). Inilah iklan-iklan politik yang menggunakan gambar anak sekolah, kelompok subkultur, budaya anak muda, bahasa gaul, bahasa populer, gaya selebriti guna menarik massa. *Kedelapan*, logika obesitas (*obesity*), yaitu terlalu padat, cepat, dan tinggi frekuensi penayangan citra-citra iklan politik, sehingga menimbulkan sebuah kondisi terlalu menggembungkan tanda dan informasi, yang tidak sebanding dengan kemampuan publik dalam memersepsi, menerima, membaca, memaknai, dan menginternalisasikannya dalam sebuah sikap atau preferensi politik. Maka untuk menghindarkan proses pencitraan dari hal tersebut, dibutuhkan manajemen pencitraan (*management of image*) yang efektif sehingga di satu pihak citra dapat menarik perhatian dan simpati publik, di pihak lain mampu pula menjadi ajang pendidikan politik.

Di antara media pencitraan politik yang sangat menonjol saat ini adalah industri media massa. Kekuatan utama media di era informasi adalah kemampuan media dalam mengkonstruksi realitas. Artinya, kekuatan dalam mengemas berbagai isu yang ada, sehingga menonjol ke permukaan dan akhirnya menjadi perbincangan publik (*public discourse*) yang menarik. Artinya, penguasaan atas media akan menjadi pintu masuk dalam pengemasan dan penguasaan opini publik. Selanjutnya, dengan menguasai opini publik diharapkan akan mudah mengarahkan kecenderungan pilihan khalayak sesuai dengan yang diharapkan. Opini dalam perspektif komunikasi dipandang sebagai respon aktif terhadap stimulus yakni respon yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari citra dan menyumbang citra.

Oleh karena opini merupakan respons yang dikonstruksi, maka sangat strategis jika politisi yang bertarung memiliki perhatian pada politik

pengemasan opini. Paling tidak, ada tiga komponen utama di dalam sebuah opini, yaitu: Pertama, keyakinan yang terdiri dari credulity atau soal percaya dan tidak terhadap sesuatu. Dengan marketing yang baik, khalayak akan digiring untuk mempercayai apa yang menjadi konsep dan tawaran kandidat. Semakin besar kepercayaan khalayak terhadap kandidat, maka opini yang berkembang akan semakin positif.

Kedua, di dalam opini juga terkandung nilai berbentuk nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*) dan nilai-nilai deferensi (*deference value*). Nilai-nilai kesejahteraan antara lain pencarian kesejahteraan, kemakmuran, dan keterampilan. Sementara nilai-nilai deferensi antara lain penanaman respek, reputasi bagi *moral rectitude*, perhatian dan popularitas serta kekuasaan. Dengan memahami komponen-komponen nilai tersebut, kandidat seyogyanya memahami benar jika opini tidak bisa dibiarkan mengalir secara bebas, melainkan harus dikonstruksi. Tentunya dengan cara-cara yang elegan. Ketiga, opini juga terdiri dari komponen ekspektasi. Yakni komponen yang berkaitan dengan unsur konatif. Ini merupakan aspek dari citra pribadi dan proses-proses interpretasi yang terkadang disamakan oleh para psikolog sebagai impuls, keinginan (*volition*) dan usaha keras atau *striving*. Kesadaran untuk mengemas opini publik adalah kesadaran untuk menyelaraskan keinginan dan usaha keras pencapaian tipe ideal sebuah tatanan dengan tipe ideal yang diharapkan khalayak pemilih. Artinya, semakin luas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih, maka peluang kandidat untuk memenangi pertarungan citra lebih besar.

Penutup

Sebagain besar proses komunikasi politik merupakan *mediated politics* atau bahkan *media-driven politics*. Artinya, proses memproduksi dan mereproduksi berbagai sumber daya politik, seperti menggalang dan menghimpun dukungan politik dalam pemilu, merekayasa citra dan sebagainya, dapat dijembatani atau bahkan dikemudikan oleh industri media. Maka keberhasilan politisi di era ini, akan banyak ditentukan oleh kemampuannya membangun jaringan atau akses terhadap media, untuk kemudian mengelola opini, persepsi, merebut simpati, dan sebagainya melalui media.

Mc Nair menyatakan bahwa, dalam era mediasi tersebut, fungsi media massa dalam komunikasi politik bisa menjadi penyampai (*transmitters*)

pesan-pesan politik dari pihak-pihak di luar dirinya, sekaligus menjadi pengirim (*senders*) pesan politik yang dibuat (*constructed*) oleh wartawan kepada khalayak. Artinya, secara teoritis, hubungan politisi dan media bisa berjalan harmoni. Media massa bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media juga bisa memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat kepada para politisi. Media massa adalah ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Dari sekian banyak media massa yang dapat memediasi kegiatan politik, yang dianggap paling efektif adalah televisi. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan istilah tele-politics. Tele-politics adalah sebuah fenomena baru yang menandai bergesernya peran partai politik dan munculnya dominasi media massa terutama televisi dalam menjangkau pemilih. Televisi muncul sebagai kekuatan baru yang lebih masif dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia paling banyak mendapatkan informasi politik melalui televisi (87%). Berbeda dengan pertemuan-pertemuan politik konvensional yang mensyaratkan kehadiran seseorang, interaksi melalui televisi lebih bersifat *one way traffic communication*, lebih praktis dan tidak merepotkan pemilih.

Daftar Pustaka

- Amal, Ichsanul. 1998. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arifin, Anwar. 2008. *Opini Publik*. Yogyakarta: Pustaka Indonesia.
- Baran, Stanley J & Denni K Davis. 2000. *Mass Communication Theory, Foundation, Ferment, dan Future*, Wadsorth.
- Corner, John & Pels, Dick. 2003. *Media and the Restyling of Politics: Consumerism, Celebrity and Cynicis*, Sage Publication.
- Denton, Jr, Robert, E (ed). 2000. *Political Communication Ethics, An Oxymoron?*, Praeger Publisher.
- Firmansyah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Harun, Rochajat, Sumarno. 2006. *Komunikasi Politik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Mandarmaju.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit buku Kompas.
- Hamad, Ibnu. 2003. “Menggugat Pers dan Partai Politik dalam Panggung Wacana Politik Indonesia” dalam Mahrus Irsyam & Lili Romli (ed), *Menggugat Partai Politik*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia.
- Hidayat, Dedy N. 2000. *Pers dalam “Revolusi Mei”, Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2004. “Menjadi Presiden dalam Era Media Presidency”, dalam Rendro Dhani, *Centang Perenang Manajemen Komunikasi Kepresidenan dari Soekarno sampai Megawati*. Jakarta:, LP3ES.
- JA, Denny. 2006. *Melewati Perubahan Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Kavanagh, Dennis. 1997. *Ellection Campaigning: The New Marketing of Politics*. United Kingdom: Blackwell.
- Lance, Bennet & Robert Entman (ed). 2001. *Mediated Politics: Communication in the future of Demokrasi*, Cambridge University Press.
- Lesmana, Tjipta. 2008. *Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*, Gramedia.
- Littlejohn, Stephen W. & Foos. 2005. *Karen A, Theories of Human Communication*, Thomson Wadsworth.
- Lichtenberg, Judith. 1990. *Democracy and The Mass Media*. Cambridge University Press.
- Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. 2006. Bandung: Rosdakarya.

Nursal, Ahmad. 2004. *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia.

Pfetsch, Barbara and Esser Frank, (ed). 2004. *Comparing Political Communication, Theories, Cases, and Challenges*. Cambridge University Press.

Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Psikologi Komunikasi*. Jakarta: Rosdakarya.

_____, et.all, 2002. *Politik, Demorasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press.

Suyanto & Sutinah (ed.). 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

BIODATA PENULIS

Drs. Saiman, M.Si, adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 1991. Lahir di Merotai 29 September 1966, menyelesaikan S1 di jurusan Hubungan Internasional tahun 1990 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 bidang Administrasi Pembangunan dan Lingkungan. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi S3 Ilmu Politik di Universitas Indonesia Jakarta. Pengalaman organisasi profesi antara lain Anggota Departemen Pengembangan dan Isu Strategis MIPI Kabupaten Malang tahun 2001-2013, Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat Jakarta tahun 2011-2013 serta Anggota Bidang Kerjasama dan Kelembagaan Asosiasi Dosen Ilmu Politik (ADIPI) Pusat Jakarta tahun 2013-2017. Karya ilmiah antara lain Kebijakan Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (1997), Pengantar Pembangunan (2004), Atropologi Politik (2005), Tantangan Budaya Nasional di Era Globalisasi (2009), dan Politik Perbatasan Indonesia (2011).

Hafid Adim Pradana, MA, dilahirkan di Kota Malang pada tanggal 26 Juli 1989. Alumni Pasca Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini saat ini adalah Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak Februari 2014, penulis aktif sebagai anggota tim peneliti lapangan Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), dibawah pimpinan Philips Vermonte. Selain itu, sejak Februari 2015, penulis juga aktif sebagai Koordinator Center for Middle Eastern Studies (COMES) Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis bisa dihubungi melalui alamat email: hafidadimpradana@yahoo.co.id

Dyah Estu Kurniawati, S.Sos, M.Si, adalah dosen ilmu Hubungan Internasional FISIP UMM yang sedang menyelesaikan program Doktorat dalam Ilmu Politik di UGM. Dengan spesialisasi tentang kajian isu-isu internasional dan domestik (intermestik), penulis berharap dapat

membumikan ilmu HI sehingga belajar HI tidak hanya belajar tentang luar negeri. Menyelesaikan S1 nya di Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Jember dan S2 Jurusan Ilmu Politik UGM, tahun 2009 lalu mendapat amanah sebagai Kajur Hubungan Internasional UMM. Hingga saat ini aktif menulis artikel, jurnal dan buku baik pada level nasional maupun internasional. Dapat dihubungi melalui e-mail dyahestu@gmail.com

Dra. Tutik Sulistyowati, M.Si, adalah dosen mata kuliah Sosiologi Gender di Jurusan Sosiologi UMM. Lahir di Blitar, 16 Maret 1968, penulis menyelesaikan S1 di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial UMM dan S2 Magister Sosiologi di kampus yang sama. Saat ini aktif dalam kajian-kajian perempuan dan anak di Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak UMM, serta saat ini sedang melakukan penelitian tentang pekerja migran perempuan. Selain itu penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang sosiologi lainnya, setidaknya saat ini sudah lebih dari 14 judul penelitian yang dihasilkan. Penulis saat ini tengah menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail sulistyowati_tutik@yahoo.co.id

Gonda Yumitro, MA, dilahirkan di sebuah kampung kecil, Tanjung Ganti II, 200 km dari kota Bengkulu, pada tanggal 24 Juni 1985. Terbiasa merantau sejak kecil, ketika menginjak remaja perantauannya dilanjutkan ke kota Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di jurusan Hubungan Internasional UGM sampai tahun 2006. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, sempat berpindah-pindah dari kota Jogja, Bandung, Jakarta, sampai akhirnya memantapkan diri untuk tinggal di kota Malang bersama keluarga kecilnya dengan aktifitas keseharian mengajar di jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang sejak tanggal 1 Juni 2007. Dari tahun 2010 sd 2012, ia melanjutkan pendidikan MA Political Science di Jamia Millia Islamia dengan beasiswa *Indian Council for Cultural Relations (ICCR)* dan MA International Relations Annamalai University. Sejauh ini alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa karya baik berupa buku, tulisan jurnal, makalah prosiding dan artikel terutama berkaitan dengan isu hubungan internasional dan dunia Islam. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail yumitro@gmail.com

Najamuddin Khairur Rijal, S.IP, M.Hub.Int, adalah pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Lahir dan dibesarkan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan pada 4 Januari 1991. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan HI FISIP UMM tahun 2013 dan program S-2 diselesaikan pada Program Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tahun 2015. Dapat dihubungi di email *nkhairurrijal@gmail.com*.

M.Syaprin Zahidi, M.A, adalah Staf Pengajar di Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Mulai dari tahun 2014 Ia menjabat sebagai Sekretaris Prodi di Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Ia merupakan alumnus pertama dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Gelar *Master of Arts* diperolehnya dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (UGM). Buku karyanya yang pernah diterbitkan berjudul “Bagaimana Pengaruh Kepentingan ASEAN dan Cina Terhadap Bentuk Legal ACFTA” sedangkan tulisan-tulisannya yang pernah dimuat di media massa antara lain: *Fenomena Terorisme di Asia Tenggara; Formula Ideal Mengatasi Masalah Imigran; Masa Depan ASEAN Saat diketuai Myanmar; Menakar Efektivitas Hukum Internasional; Politik Luar Negeri Pada Era Soeharto dan SBY; Pasang Surut Hubungan Indonesia-Australia, Mungkinkah Nasionalisasi Freeport Terjadi?; dan Babak Baru Kasus “Papa Minta Saham”*. Penulis dapat dihubungi melalui syaprin123@gmail.com

Demeiati Nur Kusumaningrum, M.A., lahir di Jayapura 5 Mei 1986. Penulis dibesarkan di Kota Jombang, Jawa Timur dan Yogyakarta. Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sementara, Pendidikan S-2 diselesaikan dalam 1,5 tahun di Universitas Gadjah Mada. Latar belakang pendidikan penulis yang mengambil jurusan Ilmu Hubungan Internasional memotivasinya untuk menekuni studi ekonomi politik, terutama pada aspek kerjasama pembangunan dan pendekatan isu-isu internasional-domestik (Intermestik). Sejak tahun 2013, penulis mengabdikan pada Universitas Muhammadiyah Malang, sebagai staf pengajar dan peneliti pada *Center for Intermestic Studies (CIS)* Prodi. Hubungan Internasional. Penulis aktif melakukan penelitian, publikasi media massa, dan pada tahun 2015 dipercaya sebagai Ketua Pusat

Kajian Sosial Politik (PKSP) FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satu karya tulisan yang menjadi referensi mata kuliah adalah buku “Ekonomi Politik Kerjasama Pembangunan” diterbitkan tahun 2014. Dapat dihubungi melalui e-mail dn.kusumaningrum@yahoo.com

Muhammad Hayat, M.A., lahir di Banjarnegara, sebuah kota kecil di bagian tengah dari Jawa Tengah pada 5 Agustus 1969. Alumni S-1 Jurusan Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah dan Alumni S-2 Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini merasa sangat *at-home* manakala memperbincangkan sosiologi dalam ranah *discourse* pembangunan. Beberapa penelitian berbasis Perspektif *After Postmo* sudah ia hasilkan, antara lain adalah: 1. Selamatan Dusun: Peneguhan Komunitas sebagai Subjek, 2. Punden Tutup: “*The Beyond*” sebagai Bentuk “Sistem Pengetahuan Sekitar” yang Menguatkan Kolektifitas, 3. Petirtan Beji Sari: “*The Beyond*” dalam Ruang Tumbuh Industri. Ketertarikannya pada puisi, cerpen maupun novel, juga telah mewujud dalam satu buku puisi *Postmo* dengan judul: *Postmodern* dalam Jejak Puisi (Cara Mudah Memahami Teori *Postmodern*). Sejak tahun 2002, penulis adalah dosen tetap di Prodi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Dapat dihubungi melalui e-mail hayato.hayat@gmail.com

Winda Hardyanti, S.Sos, M.Si, lahir di Kediri, 20 April 1986, dosen yang mengabdikan di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 2010 ini mencintai dunia penulisan sejak usianya masih sembilan tahun. Berawal dari hobi menulis diary dan cerpen, kecintaannya pada dunia tulis-menulis dan jurnalistik membawanya berkarir sebagai reporter radio selama dua tahun di Radio Trijaya FM Surabaya dan freelance journalist di Majalah Gapura milik Pemkot Surabaya selama delapan tahun. Selain itu selama lebih dari empat tahun penulis juga aktif melakukan riset dan penulisan di Pusat Kajian Komunikasi Surabaya (Puskakom). Tahun 2008, penulis lulus dari program sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga dan S2 di Magister Sosiologi konsentrasi Sosiologi Komunikasi pada tahun 2013 lalu. Saat ini selain mengajar, penulis masih aktif menulis beberapa artikel dan melakukan riset serta memotivasi mahasiswa untuk membuat buku. Baginya menulis adalah katarsis. Sebuah pelampiasan dari naluri jurnalistiknya yang meletup-letup. Dapat dihubungi melalui e-mail winda86@gmail.com dan account Facebook @Winda Hardyanti

Drs. Oman Sukmana, M.Si, lahir di Sumedang pada tanggal 09 Pebruari 1966. Menempuh pendidikan S1 di FISIP UNPAD Bandung lulus tahun 1991 dan S2 Psikologi Sosial Program Pascasarjana UNPAD lulus tahun 1997, saat ini sedang menempuh studi S3 Sosiologi, Fisipol, UGM. Sejak tahun 1991 menjadi dosen Kopertis VII Surabaya dpk pada FISIP UMM, pernah menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Social FISIP UMM (1998-1999), Pembantu Dekan III FISIP UMM (1999-2009), dan Anggota Panwaslu Kabupaten Malang (2003-2004). Aktif menulis buku dan bahan ajar, kegiatan penelitian baik internal maupun eksternal, dan melaksanakan berbagai pengabdian pada masyarakat. Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMM ini pernah menjadi Dosen Berprestasi FISIP UMM tahun 2008.

Nurudin, adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain aktif menulis, penulis juga memiliki 'hobby' memotivasi mahasiswa dan kolega untuk membuat karya tulis baik berupa artikel maupun buku. Ia telah mempublikasikan 15 buku dan ratusan artikel. Sejumlah buku karyanya bahkan mampu menembus predikat *best seller* dan menjadi buku pegangan di sejumlah kampus. Penulis juga ikut mengampanyekan pentingnya menulis di kalangan mahasiswa. Puluhan buku karya mahasiswa telah terbit berkat tangan dinginnya. Tentang penulis bisa dilihat dan dihubungi di Facebook: Nurudin AB, email: nurud70@yahoo.com, twitter: @nurudinwriter, blog: www.umm.academia.edu/NurudinUMM

Rachmad KDwi Susilo, M.A., lahir di Magelang, Jawa Tengah, 10 Oktober 1974. Riwayat Pendidikan, S-1 Jurusan Sosiologi FISIP UNS, Surakarta, (1994-1999) dan S-2 Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM Jogjakarta (2008-2010). Penulis adalah dosen tetap Prodi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Buku-Buku yang telah dipublikasikan yaitu Integrasi Ilmu Sosial, Memadukan Ilmu Sosial Tiga Peradaban (2005), Sosiologi Kependudukan, Pemikiran Teori dan Analisa Sosiologis Di Balik Fenomena Kependudukan (2006), Memahami Kecerdasan Orang-Orang Sukses: Refleksi Sosiologis Orang-Orang Ternama dalam Mensiasati Hidup (2007), 20 Tokoh Sosiologi Modern (2008), Jangan Goblok Melakoni Hidup (2010), *Co-management* Air Minum untuk Kesejahteraan Masyarakat (2011) dan Sosiologi Lingkungan dan Sumber

Daya Alam: Perspektif Teoritis dan Isu-Isu Mutakhir (2012). Untuk korespondensi silahkan hubungi di rachmad_umm2004@yahoo.com

Zen Amirudin, S.Sos.M.Med.Kom, lahir di Sanankulon Blitar, 03 Maret 1975. Menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di kota “Proklamator”, sementara pendidikan atas ditempuh di MAN Darul Ulum Peterongan Jombang. Pendidikan tinggi di selesaikan di Jurusan Komunikasi FISIP Univesitas Muhammadiyah Malang, (2000) dan strata dua nya di tempuh di FISIP Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR) (2013). Selama menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi kemahasiswaa baik intra maupun ekstra dan mulai 2005 telah menjadi dosen tetap pada Program Studi Komunikasi UMM sampai sekarang dan pengajar pada program Asutralian Consortium For In Country Indonesian Studies (ACICIS). Selain itu juga menjadi aktif menulis pada media lokal dan nasional, pemateri dalam berbagai forum lembaga eksekutif dan legislatif, melakukan berbagai penelitian baik internal maupun dari Dikti. Beberapa karya buku bunga rampai diantaranya *Internet Menuju Cyber Village* (2011), *Buku Panduan Skripsi* (2006), *Komunikasi Politik Aras Lokal* (2012).